



Buku ini membahas secara komprehensif konsep dan praktik manajemen kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam konteks dinamika pendidikan modern. Kurikulum dipahami sebagai jantung dari proses pendidikan yang menentukan arah, tujuan, dan kualitas pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan kurikulum yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Buku ini menguraikan berbagai aspek manajemen kurikulum, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, hingga evaluasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan kebijakan pendidikan nasional. Selain itu, dibahas pula peran kepala sekolah, guru, dan pemangku kebijakan dalam mengelola kurikulum secara kolaboratif dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti tantangan implementasi kurikulum di lapangan, termasuk adaptasi terhadap perubahan kurikulum nasional, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta penguatan kompetensi abad ke-21. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, guru, dan praktisi pendidikan dalam memahami serta mengembangkan manajemen kurikulum yang efektif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini.



- 📍 Bawang-Batang-Jawa Tengah
- 🌐 <https://nasikhinalami.my.id/>
- ✉ [nasikhinalami@gmail.com](mailto:nasikhinalami@gmail.com)
- ☎ 0882253065670
- 📱 [naupublishing](#)

MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH

2026

Dr. Nur Khoiri, M.Ag.  
Dr. H. Darmuin, M.Ag.

# MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN

## DASAR & MENENGAH



# Manajemen Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Dr. Nur Khoiri, M.Ag.

Dr. H. Darmuin, M.Ag.



## ***Manajemen Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah***

Penulis: 1. Dr. Nur Khoiri, M.Ag.

2. Dr. H. Darmuin, M.Ag.

Copyright©2026 by Dr. Nur Khoiri, M. Ag. Dkk.

Diterbitkan oleh:



Editor : Muhammad Alif Nuril Ibad  
Tata letak : Nabil Awhaddani  
Desain Cover : Aida Sa'adah  
Ukuran : 14,8 x 21 cm (A4)  
Hal : 230  
ISBN : Dalam proses pengajuan  
Cetakan I : 2026

*All right reserved*

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, buku berjudul *Manajemen Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* ini dapat disusun sebagai upaya memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan dunia pendidikan di Indonesia. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terus berkembang mengikuti dinamika zaman, tuntutan kompetensi abad ke-21, serta kebijakan pendidikan nasional. Di dalamnya dibahas berbagai konsep, prinsip, dan strategi manajemen kurikulum yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pendidik, kepala sekolah, pengambil kebijakan, mahasiswa, serta pemerhati pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Semarang, 22 Juni 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I:</b> Konsep Dasar Kurikulum dalam Pendidikan Dasar dan Menengah .....	1
<b>BAB II:</b> Perkembangan Kurikulum dan Implikasi Manajemen Kurikulum dalam Dunia Pendidikan.....	20
<b>BAB III:</b> Aliran dan Teori Pendidikan serta Implikasinya dalam Dunia Pendidikan .....	37
<b>BAB IV:</b> Komponen Kurikulum dan Koneksinya dalam Pengembangan Kurikulum .....	62
<b>BAB V:</b> Dinamika dalam Pengembangan Kurikulum dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pengembangan Kurikulum .....	80
<b>BAB VI:</b> Manajemen Pengembangan Kurikulum (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Evaluasi) .....	103
<b>BAB VII:</b> Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen dalam Manajemen Kurikulum .....	118
<b>BAB VIII:</b> Manajemen Kurikulum di Pendidikan Dasar dan Menengah: Analisis Jenis Kurikulum dan Perencanaan Program Pembelajaran .....	138
<b>BAB IX:</b> Analisis Perubahan Kurikulum dan Implikasinya dalam Manajemen Lembaga Pendidikan .....	161
<b>BAB X:</b> Desain Kurikulum: Sentralisasi, Desentralisasi, dan Campuran .....	176
<b>BAB XI:</b> Penyusunan dan Penerapan Kurikulum dalam Model Project Based Learning .....	184
<b>BAB XII:</b> Desain Kurikulum: Sentralisasi, Desentralisasi, dan Campuran .....	200
<b>BAB XIII:</b> Kurikulum Merdeka Pendidikan Dasa dan Menengah .....	215

# **BAB I**

**KONSEP DASAR KURIKULUM DALAM  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

## A. Pendahuluan

Kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Melalui kurikulum, arah, tujuan, isi, serta strategi pembelajaran dirumuskan secara sistematis guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kurikulum yang terarah dan relevan dengan perkembangan zaman.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, kurikulum memiliki peran strategis karena pada fase inilah fondasi intelektual, karakter, dan keterampilan peserta didik dibentuk. Pendidikan dasar berfungsi meletakkan dasar kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan hidup, sedangkan pendidikan menengah berperan mengembangkan potensi tersebut agar peserta didik siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kurikulum pada kedua jenjang ini harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, psikologis, dan sosiologis.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial, kurikulum terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Menurut Beauchamp (1975), kurikulum adalah dokumen tertulis yang memuat rencana pengembangan pengajaran bagi siswa selama bersekolah.<sup>3</sup> Kebijakan terbaru seperti Kurikulum Merdeka yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3

<sup>2</sup> Pinontoan, M. (2023). Kurikulum Pendidikan (Konsep Dasar Implementasi di Sekolah). Ideas Publishing, hlm. 45.

<sup>3</sup> Beauchamp, G. A. (1975). Curriculum Theory (3rd ed.). Wilmette, Illinois: The Kagg Press, hlm. 7.

dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, penguatan karakter, serta pengalaman belajar yang bermakna.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak lagi dipandang sekadar sebagai daftar mata pelajaran, melainkan sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang dirancang untuk membentuk peserta didik secara holistik.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep dasar kurikulum dalam pendidikan dasar dan menengah menjadi penting untuk dipahami secara mendalam. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan landasan teoretis dan praktis dalam mengelola serta mengembangkan kurikulum yang relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pendidikan di era modern.<sup>5</sup>

## **B. Teori-Teori Kurikulum**

Kurikulum sebagai bidang kajian ilmiah telah melahirkan berbagai teori yang menjadi landasan bagi para pengembang dan praktisi pendidikan. Menurut Beauchamp (1975), teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang memberi makna terhadap kurikulum sekolah dengan menunjukkan hubungan antar unsur-unsurnya, serta menjelaskan dan memprediksi fenomena kurikulum sebagai akibat dari kondisi-kondisi tertentu. Berikut ini diuraikan beberapa teori utama yang mendasari pengembangan kurikulum:

### **1. Teori Kurikulum Klasik (*Subject-Centered Curriculum*)**

Teori kurikulum klasik menempatkan mata pelajaran (subject matter) sebagai pusat dari seluruh kegiatan pembelajaran. Teori ini berakar pada pandangan filsafat Perennialisme dan Esensialisme yang meyakini bahwa kurikulum harus didasarkan pada nilai-nilai dan

---

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Merdeka, hlm. 3.

<sup>5</sup> Hidayat, R. (2019). Konsep Dasar Kurikulum. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12.

pengetahuan yang telah teruji sepanjang sejarah.<sup>6</sup> Dalam pandangan ini, kurikulum dipandang sebagai warisan budaya dan intelektual yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Robert Maynard Hutchins (1936), salah satu tokoh utama teori ini, berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah melatih intelektual peserta didik melalui penguasaan ilmu pengetahuan yang bersifat universal dan abadi.<sup>7</sup> Implikasinya, kurikulum disusun berdasarkan disiplin ilmu yang terstruktur dan hierarkis, seperti matematika, bahasa, sains, dan humaniora. Teori ini masih relevan dalam konteks pendidikan Indonesia, terutama pada komponen inti mata pelajaran yang diatur dalam standar nasional pendidikan.

## 2. Teori Kurikulum Progresif (*Experience-Centered Curriculum*)

Berbeda dengan teori klasik, teori kurikulum progresif yang dipelopori oleh John Dewey (1938) menempatkan pengalaman peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah proses kehidupan itu sendiri, bukan sekadar persiapan untuk kehidupan di masa depan.<sup>8</sup> Kurikulum progresif menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

Dalam perspektif ini, kurikulum dikembangkan berdasarkan minat, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat aktif, seperti proyek, diskusi, dan pemecahan masalah.<sup>9</sup> Pengaruh teori ini terlihat jelas dalam Kurikulum Merdeka yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) dan pengembangan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan holistik pendidikan.

---

<sup>6</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 14.

<sup>7</sup> Sukmadinata, N. S. (2019).

<sup>8</sup> Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Collier Books, hlm. 17.

<sup>9</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 16.

### 3. Teori Kurikulum Rekonstruksionis

Teori rekonstruksionis yang dikembangkan oleh George Counts dan Theodore Brameld memandang kurikulum sebagai alat untuk merekonstruksi masyarakat menuju tatanan yang lebih adil dan demokratis.<sup>10</sup> Teori ini menekankan peran pendidikan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti ketimpangan, diskriminasi, dan kemiskinan. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah Indonesia, perspektif rekonstruksionis tercermin dalam penekanan pada pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai Pancasila, dan pendidikan karakter yang bertujuan membentuk generasi yang berkomitmen pada keadilan sosial dan kemajuan bangsa.<sup>11</sup>

### 4. Teori Kurikulum Humanistik

Teori kurikulum humanistik berfokus pada perkembangan pribadi peserta didik secara utuh, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Abraham Maslow (1954) dengan teori hierarki kebutuhannya dan Carl Rogers (1969) dengan konsep *student-centered learning* menjadi tokoh utama yang menginspirasi pendekatan ini.<sup>12</sup> Dalam perspektif humanistik, kurikulum dirancang untuk membantu peserta didik mengaktualisasikan potensi terbaik mereka. Pembelajaran diarahkan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemandirian belajar.<sup>13</sup> Pengaruh teori ini tampak dalam penerapan asesmen formatif dan pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka yang mengakui keberagaman potensi setiap peserta didik.

---

<sup>10</sup> Brameld, T. (1956). *Toward a Reconstructed Philosophy of Education*. New York: Dryden Press, hlm. 33.

<sup>11</sup> Mubarok, A. A., Aminah, S., Sukanto, S., Suherman, D., & Berlian, U. C. (2021). Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), hlm. 42.

<sup>12</sup> Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row, hlm. 91; Rogers, C. (1969). *Freedom to Learn*. Columbus, Ohio: Merrill, hlm. 105.

<sup>13</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 20.

### C. Pendekatan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang mencerminkan nilai dan orientasi yang berbeda. Sukmadinata (2019) mengidentifikasi beberapa pendekatan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu:<sup>14</sup>

#### 1. Pendekatan Subjek Akademis

Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua dan paling banyak digunakan dalam perancangan kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan pada sejumlah mata pelajaran yang mencerminkan ilmu pengetahuan.<sup>15</sup> Guru dipandang sebagai ahli bidang studi yang bertugas menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, pendekatan ini tercermin dalam penetapan struktur kurikulum yang memuat mata pelajaran wajib dan pilihan pada setiap jenjang pendidikan.

#### 2. Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik bertolak dari ide humanisme yang menitikberatkan pada pengembangan kepribadian dan kesadaran diri peserta didik. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi manusiawi peserta didik secara optimal, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.<sup>16</sup> Pendekatan ini menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan makna dari pengalaman belajarnya.

#### 3. Pendekatan Teknologis

Pendekatan teknologis memandang kurikulum sebagai seperangkat rencana yang dapat direkayasa secara sistematis untuk mencapai tujuan yang terukur. Pendekatan ini dipengaruhi oleh

---

<sup>14</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 80.

<sup>15</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 82.

<sup>16</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 86.

perkembangan teknologi pendidikan dan psikologi behaviorisme.<sup>17</sup> Kurikulum dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan, perumusan tujuan yang terukur, pemilihan metode yang efektif, dan evaluasi berbasis hasil belajar. Dalam konteks pendidikan Indonesia, pendekatan ini tercermin dalam sistem standar nasional pendidikan yang menetapkan capaian pembelajaran secara terperinci.

#### 4. Pendekatan Rekonstruksi Sosial

Pendekatan rekonstruksi sosial memandang kurikulum sebagai sarana untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kurikulum dikembangkan berlandaskan pada kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan nyata masyarakat.<sup>18</sup> Dalam konteks pendidikan Indonesia, pendekatan ini termanifestasi dalam muatan lokal, pendidikan karakter, dan program penguatan literasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tantangan global.

### D. Model-Model Pengembangan Kurikulum

Model pengembangan kurikulum merupakan pola atau kerangka yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum. Beberapa model yang paling berpengaruh dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1. Model Tyler (1949)

Model Tyler merupakan model pengembangan kurikulum yang paling klasik dan berpengaruh. Dalam bukunya yang berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (1949), Ralph W. Tyler mengemukakan empat pertanyaan fundamental dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1) tujuan pendidikan apa yang ingin dicapai oleh

---

<sup>17</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). Op.cit.,hlm 91.

<sup>18</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). Op.cit.,hlm 95.

<sup>19</sup> Hamalik, O. (2017). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 18.

sekolah, 2) pengalaman belajar apa yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut, 3) Bagaimana pengalaman belajar tersebut diorganisasikan secara efektif, 4) Bagaimana kita dapat menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai.<sup>20</sup> Model Tyler bersifat rasional, linear, dan deduktif. Pengembangan kurikulum dimulai dari penetapan tujuan yang bersumber dari tiga hal: kajian tentang peserta didik, kajian tentang kehidupan di luar sekolah, dan saran dari para ahli mata pelajaran. Tujuan tersebut kemudian disaring melalui filsafat pendidikan dan psikologi belajar untuk menghasilkan tujuan yang spesifik dan terukur.<sup>21</sup>

## 2. Model Taba (1962)

Hilda Taba mengembangkan model yang bersifat induktif, yang berbeda dengan model Tyler yang deduktif. Taba berpendapat bahwa kurikulum sebaiknya dikembangkan oleh guru, bukan oleh pejabat atau administrator, karena guru yang paling memahami kebutuhan peserta didiknya.<sup>22</sup> Model Taba mencakup tujuh langkah pengembangan kurikulum 1) diagnosis kebutuhan peserta didik, 2) formulasi tujuan, 3) pemilihan konten, 4) organisasi konten, 5) pemilihan pengalaman belajar, 6) organisasi pengalaman belajar, dan 7) penentuan cara evaluasi.<sup>23</sup> Kelebihan model ini adalah lebih demokratis karena melibatkan guru secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum.

---

<sup>20</sup> Tyler, R. W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 1.

<sup>21</sup> Tyler, R. W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 4.

<sup>22</sup> Taba, H. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World, hlm. 12.

<sup>23</sup> Taba, H. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World, hlm. 14.

### 3. Model Beauchamp (1975)

George A. Beauchamp mengembangkan model yang dikenal sebagai *Beauchamp's System*. Model ini memandang kurikulum sebagai suatu sistem yang terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan arena pengembangan kurikulum, penetapan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum.<sup>24</sup> Model Beauchamp menekankan pentingnya *curriculum engineering*, yaitu proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Model ini relevan dalam konteks manajemen kurikulum di satuan pendidikan, karena memberikan kerangka yang komprehensif bagi para pengelola pendidikan dalam mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum.

### 4. Model Wheeler (1967)

D.K. Wheeler mengembangkan model kurikulum yang berbentuk siklus. Model ini terdiri dari lima fase 1) pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus, 2) pemilihan pengalaman belajar yang sesuai, 3) pemilihan konten melalui pengalaman belajar, 4) organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan konten, dan 5) evaluasi terhadap setiap fase sebelumnya.<sup>25</sup> Keunggulan model Wheeler adalah sifatnya yang siklikal, di mana evaluasi bukan merupakan tahap akhir melainkan proses yang terus berulang dan memberikan umpan balik bagi pengembangan kurikulum selanjutnya. Model ini cocok diterapkan dalam konteks pengembangan kurikulum yang dinamis dan adaptif, seperti dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang mengedepankan prinsip *continual improvement*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Beauchamp, G. A. (1975). *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>25</sup> Wheeler, D. K. (1967). *Curriculum Process*. London: University of London Press, hlm. 31.

<sup>26</sup> Kemendikbudristek. (2022). *Op.cit.*, hlm. 8

## E. Hakikat Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pendidikan nasional, kurikulum menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.<sup>27</sup>

Secara etimologi, kata "kurikulum" berasal dari bahasa Latin *curriculum* yang berarti "berlari cepat", "maju dengan cepat", "menjalani", atau "berusaha mencapai tujuan tertentu". Dalam konteks pendidikan, kata ini kemudian berkembang menjadi *currere* yang berarti "lintasan" atau "jalur" yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam proses pendidikan.<sup>28</sup> Para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang kurikulum yang mencerminkan perkembangan pemikiran dari masa ke masa

Hilda Taba (1962) mengatakan bahwa kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, dan materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Biasanya dalam suatu kurikulum sudah termasuk program penilaian hasilnya.<sup>29</sup> Ralph Tyler (1949) menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya.<sup>30</sup>

James Popham dan Eva Baker (1970) mengatakan bahwa kurikulum adalah seluruh hasil belajar yang direncanakan dan merupakan tanggung jawab sekolah. Materi kurikulum mengacu kepada tujuan pengajaran yang diinginkan.<sup>31</sup> Saylor, Alexander, dan Lewis (1981) mengartikan kurikulum

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 19.

<sup>28</sup> Nasution, S. (2012). *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1.

<sup>29</sup> Taba, H. (1962). *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>30</sup> Tyler, R. W. (1949). *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>31</sup> Popham, W. J., & Baker, E. L. (1970). *Systematic Instruction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, hlm. 48.

sebagai suatu rencana yang berisi sekumpulan pengalaman belajar untuk anak didik yang akan dididik.<sup>32</sup> Sementara itu, S. Nasution (2012) memberikan definisi yang lebih luas dengan menyatakan bahwa kurikulum memiliki empat dimensi: (1) kurikulum sebagai rencana tertulis, (2) kurikulum sebagai sistem, (3) kurikulum sebagai studi, dan (4) kurikulum sebagai pengalaman peserta didik.<sup>33</sup> Keempat dimensi ini menunjukkan kompleksitas kurikulum sebagai konsep yang tidak dapat dipahami secara sempit.

Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah serangkaian materi yang disusun sedemikian rupa, yang memiliki tujuan jelas yaitu kemampuan peserta didik untuk hidup sesuai zamannya, yang ditandai dengan kemampuan peserta didik untuk beradaptasi sesuai situasi, yang dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan peserta didik sesuai tahap perkembangannya, sekaligus relevan dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>34</sup>

## **F. Tujuan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah**

Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

---

<sup>32</sup> Saylor, J. G., Alexander, W. M., & Lewis, A. J. (1981). *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* (4th ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston, hlm. 10.

<sup>33</sup> Nasution, S. (2012). *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>34</sup> Hidayat, R. (2019). *Op.cit.*, hlm. 18.

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".<sup>35</sup>

Tujuan pendidikan nasional selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut:<sup>36</sup>

1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, tujuan kurikulum diperluas dengan penambahan dimensi Profil Pelajar Pancasila yang mencakup: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; (2) berkebinekaan global; (3) bergotong royong; (4) mandiri; (5) bernalar kritis; dan (6) kreatif.<sup>37</sup> Keenam dimensi ini merupakan kristalisasi dari tujuan pendidikan nasional yang diselaraskan dengan kebutuhan abad ke-21.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 3.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi.

<sup>37</sup> Kemendikbudristek. (2022). *Op.cit.*, hlm. 4.

## G. Landasan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Penyusunan kurikulum pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada beberapa landasan utama. Menurut Sukmadinata (2019), landasan pengembangan kurikulum merupakan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap hakikat kurikulum yang dikembangkan oleh suatu lembaga pendidikan.<sup>38</sup> Landasan-landasan tersebut adalah:

### 1. Landasan Filosofis

Kurikulum berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadi fondasi dalam pengembangan karakter peserta didik. Landasan filosofis memberikan kemudahan kepada para pengembang kurikulum dengan adanya kerangka berpikir dalam organisasi sekolah atau organisasi kelas.<sup>39</sup>

Landasan filosofis membantu para pengembang kurikulum menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan, misalnya: untuk apa sekolah, apa nilai dari belajar, bagaimana siswa belajar, metode dan media apa yang digunakan, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan.<sup>40</sup> Landasan filosofis juga memberikan kerangka berpikir yang lebih luas terhadap isu-isu dan tugas-tugas pendidikan, seperti penetapan tujuan pendidikan, organisasi materi, proses pembelajaran, serta pengalaman belajar dan aktivitas belajar yang dapat dilakukan di dalam kegiatan belajar.

Secara lebih spesifik, terdapat tiga aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan kurikulum Indonesia. Pertama, Perennialisme yang menekankan pentingnya warisan budaya dan ilmu pengetahuan universal. Kedua, Progresivisme yang

---

<sup>38</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 38.

<sup>39</sup> Sukirman, D., & Nugraha, A. (2007). *Landasan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: UPI.Edu, hlm. 14.

<sup>40</sup> Sukirman, D., & Nugraha, A. (2007). *Landasan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: UPI.Edu, hlm. 15.

mengutamakan pengalaman belajar dan keaktifan peserta didik. Ketiga, Rekonstruksionisme yang memandang pendidikan sebagai sarana pembaruan masyarakat.<sup>41</sup>

## 2. Landasan Yuridis

Secara hukum, kurikulum mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Landasan yuridis utama pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah meliputi:<sup>42</sup>

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.
- d. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

## 3. Landasan Psikologis

Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Landasan psikologis memberikan pemahaman tentang bagaimana peserta didik belajar, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 44.

<sup>42</sup> Mubarak, A. A., et al. (2021). *Op.cit.*, hlm. 45.

<sup>43</sup> Cappa, E., Hamzah, R. A., & Intan, I. (2024). Pengembangan Aspek Landasan terhadap Perancangan Kurikulum di Sekolah Dasar. *Scholars: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(1), hlm. 32.

Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjadi salah satu landasan psikologis utama dalam pengembangan kurikulum. Piaget membagi perkembangan kognitif manusia menjadi empat tahap: (1) sensorimotor (0-2 tahun), (2) praoperasional (2-7 tahun), (3) operasional konkret (7-11 tahun), dan (4) operasional formal (11 tahun ke atas).<sup>44</sup> Pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan ini sangat penting dalam menentukan jenis materi, metode, dan tingkat abstraksi yang sesuai pada setiap jenjang pendidikan.

Selain Piaget, teori Lev Vygotsky tentang Zone of Proximal Development (ZPD) juga berpengaruh besar dalam pengembangan kurikulum. Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran yang optimal terjadi ketika peserta didik mendapatkan bimbingan (scaffolding) dalam melakukan tugas yang berada di luar kemampuan mandiriya tetapi masih dalam jangkauan potensinya.<sup>45</sup>

Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku peserta didik merupakan akibat dari intervensi program pendidikan. Perubahan perilaku peserta didik ada yang diperoleh melalui proses kematangan atau pengaruh dari luar program pendidikan.<sup>46</sup> Dengan adanya kurikulum diharapkan dapat membentuk tingkah laku baru berupa kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial dari setiap peserta didik.

#### 4. Landasan Sosiologis

Kurikulum harus responsif terhadap perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan

---

<sup>44</sup> Piaget, J. (1970). *Science of Education and the Psychology of the Child*. New York: Orion Press, hlm. 26.

<sup>45</sup> Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 86.

<sup>46</sup> Cappa, E., et al. (2024). *Op.cit.*, hlm. 33.

adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya.<sup>47</sup>

Dalam konteks globalisasi dan era Revolusi Industri 4.0, landasan sosiologis pengembangan kurikulum menuntut adanya integrasi keterampilan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 4C: Critical Thinking (berpikir kritis), Creativity (kreativitas), Communication (komunikasi), dan Collaboration (kolaborasi).<sup>48</sup> Keterampilan ini menjadi kompetensi yang esensial bagi generasi yang akan hidup dan bekerja di era yang semakin kompleks dan tidak pasti.

Landasan sosiologis juga mencakup pertimbangan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas nasional, sekaligus membekali peserta didik dengan kompetensi untuk berinteraksi dalam konteks global.<sup>49</sup>

## **H. Fungsi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah**

Secara konseptual, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>50</sup> Secara umum, kurikulum berfungsi sebagai:

### **1. Kurikulum sebagai Rencana Pendidikan**

Kurikulum sebagai rencana pendidikan menempatkan dokumen kurikulum sebagai pedoman normatif dan operasional bagi guru. Oemar Hamalik (2017) menjelaskan bahwa kurikulum berfungsi

---

<sup>47</sup> Mubarak, A. A., et al. (2021). *Op.cit.*, hlm. 40.

<sup>48</sup> Partnership for 21st Century Learning. (2019). *Framework for 21st Century Learning*. Washington, DC: P21.

<sup>49</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 60.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 19.

sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui perencanaan pembelajaran yang sistematis.<sup>51</sup> Rencana tersebut mencakup struktur mata pelajaran, alokasi waktu, capaian pembelajaran, dan sistem asesmen.

Implementasi konsep ini terlihat dalam kebijakan nasional seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, yang memberikan pedoman tentang capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran aktif, serta asesmen berbasis kompetensi.<sup>52</sup> Dalam hal ini, kurikulum tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif semata, tetapi sebagai panduan yang hidup dalam proses pembelajaran sehari-hari.

## 2. Kurikulum sebagai Sistem

Kurikulum dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas komponen tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi yang saling berkaitan. Nana Syaodih Sukmadinata (2019) menegaskan bahwa perubahan pada satu komponen kurikulum akan memengaruhi komponen lainnya karena kurikulum merupakan sistem terpadu.<sup>53</sup>

Dalam pendidikan dasar, tujuan penguatan literasi dan numerasi harus didukung oleh materi yang sesuai tahap perkembangan kognitif anak, metode pembelajaran berbasis aktivitas, serta evaluasi autentik. Hilda Taba (1962) juga menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik dan dirumuskan secara sistematis agar pembelajaran efektif.<sup>54</sup>

## 3. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Konsep kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada hasil belajar yang dapat diamati dan diukur. S. Nasution (2012) menyatakan bahwa kurikulum modern tidak hanya berorientasi pada penguasaan

---

<sup>51</sup> Hamalik, O. (2017). *Op.cit.*, hlm. 22.

<sup>52</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

<sup>53</sup> Sukmadinata, N. S. (2019). *Op.cit.*, hlm. 105.

<sup>54</sup> Taba, H. (1962). *Op.cit.*, hlm. 16.

materi, tetapi pada pembentukan kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.<sup>55</sup>

Dalam pendidikan dasar, pendekatan ini tercermin dalam penguatan literasi membaca, numerasi dasar, kemampuan berpikir kritis sederhana, serta pembentukan karakter. Pada jenjang pendidikan menengah, kurikulum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja dengan bekal kompetensi yang relevan.<sup>56</sup> Penerapan pembelajaran tematik integratif dalam Kurikulum 2013 dan diferensiasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan orientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh.

#### 4. Kurikulum sebagai Pengalaman Belajar

Kurikulum juga dipahami sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang dialami peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Hamalik (2017) menegaskan bahwa pengalaman belajar merupakan inti dari kurikulum karena melalui pengalaman tersebut tujuan pendidikan dapat tercapai.<sup>57</sup>

Dalam pendidikan dasar, pengalaman belajar dirancang melalui kegiatan tematik, proyek sederhana, diskusi kelompok, permainan edukatif, serta aktivitas berbasis lingkungan sekitar. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip perkembangan anak usia sekolah dasar yang membutuhkan pembelajaran konkret dan kontekstual.<sup>58</sup> Pada pendidikan menengah, pengalaman belajar dirancang untuk mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Misalnya, melalui proyek kolaboratif, siswa tidak hanya memahami konsep akademik tetapi juga belajar bekerja sama dan bertanggung jawab.

#### 5. Kurikulum Berbasis Karakter

---

<sup>55</sup> Nasution, S. (2012). *Op.cit.*, hlm. 9.

<sup>56</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Op.cit.*

<sup>57</sup> Hamalik, O. (2017). *Op.cit.*, hlm. 28.

<sup>58</sup> Piaget, J. (1970). *Op.cit.*, hlm. 30.

Pendidikan dasar dan menengah memiliki fungsi strategis dalam pembentukan karakter. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta cakap dan kreatif. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan dasar dan menengah mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan sekolah.<sup>59</sup>

Implementasi pendidikan karakter semakin diperkuat dalam kebijakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang menempatkan penguatan karakter sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.<sup>60</sup> Melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan pengintegrasian Profil Pelajar Pancasila, kurikulum diarahkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian, dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 3.

<sup>60</sup> Kemendikbudristek. (2022). *Op.cit.*, hlm. 6.

# **BAB II**

## **PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN IMPLIKASI MANAJEMEN KURIKULUM DALAM DUNIA PENDIDIKAN**

## A. Pendahuluan

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih belum mencapai tingkat yang optimal. Oleh karena itu, isu pendidikan terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan di tengah masyarakat, salah satunya yaitu terkait kurikulum pendidikan. Sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia, pemerintah telah beberapa kali melakukan perkembangan kurikulum guna menyesuakannya dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan perkembangan zaman.<sup>61</sup> Dengan demikian, kurikulum pendidikan dituntut untuk bersifat adaptif, antisipatif, dan aplikatif agar mampu menjawab tantangan yang terus berkembang.

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional yang berfungsi membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam keseluruhan sistem pendidikan, kurikulum menempati posisi sentral karena menjadi pedoman dalam menentukan arah, tujuan, isi, serta proses pembelajaran.<sup>62</sup> Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai refleksi filosofis, sosiologis, dan ideologis bangsa dalam membentuk generasi masa depan.

Kurikulum yang telah disusun tidak akan memiliki makna apabila tidak diimplementasikan secara optimal di sekolah. Keberhasilan pengelolaan kurikulum sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan serta strategi pelaksanaannya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan pendidikan, implementasi kurikulum memerlukan landasan konsep, prinsip, prosedur, serta pendekatan manajerial yang tepat. Dengan kata lain, tanpa perumusan konsep yang matang, pelaksanaan kurikulum tidak akan berjalan secara efektif.

Konsep kurikulum sendiri dapat dipahami melalui dua sudut pandang, yaitu tradisional dan modern. Dalam perspektif tradisional, kurikulum dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran yang diajarkan

---

<sup>61</sup> Dakir, H. (2010). Perencanaan dan pengembangan kurikulum. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

<sup>62</sup> Hasan Baharun, *Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik* (2018), 3.

guru kepada peserta didik sebagai syarat untuk memperoleh ijazah. Sementara itu, dalam pandangan modern, kurikulum mencakup seluruh aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab, meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, guna mewujudkan proses pendidikan yang efektif dan efisien.<sup>63</sup>

Dalam konteks Indonesia, kurikulum telah mengalami perkembangan sebanyak sebelas kali sejak Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum Merdeka 2022.<sup>64</sup> Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum bersifat dinamis dan harus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Setiap perkembangan kurikulum merepresentasikan respons terhadap tantangan zaman dan evaluasi terhadap kelemahan kurikulum sebelumnya. Perkembangan tersebut terlihat seperti dalam rencana pelajaran 1947 disusun dalam konteks awal kemerdekaan dengan orientasi pada pembentukan karakter dan kesadaran berbangsa.<sup>65</sup> Kurikulum 1968 menegaskan pembentukan manusia Pancasila, sementara Kurikulum 1975 dan 1984 mulai mengadopsi pendekatan tujuan instruksional dan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).<sup>66</sup>

Memasuki era globalisasi, perkembangan kurikulum semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Pada kurikulum 2013 memperkuat integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendekatan saintifik.<sup>67</sup> Selain itu, kurikulum merdeka

---

<sup>63</sup> Afifah kamalia, Implementasi Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, tesis, (semarang; UIN Walisongo, 2021), h. 5

<sup>64</sup> Maulidah Hasnah Anas, Surya Bakti, Yeny Nasril, dan Rabiatul Adawiyah, “Analisis Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional di Indonesia dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka: Studi Literatur,” *Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 (2025): 1259–1272.

<sup>65</sup> Maulidah Hasnah Anas, Surya Bakti, Yeny Nasril, dan Rabiatul Adawiyah, “Analisis Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional di Indonesia dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka: Studi Literatur,” *Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 (2025): 1262.

<sup>66</sup> Eka Paramita, Aminullah Aminullah, Desi Ratnasari, dan Asmaul Husna, “Transformasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 169–184.

<sup>67</sup> Maulidah Hasnah Anas, Surya Bakti, Yeny Nasril, dan Rabiatul Adawiyah, “Analisis Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional di Indonesia dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka: Studi Literatur,” *Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 (2025): 1268.

belajar yang hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual, serta sebagai strategi pemulihan pembelajaran pasca pandemi.<sup>68</sup> Kurikulum ini menekankan profil pelajar pancasila dan diferensiasi pembelajaran. Namun, perkembangan kurikulum tidak akan efektif tanpa manajemen kurikulum yang baik. Darwis, Jamaluddin, dan Nasir menegaskan bahwa reformasi kurikulum seringkali menghadapi tantangan implementasi akibat kesenjangan kapasitas guru dan ketimpangan digital.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, pada penulisan makalah ini mengkaji mengenai perkembangan kurikulum dan implikasi manajemen kurikulum sehingga dapat membantu mengetahui aspek fundamental yang dapat menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi pendidikan yang lebih maju dan berkelanjutan. Melalui analisis historis dan kontemporer terhadap perkembangan kurikulum di Indonesia, makalah ini mengidentifikasi dinamika perubahan kurikulum sebagai respons terhadap tuntutan globalisasi, digitalisasi, serta integrasi kearifan lokal, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas satuan lembaga pendidikan dalam mencapai *outcome* pembelajaran yang adaptif dan inklusif sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, perkembangan kurikulum dan manajemen kurikulum merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

## **B. Pengertian dan Konsep Kurikulum**

Kurikulum merupakan salah satu komponen strategis dalam sistem pendidikan yang memuat pembahasan mengenai struktur, unsur, dan fungsi kurikulum, termasuk di dalamnya tujuan, materi pembelajaran, strategi pengajaran, serta evaluasi. Esensi kurikulum mencerminkan konsep dan

---

<sup>68</sup> H. A. Zaki Mubarak, *Desain Kurikulum Merdeka untuk Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 45.

<sup>69</sup> Muh Darwis, Jamaluddin, dan Nasir, "Curriculum Reform in Indonesia: A Literature Review on Educational Policy Dynamics, Vocational Relevance, and Digital Inequality," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 15, no. 1 (2025): 52–62.

arah pengembangannya, sekaligus menjadi landasan dalam proses pelaksanaannya.<sup>70</sup> Dengan demikian, kurikulum memegang peranan penting dalam dunia pendidikan karena berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan suatu negara.

Hutchins dalam Nasution dan Haris menjelaskan bahwa konsep kurikulum dalam dunia pendidikan dipahami sebagai sejumlah mata pelajaran yang berorientasi pada isi serta materi pembelajaran.<sup>71</sup> Sementara itu, di Indonesia pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19, yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>72</sup>

Menurut Richards, kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam pendidikan karena berfokus pada upaya peningkatan mutu pengajaran. Hal tersebut dilakukan melalui proses yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengembangan, penelitian, hingga penerapan seluruh aspek yang berkaitan dengan kurikulum.<sup>73</sup>

Terdapat tiga konsep kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Menurut Sukmadinata (2012), kurikulum sebagai substansi merupakan dokumen yang memuat rumusan tujuan, materi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi. Kurikulum sebagai sistem mencakup susunan personalia dan prosedur kerja yang mengatur proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyempurnaan kurikulum. Adapun kurikulum sebagai bidang studi

---

<sup>70</sup> Mubarak, A. A., Aminah, S., Sukamto, S., Suherman, D., & Berlian, U. C. (2021). Landasan pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), 103–125. <https://doi.org/10.47467/jdi.v3i2.324>

<sup>71</sup> Nasution, Abdul Haris., Tanjung, Kurikulum Dan Pembelajaran Sejarah.

<sup>72</sup> Maimuna Ritonga, "Politics and Policy Dynamics of Changing the Education Curriculum in Indonesia until the Reformation Period," *Bina Gogik* 5, no. 2 (2018): 1–15.

<sup>73</sup> Feni Setiawati, "Dampak Kebijakan Perkembangan Kurikulum Terhadap Pembelajaran Di Sekolah," *Nizamul 'Ilmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)* 07 (2022).

merujuk pada kajian ilmiah tentang kurikulum itu sendiri, yang bertujuan mengembangkan ilmu dan sistem kurikulum.

Dengan demikian, kurikulum dapat dipahami sebagai keseluruhan program atau rencana yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai serta norma masyarakat tempat ia hidup. Pelaksanaan kurikulum dilakukan secara sistematis, diawali dengan studi kelayakan dan analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan tahap perencanaan, pengembangan rencana operasional, uji coba, *monitoring*, dan evaluasi, serta diakhiri dengan penyesuaian dan penyempurnaan.<sup>74</sup>

Menurut pandangan Soedijarto dalam memaknai kurikulum sebagai seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait. Sementara itu, Suryobroto memandang kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas.

Nurgiantoro melihat kurikulum sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan, dengan menegaskan bahwa kurikulum dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Di sisi lain, Nasution mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rancangan yang disusun guna mendukung kelancaran proses pembelajaran, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab sekolah beserta para pendidik.

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan dinamika kebutuhan masyarakat, konsep kurikulum juga terus mengalami perkembangan. Beragam pandangan yang muncul pada ranah teoretis menunjukkan bahwa kurikulum tidak lagi dipahami secara sempit,

---

<sup>74</sup> Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perkembangan Kurikulum Terhadap Pembelajaran Di Sekolah. *Nizamul Ilmi* , 7 (1), 1-17.

melainkan secara lebih komprehensif. Perbedaan sudut pandang tersebut kerap menimbulkan tantangan dalam merumuskan definisi yang dapat mengakomodasi seluruh pemikiran para ahli.

Pada dasarnya, konsep kurikulum dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama berikut:

1. Kurikulum sebagai dokumen atau rencana tertulis

Kurikulum sebagai seperangkat perencanaan yang berisi tujuan pendidikan, materi pembelajaran, strategi atau kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, serta sistem evaluasi yang menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan.

2. Kurikulum sebagai suatu sistem

Kurikulum mencerminkan suatu mekanisme kerja yang melibatkan struktur organisasi, sumber daya manusia, serta prosedur yang mengatur proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan

3. Kurikulum sebagai bidang studi

Merupakan kajian khusus yang mempelajari dan mengembangkan ilmu tentang kurikulum serta sistem kurikulum itu sendiri.

### **C. Fungsi dan Peranan Kurikulum**

Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Apabila dirancang secara matang dan sistematis, kurikulum akan mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar serta membantu tercapainya tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, peserta didik memperoleh berbagai pengalaman dan manfaat yang menunjang perkembangan mereka. Menurut McNeil (1990), isi kurikulum memiliki empat fungsi pokok, yaitu sebagai sarana pendidikan umum, penambahan wawasan pengetahuan, eksplorasi minat dan potensi, serta pengembangan keahlian khusus.

Selain itu, kurikulum juga menjalankan beberapa fungsi utama dalam dunia pendidikan, antara lain:

1. Fungsi Pengembangan Kemampuan Berpikir

Kurikulum membantu peserta didik mengasah kemampuan berpikir kritis serta keterampilan dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.

2. Fungsi Aktualisasi Diri

Kurikulum memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengenali jati dirinya serta berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki.

3. Fungsi Rekonstruksi Sosial

Kurikulum membekali peserta didik dengan kemampuan untuk beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus berkontribusi secara kreatif dan inovatif dalam menciptakan perkembangan yang positif.

4. Fungsi Program Akademik

Kurikulum menjadi kerangka pembelajaran yang terstruktur dan terencana, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zamannya.

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pendidik dan guru. Dengan adanya kurikulum, guru dapat memantau serta mengevaluasi perkembangan peserta didik dalam memahami ilmu dan pengalaman belajar yang telah diberikan.

Secara umum, terdapat tiga peranan utama kurikulum, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan konservatif

Peran ini menempatkan kurikulum sebagai sarana pewarisan nilai dan budaya masa lalu yang masih relevan dengan kehidupan saat ini. Melalui peranan ini, pendidikan mentransmisikan warisan budaya kepada generasi muda. Hal tersebut sejalan dengan hakikat pendidikan

sebagai proses sosial yang bertujuan membentuk perilaku peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat secara baik.

## 2. Peranan kreatif

Kurikulum juga berfungsi mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Peran ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya, memperoleh pengetahuan baru, serta membangun pola pikir yang adaptif dan inovatif guna menghadapi tantangan kehidupan.

## 3. Peranan kritis dan evaluative

Dalam peran ini, sekolah perlu menyeleksi nilai dan budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik dengan menyesuakannya terhadap perkembangan zaman. Kurikulum berfungsi sebagai alat kontrol dan penyaring sosial, sehingga nilai-nilai yang tidak lagi sesuai dapat diperbaiki, dimodifikasi, atau bahkan dihilangkan agar selaras dengan tuntutan masa kini dan masa depan.

Ketiga peranan tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis. Mengingat lingkungan sosial terus mengalami perkembangan, setiap individu perlu memiliki kemampuan beradaptasi secara dinamis. Dengan demikian, kurikulum menjadi instrumen pendidikan yang bersifat *well-adjusted*, yakni mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

### **D. Perkembangan Kurikulum dalam Pendidikan di Indonesia**

Kurikulum harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan sarana pendukung lainnya. Perkembangan kurikulum dapat terjadi secara perlahan, mendasar, atau melalui perkembangan zaman. Kurikulum harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan masyarakat. Selain itu, kurikulum perlu disesuaikan dengan komponen-komponen lain yang mendukung dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam penerapannya di lembaga pendidikan, perkembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis dan tidak dapat dilaksanakan

tanpa panduan atau arahan yang jelas. Meskipun transformasi dan inovasi dalam kurikulum pendidikan telah lebih dipahami, namun perkembangan kurikulum mencakup lebih dari sekadar menghasilkan konsep atau ide baru. Perkembangan kurikulum tidak hanya bertujuan menanggapi perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja, tetapi juga membangun pendidikan yang lebih holistik, mempersiapkan siswa secara akademis, emosional, sosial, dan etis. Oleh karena itu, inovasi dalam kurikulum memainkan peran penting dalam menciptakan pendidikan masa depan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan global.<sup>75</sup>

Berdasarkan disertasi dari Anggi Rivana berjudul *Transformasi Pendidikan Nasionalisme - Perbandingan Kurikulum 1994 Hingga 2024 dalam Menumbuhkan Cinta Tanah Air Di Sekolah Dasar (Studi Historis atas Perkembangan Kurikulum dan Implikasinya terhadap Pendidikan Nasionalisme)* bahwa perkembangan kurikulum merupakan proses transformasi yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara sistematis. Kurikulum harus bersifat dinamis untuk menjawab perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK) dan perkembangan kebutuhan masyarakat agar tidak kehilangan relevansinya sebagai seperangkat rencana pembelajaran. Perkembangan dilakukan untuk memperkuat dan memastikan karakter nasionalisme siswa tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Kurikulum lama seringkali dianggap tidak lagi mampu menjawab tantangan masa depan, sehingga diperlukan inovasi dalam kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berorientasi pada masa depan.<sup>76</sup>

Maka dari diskursus penelitian dari Muh. Darwis dkk. tentang *Curriculum Reform in Indonesia: A Literature Review on Educational Policy Dynamics, Vocational Relevance, and Digital Inequality*

---

<sup>75</sup> Indra Wahyuni Firlu Fangestu et al., "Perkembangan dan Inovasi Kurikulum Pendidikan di Berbagai Negara," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 6, no. 1 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.21154/sajiem.v6i1.357>.

<sup>76</sup> "Program Doktorat Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," n.d.

menunjukkan bahwa reformasi pendidikan dapat ditandai dengan terjadinya perkembangan kurikulum yang sebagai manifestasi dari evolusi sistemik yang bertujuan menyesuaikan dengan paradigma pendidikan dengan tuntutan zaman. Perkembangan kurikulum tidak hanya sekadar pergantian dokumen formal, melainkan sebuah upaya rekayasa strategis untuk menghadirkan ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.<sup>77</sup> Dengan demikian, reformasi kurikulum di Indonesia hanya akan berhasil jika dibangun di atas kapasitas guru yang kuat, sistem yang adaptif, dan kebijakan yang mengenali realitas lokal sebagai fondasi perkembangan.

Transformasi kurikulum di Indonesia mencerminkan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam tinjauan sejarah mencatat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami revisi berulang kali, perkembangan kurikulum terjadi sebanyak 11 kali dimulai sejak tahun 1947 hingga melalui berbagai masa pemerintahan dengan kebijakan dan karakter yang berbeda sebagai bentuk deskripsi bahwa kurikulum merupakan jantung pendidikan yang mampu mengarahkan para pemangku kebijakan, tenaga pendidik, dan peserta didik.<sup>78</sup> Oleh karena itu, pengembangan kurikulum sebagai bentuk respon atas kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang mesti diselaraskan sehingga menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi generasi suatu bangsa yang tangguh dalam menghadapi tantangan di era disrupsi.

Berdasarkan penelitian oleh Maulidah Hasnah Anas dkk. mengenai "Analisis Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional di Indonesia dari

---

<sup>77</sup> Muh Darwis, Jamaluddin, dan Nasir, "Curriculum Reform in Indonesia: A Literature Review on Educational Policy Dynamics, Vocational Relevance, and Digital Inequality," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik* 15, no. 1 (2025): 52–62.

<sup>78</sup> Eka Paramita et al., "Transformasi Perkembangan Kurikulum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (Januari 2025): 169–84, <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.976>.

Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka: Studi Literatur", merangkum perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut.<sup>79</sup>

No.	Kurikulum	Tahun	Tujuan	Karakteristik
1.	Rencana Pelajaran 1947	1947	Pendidikan karakter dan kesadaran berbangsa	Lebih menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat ketimbang pendidikan pikiran. Istilah "leer plan" (Belanda) masih digunakan.
2.	Rencana Pelajaran Terurai 1952	1952	Menyempurnakan sistem pendidikan nasional	Setiap mata pelajaran diperiksa secara mendalam (terperinci). Guru fokus mengajar satu mata pelajaran untuk menjadi ahli di bidangnya
3.	Rencana Pendidikan 1964	1964	Pengetahuan praktis dan fungsional	Pembelajaran difokuskan pada program Pancawardhana (pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral). Materi dikelompokkan ke dalam lima bidang studi
4.	Kurikulum 1968	1968	Membentuk manusia Pancasila sejati	Menekankan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dikenal sebagai kurikulum "bulat" karena hanya memuat mata pelajaran pokok
5.	Kurikulum 1975	1975	(Tidak dibahas rinci dalam artikel)	(Tidak dibahas rinci dalam artikel)
6.	Kurikulum 1984	1984	Keaktifan siswa dalam belajar	Mengusung pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pembelajaran lebih interaktif, menggunakan alat peraga, dan menekankan pemahaman konsep

<sup>79</sup> Maulidah Hasnah Anas et al., "Analisis Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional di Indonesia dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka : Studi Literatur," *Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 1 Februari 2025* 14, no. 1 (2025): 1259–72.

7.	Kurikulum 1994 & Suplemen 1999	1994 & 1999	Pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal	Pembagian pembelajaran dalam sistem caturwulan, materi padat, dan memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Suplemen 1999 hanya menambah materi tanpa mengubah struktur int
8.	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004	2004	Pencapaian kompetensi siswa	Menekankan ketercapaian kemampuan siswa (individual/klasikal), keberagaman hasil belajar, dan penggunaan berbagai metode serta sumber belajar
9.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006	2006	Desentralisasi pengembangan kurikulum	Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi, sementara sekolah dan guru mengembangkannya menjadi silabus yang sesuai dengan konteks lokal
10.	Kurikulum 2013 (K-13)	2013	Pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang	Siswa didorong untuk aktif mencari, memproses, dan membangun pengetahuan. Menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik) dan penilaian autentik.
11.	Kurikulum Merdeka	2022	Pengembangan kompetensi dasar dan keterampilan abad ke-21.	Memberikan "kemerdekaan" bagi guru dan sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Berfokus pada pengembangan Profil Pelajar Pancasila serta keterampilan seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kolaborasi

Jadi, perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan upaya dalam merespon perkembangan zaman dan menjawab tantangan untuk mengisi kekurangan atau kelamahan dari kurikulum sebelumnya. Dengan demikian perkembangan kurikulum bukanlah kegagalan dalam setiap

periode pendidikan, melainkan bukti bahwa sistem pendidikan berusaha untuk tetap relevan. Tantangannya bukan pada perkembangannya itu sendiri, melainkan pada bagaimana memastikan kesiapan pelaksana di lapangan tenaga pendidik (guru dan infrastruktur) agar tujuannya dapat tercapai.

#### **E. Implikasinya Manajemen Kurikulum dalam Dunia Pendidikan**

Manajemen kurikulum berimplikasi secara fundamental terhadap kualitas pendidikan, secara langsung meningkatkan hasil belajar siswa dan efektivitas sistem pendidikan di sekolah. Implikasi tersebut ditunjukkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh Elsa Sabrina dkk., 2022 mengidentifikasi manajemen kurikulum sebagai penentu utama yang menunjang kegiatan sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>80</sup> Sedangkan Ira Wirtati dkk., 2025 manajemen kurikulum sebagai komponen vital yang menentukan kualitas pendidikan di sekolah yang mencakup perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan.<sup>81</sup> Pada penelitian oleh Sofiatu Sobriyah dkk., 2024 menegaskan bahwa manajemen kurikulum memiliki implikasi yang positif dalam meningkatkan interaksi proses belajar mengajar dan mendukung pencapaian visi institusional.<sup>82</sup>

Berdasarkan temuan penelitian dari Tesis oleh Imam Syafi'i tentang "Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Mbiamanatul Ummah Pacet Mojokerto", bahwa manajemen kurikulum yang efektif dalam dunia pendidikan merupakan suatu sistem terpadu yang mencakup empat fungsi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

---

<sup>80</sup> Elsa Sabrina, Muhammad Giatman, dan Ernawati Ernawati, "Development of curriculum management in the world of education," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 10 (2022): 4691–96, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1741>.

<sup>81</sup> Ira Wirtati et al., "Curriculum Management as a Foundation for Effective Schools," *EDUTECH : Journal of Education And Technology* 8, no. 2 (Maret 2025): 285–98, <https://doi.org/10.29062/edu.v8i3.1101>.

<sup>82</sup> Sofiatu Sobriyah, "Konsep Fundamental Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Kualitas Program Pendidikan," *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 114–32, <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1016>.

pengawasan. Dalam implikasinya dari setiap fungsi manajemen kurikulum sebagai berikut:

1. Perencanaan kurikulum yang matang, yang meliputi dengan tahap perencanaan dalam kurikulum yang tepat, maka dapat merumuskan tujuan pendidikan yang jelas, penentuan struktur kurikulum yang sistematis, serta penyediaan bahan ajar yang memadai yang menjadi fondasi pembelajaran yang efektif.
2. Pengorganisasian yang baik tercermin dari adanya struktur divisi kurikulum yang jelas dan pembagian tugas mengajar yang proporsional, sehingga setiap sumber daya manusia memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi.
3. Pada tahap pelaksanaan, sinergi antara perencanaan pembelajaran yang matang, menciptakan pelaksanaan proses belajar-mengajar yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci, yang didukung pula oleh program pengembangan kompetensi guru serta seleksi peserta didik yang tepat.
4. Terakhir, pengawasan yang dilakukan secara konsisten, baik melalui mekanisme formal (rapat terstruktur) maupun pendekatan informal (supervisi tidak langsung), memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.<sup>83</sup>

Dengan demikian, implikasi utama dari temuan ini adalah keberhasilan peningkatan mutu lulusan yang dapat diindikasikan melalui pencapaian prestasi dan kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya sangat bergantung pada bagaimana keempat fungsi manajemen kurikulum tersebut dijalankan secara simultan, terintegrasi, dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan di lembaga pendidikan.

Sedangkan berdasarkan temuan penelitian dari disertasi oleh Muhlil Musolin tentang “Manajemen Kurikulum Integratif dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah (Mts) An-Nawawi Berjan

---

<sup>83</sup> Imam Syafi'i, “Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Lulusan MBI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto” (Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2024).

Purworejo”, bahwa implikasi manajemen kurikulum integratif dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis dan berkelanjutan.

1. Perencanaan kurikulum integratif berperan dalam memastikan terpenuhinya standar nasional pendidikan melalui penyusunan program-program kurikulum yang terstruktur.
2. Pengorganisasian berperan dalam memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar pengelolaan dengan mengacu pada landasan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta tata kelola kurikulum yang akuntabel.
3. Pelaksanaan kurikulum integratif yang efektif berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator mutu pada aspek proses pembelajaran, sekaligus memastikan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian dapat diimplementasikan secara nyata di kelas oleh guru dalam pembelajaran yang bermutu.
4. Evaluasi kurikulum integratif berperan mengukur ketercapaian indikator mutu pada aspek output, sehingga berimplikasi dalam prestasi akademik dan non-akademik peserta didik, sehingga standar penilaian dalam standar nasional pendidikan dapat terpenuhi secara optimal.<sup>84</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa manajemen kurikulum integratif yang menjalankan keempat fungsi manajemen secara terpadu dan berorientasi pada pencapaian standar nasional pendidikan dan menjadi instrumen strategis untuk menjamin serta meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh, baik dari aspek input, proses, maupun output pendidikan.

Menurut Prof. Dr. Oemar Hamalik dalam karyanya “Manajemen Pengembangan Kurikulum”, efektivitas manajemen kurikulum berimplikasi langsung pada sinkronisasi antara standar nasional dengan kebutuhan lokal,

---

<sup>84</sup> Muhlil Musolin, “Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah ( MTs ) An-Nawawi Berjan Purworejo Program Doktor Studi Islam Pascasarjana” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

di mana kapasitas manajerial kepala sekolah dan profesionalisme guru menjadi variabel penentu utama (*determinant factor*) dalam keberhasilan adopsi inovasi pendidikan. Berikut adalah beberapa implikasi manajemen kurikulum yang dikutip dari beberapa buku oleh ahli, sebagai berikut:

1. Standardisasi dan penjaminan mutu, karena dengan adanya manajemen kurikulum dapat memastikan adanya tolok ukur yang jelas dalam pencapaian kompetensi siswa, sehingga kualitas pendidikan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara publik (*accountability*).<sup>85</sup>
2. Penguatan kompetensi profesionalisme guru, menuntut guru tidak hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi sebagai pengembang kurikulum di tingkat kelas yang memiliki otonomi untuk melakukan adaptasi kontekstual.<sup>86</sup>
3. Relevansi lulusan dengan kebutuhan zaman yang responsif dan memungkinkan kurikulum terus diperbarui guna menjawab tantangan disrupti teknologi dan kebutuhan pasar kerja.<sup>87</sup>
4. Pemerataan keadilan pendidikan dengan manajemen kurikulum yang inklusif memastikan bahwa desain kurikulum dapat diakses dan diadaptasi bagi siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam (akomodasi keberagaman).<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> H. Maswardi M. Amin dan Yuliananingsih M., “Manajemen Mutu; Aplikasi dalam Bidang Pendidikan” (Jakarta: Media Akademi, 2016).

<sup>86</sup> Hasan Baharun, “Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik,” ed. oleh Dr Zamroni, *Range Management and Agroforestry* 4, no. 1 (2018): 1–15.

<sup>87</sup> H. A. Zaki Mubarak, “DESAIN KURIKULUM MERDEKA UNTUK ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0,” n.d.

<sup>88</sup> Mumpuniarti Dinar Westri, Ayu Rahayu, Asri Budiningsih, “Pengembangan kurikulum dan implementasi pembelajaran inklusi Sekolah Dasar,” 2020, 136.

# **BAB III**

## **ALIRAN DAN TEORI PENDIDIKAN DAN IMPLIKASINYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN**

## A. Pendahuluan

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan hidup manusia. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan terdidik demi mencapai tujuan pendidikan Nasional. Dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta proses bagaimana interaksi tersebut berlangsung.<sup>89</sup> Dalam praktiknya, pendidikan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu dilandasi oleh pemikiran filosofis tertentu yang melahirkan berbagai aliran dan teori pendidikan.

Berbagai pemikiran pendidikan yang muncul dalam masyarakat bersamaan dengan dinamika perkembangannya membawa perubahan yang selanjutnya dikenal dengan aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan tersebut, muncul sejak manusia hidup dalam satu kelompok yang dihadapkan dengan problem regenerasi bagi keturunannya. Secara historis bahwa aliran-aliran pendidikan ataupun berbagai pemikiran tentang pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Setiap aliran pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki martabat manusia tentu saja dalam setiap aliran pendidikan memiliki muatan agar pada setiap keturunan sebagai wujud generasi berikutnya mendapatkan pemaknaan pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan yang dirasakan oleh para orang tua mereka sebelumnya.<sup>90</sup>

Aliran klasik menekankan bakat bawaan atau pengalaman lingkungan, sementara teori modern seperti konstruktivisme mendorong siswa membangun pengetahuan secara aktif. Namun, di pendidikan Islam, integrasi aliran ini sering kali belum optimal, menyebabkan

---

<sup>89</sup> Aliran-aliran Filsafat Pendidikan, "ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN DAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Mukh Nursikin Abstrak" I, no. 2 (2016): 303–34, <https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v1i2.303-334>.

<sup>90</sup> H Syahroni Ma and Hinggil Permana, "Analisis Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Pendidikan Islam" 9, no. 1 (2022): 29–34.

ketimpangan antara teori dan praktiknya.<sup>91</sup> Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan disampaikan, namun juga membantu memahami peran filsafat dalam membentuk sistem pendidikan.

Oleh karena itu, kajian mengenai aliran dan teori pendidikan serta implikasinya dalam dunia pendidikan menjadi penting untuk dilakukan. Pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aliran dan teori pendidikan akan membantu pendidik, mahasiswa, dan pengelola lembaga pendidikan dalam merancang proses pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman.

## **B. Konsep Dasar Aliran Pendidikan**

### **1. Pengertian Aliran Pendidikan**

Dalam konteks filsafat pendidikan islam, aliran merujuk pada pandangan atau pendekatan tertentu yang memiliki landasan pemikiran, prinsip, dan metode yang khas dalam memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan pendidikan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Aliran ini muncul sebagai respons terhadap beragam tantangan, kebutuhan, dan dinamika dalam dunia pendidikan, baik dari segi teologi, budaya, maupun perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>92</sup>

Aliran pendidikan merujuk pada arus pemikiran filosofis atau ideologis yang memberikan landasan bagi tujuan, metode, dan struktur pendidikan formal, termasuk sistem sekolah. Dalam konteks sebelumnya, aliran ini mencakup pandangan seperti tradisionalisme

---

<sup>91</sup> Falikhah Ramdani et al., "Aliran-Aliran Dalam Pendidikan : Perspektif Filsafat" 30 (2024): 189–95.

<sup>92</sup> Nurul Ilmi, Muh Akbar, and M Amin, "Aliran-Aliran Dalam Filsafat Pendidikan Islam Schools Of Thought In Islamic Educational Philosophy," 2026, 747–55.

yang menekankan pewarisan pengetahuan klasik dan progresivisme yang berfokus pada pengalaman siswa.<sup>93</sup>

## 2. Peran Aliran Pendidikan dalam Membentuk Sistem Sekolah

Aliran pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk sistem sekolah melalui pengaruhnya terhadap tujuan, kurikulum, metode pengajaran, dan struktur organisasi pendidikan formal. Berbagai aliran seperti aliran-aliran klasik dan teori-teori modern yang menentukan bagaimana sekolah dirancang untuk mengembangkan peserta didik.<sup>94</sup> Setiap aliran pendidikan menawarkan perspektif yang unik dalam proses belajar mengajar, dan pandangan ini secara langsung memengaruhi metode serta tujuan pendidikan di berbagai belahan dunia.

Aliran pendidikan tidak hanya berperan sebagai fondasi teoretis, tetapi juga memberikan arah yang jelas terhadap bagaimana proses pembelajaran seharusnya dirancang dan dijalankan. Setiap aliran pendidikan membawa konsekuensi praktis yang memengaruhi berbagai aspek pembelajaran, mulai dari perumusan tujuan, pemilihan metode, peran guru dan siswa, hingga bentuk evaluasi yaitu.<sup>95</sup>

Oleh karena itu, aliran pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk arah, tujuan, isi kurikulum, metode pembelajaran, hingga peran guru dan peserta didik dalam sistem sekolah. Setiap aliran membawa pandangan filosofis yang berbeda tentang hakikat manusia, belajar, dan tujuan pendidikan.

---

<sup>93</sup> Wafiq Zahira Mardatilah, Rivo Kurnia Ilahi, and Rahmi Putri, "Aliran Aliran Dalam Pendidikan" 3 (2025).

<sup>94</sup> Mardatilah, Ilahi, and Putri.

<sup>95</sup> Rianti Rahmadania et al., "Kajian Teoritis Tentang Filsafat Pendidikan Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran" 7, no. 05 (2025): 691–99.

### C. Aliran-Aliran Klasik dalam Pendidikan

#### 1. Nativisme (Fokus pada bakat bawaan)

Kata nativisme berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti terlahir.<sup>96</sup> Dalam ilmu kebahasaan aliran nativis, Douglas Brow mengungkapkan bahwa istilah nativis diambil dari pernyataan dasar bahwa pemerolehan bahasa sudah ditentukan dari sananya, bahwa kita lahir dengan kapasitas genetik yang memengaruhi kemampuan kita memahami bahasa di sekitar kita, yang hasilnya adalah sebuah konstruksi sistem bahasa yang tertanam dalam diri manusia.<sup>97</sup>

Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang di-bawa sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat, jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri.<sup>98</sup>

Jadi, menurut aliran ini, pengetahuan seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh pembawaan lahir dan gen yang diturunkan oleh kedua orang tua. Lingkungan Pendidikan maupun lingkungan sekitar yang telah direkayasa tidak akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang pengetahuan manusia sehingga Pendidikan yang diberikan harus berdasarkan bakat dan pembawaan anak itu sendiri.

---

<sup>96</sup> Idris, Zahara. Dasar-dasar Kependidikan. Padang: Angkasa Raya Padang. 1987. Hlm 31.

<sup>97</sup> H. Douglas Brown, *Principles of Language Learning and Teaching*, 5th ed. (White Plains, NY: Pearson Longman, 2008), 30.

<sup>98</sup> Ma and Permana, "Analisis Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Pendidikan Islam."

## 2. Empirisme (Fokus pada lingkungan/pengalaman)

Kata empirisme berasal dari bahasa latin *empericus* yang memiliki arti pengalaman.<sup>99</sup> Kemudian, John Lock seorang filsuf dari Inggris berpandangan bahwa empirisme, adalah aliran atau paham yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman (empiri) yang masuk melalui indra.<sup>100</sup> Selain itu, John Lock mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulisi, atau lebih dikenal dengan istilah teori tabulara (a sheet of white paper avoid of all characters). Menurut aliran ini anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa seperti kertas putih yang polos. Oleh karena itu anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya.

Aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan anak yang dibawa semenjak lahir tidak dianggap penting. Selain itu, Aliran ini juga berpandangan bahwa perkembangan seseorang tergantung seratus persen kepada pengaruh lingkungan atau kepada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya.<sup>101</sup>

Jadi, aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan bersumber utama dari pengalaman yang masuk melalui indera dan pengaruh eksternal dalam kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, sedangkan pembawaan lahir tidaklah dianggap penting sebagai faktor penentu pengetahuan. Segala sesuatu yang tidak masuk atau dirasakan melalui indera, boleh jadi

---

<sup>99</sup> Idris, Zahara. *Dasar-dasar Kependidikan*. Padang: Angkasa Raya Padang. 1987. Hlm 31.

<sup>100</sup> Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, 25.

<sup>101</sup> Ma and Permana, "Analisis Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Pendidikan Islam."

mereka katakan tidak benar-benar ada. Oleh karena itu, aliran ini juga sering dikatakan menolak keberadaan Tuhan dan benda-benda yang bersifat metafisika. Aliran ini juga melahirkan sekularisasi dalam pendidikan.

Tokoh aliran Empirisme adalah John Lock, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632-1704. George Berkeley (1685-1753) dengan bukunya *New Theory of Vision*, David Hume (1711-1776), David Hartley (1705-1757) dan James Mill (1773-1836). Itulah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam aliran empirisme.

### 3. Konvergensi (Perpaduan bakat dan lingkungan)

Konvergensi berasal dari bahasa Inggris dari kata *convergency*, artinya pertemuan pada satu titik. Tokoh aliran Konvergensi adalah William Stem. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871-1939. Aliran Konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran Nativisme dan Empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting.<sup>102</sup>

Jadi, Anak yang mempunyai pembawaan baik kemudian didukung dengan lingkungan Pendidikan yang baik pula maka akan semakin baik begitupun sebaliknya. Dengan demikian, aliran Konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungan. Hanya saja, William Stem tidak menerangkan seberapa besar perbandingan pengaruh kedua faktor tersebut. Sampai sekarang pengaruh dari kedua faktor tersebut belum bisa ditetapkan.

---

<sup>102</sup> Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, 60.

## **D. Teori-Teori Pendidikan Modern**

### **1. Teori Kognitivisme (Proses berpikir)**

Teori kognitif yang dikemukakan oleh Greenwald (1968) dan Petty, Ostrom & Brack (1981) dalam Baron & Byrne (1991) memusatkan perhatiannya pada analisis respons kognitif, yaitu: “Suatu usaha untuk memahami apa yang difikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasive, dan bagaimana fikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap & sejauhmana perubahan itu terjadi”.<sup>103</sup>

Teori kognitif meliputi kegiatan-kegiatan mental yang sadar seperti berfikir, mengetahui, memahami, dan dan kegiatan konsepsi mental seperti: sikap, kepercayaan, dan pengharapan, yang kemudian itu merupakan factor yang menentukan di dalam perilaku. Di dalam teori kognitif ini terdapat suatu interes yang kuat dalam jawaban(response) atas akibat dari perilaku yang tertutup. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan (stimulus), yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi diantara stimulus dan jawaban seseorang terhadap rangsangan tersebut. Atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang.<sup>104</sup> Terdapat tiga pembahasan umum yang terdapat pada teori kognitif. Yaitu:<sup>105</sup>

#### **a. Elemen Kognitif**

Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui (cognition) yang kemudian mamacaknya ke dalam susunan kognitifnya (cognitive

---

<sup>103</sup> Azwar, Saifuddin, Reliabilitas dan Validitas, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1997.

<sup>104</sup> Jurnal Ilmiah and Kanderang Tingang, “Teori Belajar Kognitif Dan Implementasi Dalam Proses Pembelajaran” 11, no. 1 (2020): 209–15.

<sup>105</sup> Ilmiah and Tingang.

structure). Susunan ini menentukan jawaban (response) seseorang.

b. Struktur Kognitif

Menurut teori ini, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu (cognition) tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana kemudian disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penjalinan ini disebut dengan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem ini tergantung akan karakteristik dari stimuli yang diproses dalam kognisi serta pengalaman dari masing-masing individu.

c. Fungsi Kognitif

Sistem kognitif memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengertian, menghasilkan emosi, membentuk sikap, memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku.

2. Teori Konstruktivisme (Membangun pengetahuan sendiri)

Kata konstruktivistik berasal dari akar kata konstruktif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memiliki sifat memperbaiki, membangun, serta membina, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan constructive yang berarti sesuatu yang membangun (the one who builds), dalam istilah psikologi konstruktif berarti membangun ide baru (thoughts that produce new conclusions), dan dalam konteks filsafat Pendidikan, Konstruktivisme diartikan bertujuan untuk menciptakan sistem budaya modern. Teori Konstruktivistik secara istilah adalah suatu teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mutakhir atau baru. Tokoh dari teori tersebut antara lain Vygotsky, Trianto, Sujarwanto, Jean Piaget, John Dewey.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ermis Suryana, Marni Prasyur Aprina, and Kasinyo Harto, 'Teori Konstruktivistik Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran', *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5.7 (2022), 2070–80

Teori konstruktivisme sudah sangat populer di dunia pendidikan. Namun, penting untuk mempelajari teori itu sendiri sebelum mempelajari lebih jauh tentangnya. Konstruktivisme adalah tentang membangun. Konstruktivisme, dalam filsafat pendidikan, didefinisikan sebagai upaya untuk membangun tata susunan hidup yang berbudaya di era modern. Berdasarkan penjelasan di atas, konstruktivisme adalah teori tentang membangun kemampuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab, dengan sifat membangun, diharapkan siswa akan lebih aktif.<sup>107</sup>

Teori konstruktivisme menawarkan landasan filosofis yang kuat untuk transformasi pendidikan, menekankan peran sentral siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam paradigma ini, pembelajaran bukan lagi sekadar proses transfer informasi dari guru ke siswa, melainkan sebuah perjalanan aktif di mana siswa secara mandiri membangun pemahaman mereka sendiri. Guru, dalam hal ini, bertransformasi menjadi fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang merangsang rasa ingin tahu, mendorong kolaborasi, dan menghargai keberagaman perspektif.<sup>108</sup>

### 3. Teori Humanistik (Pengembangan potensi diri dan emosi)

Teori humanistik merupakan salah satu pendekatan penting dalam psikologi pendidikan yang menekankan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Berbeda dengan aliran behaviorisme yang berfokus pada perilaku teramati atau kognitivisme yang menitikberatkan pada proses berpikir, pendekatan humanistik memandang manusia sebagai individu unik yang memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pentingnya aspek emosional, nilai,

---

<sup>107</sup> Basuki Rahmat sinaga, 'Pengaruh Model Pembelajaran Experiential Learning Dengan Media Audiovisual Terhadap Kemampuan Menulis Teks Prosedur Kompleks Pada Siswa Kelas X Sma Negeri 5 Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017', Kode: Jurnal Bahasa, 7.1 (2018), 79–88

<sup>108</sup> Nabiila Tsuroyya Azzahra, "Teori Konstruktivisme Dalam Dunia Pembelajaran" 2, no. 2 (2025): 64–75.

dan makna belajar dalam proses pembelajaran. Humanistik menekankan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik secara intelektual, spiritual, sosial, maupun emosional. Tujuan utama aliran ini adalah membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang utuh, berakhlak, dan memiliki kesadaran sosial.<sup>109</sup>

Secara konseptual, teori humanistik menempatkan manusia sebagai pusat dalam proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses membantu individu menjadi pribadi yang utuh. Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang berkembang dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri sebagai tingkat tertinggi perkembangan manusia.<sup>110</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif harus memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik, termasuk rasa aman, penghargaan, dan kebutuhan akan pengakuan. Tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut, proses belajar sulit mencapai tingkat optimal.

Selain Abraham Maslow, tokoh penting dalam teori humanistik adalah Carl Rogers. Rogers menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan diri individu melalui pengalaman belajar yang bermakna. Ia menyatakan bahwa pembelajaran yang paling signifikan terjadi ketika individu terlibat secara emosional dan memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi potensi dirinya.<sup>111</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa hubungan interpersonal antara guru dan peserta didik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Teori humanistik juga menekankan pentingnya konsep diri (*self-concept*) dalam proses belajar. Rogers menjelaskan bahwa

---

<sup>109</sup> Ilmi, Akbar, and Amin, "Aliran-Aliran Dalam Filsafat Pendidikan Islam Schools Of Thought In Islamic Educational Philosophy."

<sup>110</sup> Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 1987).

<sup>111</sup> Carl R. Rogers, *Freedom to Learn* (Columbus: Merrill, 1994).

individu belajar secara efektif ketika memiliki konsep diri positif dan merasa dihargai dalam lingkungan belajar.<sup>112</sup> Hal ini menunjukkan bahwa iklim kelas yang suportif dan non-otoriter menjadi faktor penting dalam pembelajaran humanistik. Guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang empatik, terbuka, dan menghargai perbedaan individu.

Dalam praktik pendidikan, pendekatan humanistik menempatkan peserta didik sebagai individu yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam belajar. Pembelajaran humanistik mendorong keterlibatan aktif siswa melalui refleksi diri, diskusi, dan pengalaman personal. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia harus memperhatikan dimensi emosional, sosial, dan etika, selain aspek kognitif.<sup>113</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa pendekatan humanistik relevan dengan paradigma pendidikan modern yang menekankan pendidikan holistik.

#### 4. Teori Progresivisme

Teori progresivisme merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat pendidikan modern yang menekankan perubahan, pengalaman belajar, dan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. Progresivisme lahir sebagai respons terhadap pendidikan tradisional yang dianggap terlalu berpusat pada guru dan menekankan hafalan. Dalam perspektif progresivisme, pendidikan dipandang sebagai proses dinamis yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan peserta didik.

Tokoh utama dalam aliran progresivisme adalah John Dewey, yang memandang pendidikan sebagai proses rekonstruksi pengalaman secara berkelanjutan. Dewey menyatakan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman nyata yang

---

<sup>112</sup> Carl R. Rogers, *On Becoming a Person* (Boston: Houghton Mifflin, 1961).

<sup>113</sup> UNESCO, *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* (Paris, 2015).

memungkinkan peserta didik belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan.<sup>114</sup> Konsep ini menekankan bahwa belajar bukan sekadar menerima informasi, tetapi melibatkan aktivitas reflektif yang membangun pemahaman secara mendalam. Dengan demikian, pembelajaran progresivis menempatkan pengalaman sebagai pusat proses belajar.

Salah satu prinsip utama progresivisme adalah *learning by doing*, yaitu belajar melalui praktik langsung. Prinsip ini menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, bukan sekadar penjelasan verbal. Dalam pendekatan ini, peserta didik didorong untuk melakukan eksperimen, memecahkan masalah, dan terlibat dalam kegiatan yang bermakna.<sup>115</sup> Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai pendekatan pembelajaran modern seperti *project-based learning* dan *inquiry learning*.

Dalam praktik pendidikan modern, pengaruh progresivisme terlihat pada berbagai pendekatan pembelajaran inovatif. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran kontekstual merupakan bentuk implementasi nilai-nilai progresivisme. UNESCO menekankan bahwa pendidikan abad ke-21 perlu mendorong pembelajaran aktif, reflektif, dan berbasis pengalaman untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan global.<sup>116</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa progresivisme tetap relevan dalam konteks pendidikan kontemporer.

Selain menekankan pengalaman, progresivisme juga berorientasi pada peserta didik (*student-centered education*). Peserta didik dipandang sebagai individu aktif yang memiliki minat, kebutuhan, dan potensi berbeda. Oleh karena itu, kurikulum dan pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.

---

<sup>114</sup> John Dewey, *Experience and Education* (New York: Macmillan, 1938).

<sup>115</sup> Vicki Hargraves, 'Dewey's Educational Philosophy', *The Education Hub*, 2021.

<sup>116</sup> UNESCO.

Schiro menjelaskan bahwa dalam paradigma progresivisme, peserta didik menjadi pusat kurikulum, sementara guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran.<sup>117</sup> Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari teacher-centered menuju student-centered learning.

## E. Identifikasi Aliran dan Teori dalam Kurikulum di Indonesia

### 1. Implementasi Teori pada Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka di Indonesia secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip aliran progresivisme dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sebagaimana tercermin dalam diferensiasi pembelajaran dan kebebasan guru untuk mengontekstualisasikan materi ajar.<sup>118</sup> Hal ini menunjukkan bahwa progresivisme tidak hanya mereformasi struktur kurikulum, tetapi juga membentuk ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap keberagaman siswa, sehingga meningkatkan relevansi pendidikan dengan dinamika sosial kontemporer.

Salah satu implementasi utama progresivisme terlihat pada penerapan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL), yang mendorong siswa mengembangkan kreativitas melalui pengalaman langsung. "Kurikulum Merdeka selaras dengan gagasan progresivisme melalui penekanan pada diferensiasi pembelajaran, kebebasan guru dalam mengembangkan perangkat ajar, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai orientasi utama pendidikan"<sup>119</sup>.

William Heard Kilpatrick menekankan pentingnya metode proyek sebagai sarana utama pembelajaran. Kilpatrick berpendapat bahwa metode proyek memungkinkan peserta didik terlibat secara

---

<sup>117</sup> Michael Stephen Schiro, *Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns* (Boston: Sage, 2013).

<sup>118</sup> Arfin Nugraha and others, 'Penerapan Gagasan Filsafat Progresivisme Pada Kurikulum Merdeka', *Iqro: Jurnal Kajian Sains Pendidikan*, 8, no. 3 (2025).

<sup>119</sup> Nugraha and others.

aktif dalam aktivitas yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka.<sup>120</sup> Analisis ini memperkuat bahwa kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka bukan sekadar inovasi teknis, melainkan refleksi langsung dari tradisi progresivisme klasik yang menekankan pembelajaran berbasis aktivitas nyata.

Kemendikbudristek menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.<sup>121</sup> Kebijakan ini menunjukkan penolakan terhadap pendekatan kurikulum yang seragam dan kaku, yang selama ini dianggap kurang mampu mengakomodasi keragaman potensi peserta didik. Dengan demikian, fleksibilitas kurikulum merupakan manifestasi nyata prinsip progresivisme yang menghargai individualitas siswa.

Dari sisi pedagogis, progresivisme juga tercermin dalam pendekatan diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan metode, konten, dan asesmen berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil siswa. Carol Ann Tomlinson menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi bertujuan memastikan setiap siswa memperoleh kesempatan belajar optimal sesuai kebutuhannya.<sup>122</sup> Analisis ini menunjukkan bahwa diferensiasi dalam Kurikulum Merdeka bukan sekadar strategi teknis, melainkan implementasi konkret nilai progresivisme yang menempatkan siswa sebagai subjek utama pendidikan.

Namun demikian, implementasi progresivisme dalam Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan struktural dan kultural, terutama kesiapan guru dalam mengadopsi paradigma baru

---

<sup>120</sup> William Heard Kilpatrick, *The Project Method: The Use Of The Purposeful Act In The Educative Process* (Montana: Kessinger Publishing, 2010).

<sup>121</sup> Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, *Kajian Akademik Kurikulum Merdeka* (Jakarta, 2024).

<sup>122</sup> Carol Ann Tomlinson, *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms* (Alexandria: ASCD, 2014).

pembelajaran serta ketimpangan sumber daya pendidikan. Keterbatasan infrastruktur di berbagai daerah membuat pembelajaran berbasis pengalaman tidak selalu berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan progresivisme tidak hanya bergantung pada desain kurikulum, tetapi juga kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak hanya merupakan inovasi kebijakan, tetapi refleksi adopsi paradigma progresivisme dalam pendidikan Indonesia. Nilai-nilainya terlihat pada pembelajaran berbasis pengalaman, diferensiasi, fleksibilitas kurikulum, dan orientasi pada kompetensi abad ke-21. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru, pemerataan sumber daya, dan perubahan budaya belajar, sehingga memerlukan dukungan sistemik agar implementasinya optimal.

## 2. Implementasi Teori pada Kurikulum 2013 (K13)

Kurikulum 2013 (K13) di Indonesia secara fundamental mengadopsi prinsip konstruktivisme melalui pendekatan saintifik yang menempatkan siswa sebagai pembangun pengetahuan aktif, bukan penerima pasif informasi dari guru.<sup>123</sup> K13 merevolusi paradigma pembelajaran tradisional menjadi proses dinamis, di mana siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya, sehingga meningkatkan retensi dan aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata.

Jejak konstruktivisme paling nyata terlihat pada tahapan pembelajaran saintifik K13, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan, yang mencerminkan konstruksi pengetahuan secara bertahap. "Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 mengandung asumsi-asumsi pembelajaran yang ada dalam teori

---

<sup>123</sup> Hendri Purbo Waseso, 'Kurikulum 2013 Dalam Prespektif Teori Pembelajaran Konstruktivis', *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1, no. 1 (2018).

pembelajaran konstruktivisme, yaitu proses untuk mengubah gagasan/ide siswa yang sudah dimilikinya yang mungkin salah, kemandirian dalam konstruksi pengetahuan, dan pembentukan makna melalui hubungan antarpengertian."<sup>124</sup> Tahapan tersebut mendorong self-regulated learning, di mana siswa bertanggung jawab atas proses belajarnya, meskipun implementasinya sering terhambat oleh kurangnya pelatihan guru di daerah terpencil.

Penerapan penilaian autentik dalam K13 juga mencerminkan paradigma konstruktivis. Penilaian autentik menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh, termasuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Wiggins menyatakan bahwa asesmen autentik dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan pada situasi nyata.<sup>125</sup> Evaluasi dalam K13 tidak lagi berfokus pada tes hafalan semata, tetapi pada kemampuan aplikatif dan kontekstual siswa, yang merupakan ciri khas pendekatan konstruktivis.

Namun demikian, implementasi konstruktivisme dalam K13 menghadapi berbagai tantangan, terutama kompleksitas desain pembelajaran yang menuntut kreativitas dan kompetensi pedagogik tinggi dari guru. Beban administrasi yang besar juga sering mengalihkan fokus guru dari proses pembelajaran ke pemenuhan tuntutan administratif, sehingga nilai-nilai konstruktivisme tidak selalu terimplementasi secara optimal di kelas.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 merupakan manifestasi kuat teori konstruktivisme dalam pendidikan Indonesia, terlihat pada pendekatan ilmiah, pembelajaran tematik integratif, interaksi sosial, dan asesmen autentik. Meskipun menghadapi kendala implementatif, K13 tetap berperan penting dalam menggeser

---

<sup>124</sup> Waseso.

<sup>125</sup> Grant Wiggins, *Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and Improve Student Performance* (San Francisco: Jossey-Bass, 1998).

paradigma pendidikan dari transfer pengetahuan menuju konstruksi makna yang lebih aktif dan reflektif.

### 3. Pengaruh Aliran Nasionalisme dan Relevansi Pemikiran Ki Hajar Dewantara

Selain dipengaruhi oleh aliran pendidikan Barat seperti progresivisme dan konstruktivisme, pendidikan di Indonesia juga memiliki akar filosofis yang kuat dalam aliran nasionalisme. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas bangsa, karakter nasional, dan kesadaran kebudayaan.

Aliran nasionalisme dalam pendidikan Indonesia menekankan pembentukan identitas kebangsaan melalui pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan lokal, sebagaimana terwujud dalam kurikulum nasional yang mengintegrasikan semangat persatuan di tengah keberagaman.<sup>126</sup> Nasionalisme tidak hanya berfungsi sebagai ideologi pengikat bangsa, tetapi juga sebagai fondasi kurikulum yang melindungi generasi muda dari disintegrasi sosial akibat globalisasi, sehingga memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan formal.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi landasan utama dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat.<sup>127</sup> Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki dimensi holistik yang mencakup aspek moral,

---

<sup>126</sup> Habiba tazkia Amalya, 'Peran Pendidikan Terhadap Nasionalisme Dalam Mewujudkan Rasa Cinta Tanah Air Di Indonesia', *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3 (2025).

<sup>127</sup> Ki Hadjar Dewantara, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka I (Pendidikan)* (Yogyakarta: UST Press).

sosial, dan budaya, yang menjadi ciri khas pendekatan nasionalistik dalam pendidikan.

Salah satu konsep paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan: *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*. Konsep ini menggambarkan peran pendidik sebagai teladan, penggerak, dan pemberi dorongan bagi peserta didik.<sup>128</sup> Peran guru dalam pendidikan nasional tidak sekadar sebagai pengajar, tetapi sebagai pembentuk karakter dan pemimpin moral. Dalam konteks kurikulum modern, prinsip ini tetap relevan, terutama dalam pembelajaran yang menekankan keteladanan dan pembentukan nilai.

Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terlihat dalam implementasi kurikulum kontemporer, termasuk Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Konsep merdeka belajar secara filosofis memiliki keterkaitan erat dengan gagasan kemerdekaan dalam pendidikan yang diperjuangkan Ki Hajar Dewantara. Ia menekankan bahwa pendidikan harus memberi ruang kebebasan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai kodratnya.<sup>129</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan modern di Indonesia tidak sepenuhnya baru, melainkan merupakan reinterpretasi terhadap warisan pemikiran pendidikan nasional.

## **F. Implikasi Aliran dan Teori terhadap Praktik Pendidikan**

### **1. Implikasi terhadap Peran Guru**

Perkembangan aliran dan teori pendidikan modern membawa implikasi signifikan terhadap perubahan peran guru dalam praktik pendidikan. Jika pada paradigma tradisional guru berperan sebagai pusat pengetahuan dan otoritas utama di kelas,

---

<sup>128</sup> Ki Hadjar Dewantara, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka II (Kebudayaan)* (Yogyakarta: UST Press, 2013).

<sup>129</sup> Dewantara, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka I (Pendidikan)*.

maka dalam paradigma pendidikan kontemporer guru dituntut bertransformasi menjadi fasilitator pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator menekankan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa membangun pengetahuan secara mandiri. Hattie menegaskan bahwa efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam merancang pengalaman belajar yang melibatkan partisipasi aktif siswa.<sup>130</sup> Kualitas pembelajaran tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak materi disampaikan guru, tetapi oleh seberapa jauh guru mampu memfasilitasi keterlibatan kognitif siswa. Dengan demikian, guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik yang lebih kompleks dibanding peran instruktif tradisional.

Dalam kebijakan pendidikan Indonesia, transformasi peran guru tercermin dalam implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum tersebut menekankan pembelajaran aktif, diferensiasi, dan asesmen autentik yang menuntut keterlibatan aktif peserta didik. Kemendikbudristek menegaskan bahwa guru berperan sebagai penggerak pembelajaran yang menciptakan suasana belajar partisipatif dan berpusat pada siswa.<sup>131</sup> Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sistemik dari model pembelajaran instruksional menuju model fasilitatif dalam kebijakan pendidikan nasional.

Namun demikian, implementasi peran guru sebagai fasilitator menghadapi berbagai tantangan, terutama kesiapan guru dalam mengadopsi paradigma pembelajaran baru. Banyak guru masih terbiasa dengan pendekatan ceramah, sehingga perubahan menuju peran fasilitatif memerlukan perubahan mindset, keterampilan pedagogik, dan pelatihan berkelanjutan. Tanpa

---

<sup>130</sup> John Hattie, *Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning* (London: Rautledge, 2012).

<sup>131</sup> Kemendikbudristek, *Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Kurikulum Merdeka* (Jakarta, 2022).

dukungan tersebut, transformasi peran guru berpotensi hanya bersifat normatif.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, perubahan peran guru menuju fasilitator tetap menjadi arah utama transformasi pendidikan global karena mendorong pembelajaran yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi holistik.

Dengan demikian, perkembangan aliran dan teori pendidikan mendorong transformasi peran guru dari instruktur menjadi fasilitator. Pergeseran ini didorong oleh tuntutan pendidikan abad ke-21 yang berpusat pada peserta didik dan menjadi langkah strategis menuju pendidikan yang lebih relevan, adaptif, dan humanis.

## 2. Implikasi terhadap Metode Pembelajaran

Aliran progresivisme dan konstruktivisme dalam kurikulum Indonesia mendorong dominasi metode Student-Centered Learning (SCL), di mana siswa menjadi pusat proses pembelajaran melalui aktivitas kolaboratif dan eksplorasi mandiri, sebagaimana diterapkan dalam Kurikulum Merdeka dan K13. Metode SCL terwujud melalui pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PBL) yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam memecahkan masalah nyata, selaras dengan Profil Pelajar Pancasila.

Pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum Merdeka pun menjadi terpusat pada siswa (student oriented), di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kolaboratif.<sup>132</sup> SCL mengubah pembelajaran dari model teacher-centered menjadi dinamis, meningkatkan

---

<sup>132</sup> Yasinta Nur Salsabila, 'Pembelajaran Berpusat Pada Siswa Atau Guru Di Kurikulum Merdeka', *Kompasiana*, 2023.

motivasi intrinsik siswa dan kesiapan menghadapi tantangan abad 21, meskipun memerlukan adaptasi infrastruktur sekolah.

Dalam kebijakan pendidikan Indonesia, implementasi student-centered learning terlihat jelas dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum tersebut menekankan pembelajaran aktif, eksploratif, dan kontekstual. Kemendikbudristek menegaskan bahwa pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi ruang bagi peserta didik agar belajar sesuai minat, kebutuhan, dan tahap perkembangannya.<sup>133</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa student-centered learning telah menjadi prinsip utama dalam transformasi pendidikan nasional.

Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) juga menjadi bagian penting dari student-centered learning. Savery menyatakan bahwa problem-based learning mendorong siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui pemecahan masalah autentik.<sup>134</sup> Metode ini memperkuat pergeseran dari pembelajaran pasif menuju pembelajaran yang menuntut keterlibatan intelektual tinggi. Dalam praktiknya, pendekatan ini relevan dengan tuntutan dunia kerja yang membutuhkan kemampuan adaptif dan analitis.

Namun demikian, implementasi student-centered learning menghadapi berbagai tantangan, terutama kesiapan guru dalam merancang pembelajaran aktif yang lebih kompleks dibanding metode tradisional. Selain itu, budaya belajar yang masih berorientasi hafalan membuat sebagian peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran aktif.

Meskipun demikian, student-centered learning tetap menjadi arah utama reformasi pendidikan global karena mampu menciptakan

---

<sup>133</sup> Kemendikbudristek.

<sup>134</sup> John R. Savery, 'Overview of Problem-Based Learning: : Definitions and Distinctions', *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1, no. 1 (2006).

pembelajaran yang lebih inklusif, adaptif, dan bermakna dengan menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Dengan demikian, perkembangan aliran dan teori pendidikan modern mendorong pergeseran metode pembelajaran menuju student-centered learning. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif, pembelajaran kontekstual, dan pengembangan keterampilan abad ke-21, sehingga tetap menjadi fondasi penting bagi pendidikan yang inovatif dan relevan dengan tuntutan zaman.

### 3. Implikasi terhadap Sistem Evaluasi

Perkembangan aliran dan teori pendidikan modern tidak hanya memengaruhi peran guru dan metode pembelajaran, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap sistem evaluasi pendidikan. Paradigma evaluasi yang sebelumnya didominasi oleh ujian standar berbasis tes kini mulai bergeser menuju asesmen autentik yang menilai proses dan hasil belajar secara lebih holistik.

Secara konseptual, asesmen autentik berangkat dari pandangan bahwa evaluasi harus mencerminkan kemampuan nyata peserta didik dalam konteks kehidupan. Mueller mendefinisikan asesmen autentik sebagai penilaian yang mengharuskan siswa menunjukkan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata atau mendekati nyata.<sup>135</sup> Evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur penguasaan materi, tetapi juga kemampuan transfer pengetahuan. Asesmen autentik selaras dengan paradigma pembelajaran konstruktivis yang menekankan aplikasi dan refleksi.

Dalam konteks pendidikan modern, tuntutan pengembangan kompetensi abad ke-21 mendorong perubahan pendekatan evaluasi. UNESCO menekankan bahwa sistem penilaian harus mampu mengukur keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan

---

<sup>135</sup> Jon Mueller, 'Authentic Assessment Toolbox: Enhancing Student Learning through Online Faculty Development', *Merlot: Journal of Online Learning and Teaching*, 1, no. 1 (2005).

adaptif yang relevan dengan masa depan.<sup>136</sup> Pandangan ini memperkuat urgensi transformasi sistem evaluasi agar selaras dengan tujuan pendidikan yang lebih luas. Oleh karena itu, banyak sistem pendidikan mulai mengintegrasikan asesmen formatif, portofolio, proyek, dan penilaian kinerja.

Di Indonesia, pergeseran menuju asesmen autentik mulai terlihat dalam implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum tersebut menekankan penilaian yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kemendikbudristek menegaskan bahwa asesmen dalam Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendukung pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi, bukan sekadar capaian nilai.<sup>137</sup> Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi diposisikan sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, bukan hanya alat seleksi.

Salah satu bentuk implementasi asesmen autentik adalah penggunaan asesmen formatif yang berkelanjutan. Black dan Wiliam menunjukkan bahwa asesmen formatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki proses belajar.<sup>138</sup> Selain asesmen formatif, penggunaan portofolio dan penilaian berbasis proyek juga menjadi karakteristik utama evaluasi autentik. UNESCO menegaskan bahwa asesmen berbasis kinerja, seperti portofolio dan proyek, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompetensi peserta didik karena menilai kemampuan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata.<sup>139</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa asesmen autentik memiliki keunggulan dalam mengukur

---

<sup>136</sup> UNESCO, *Assessment of Transversal Competencies: Current Tools in the Asian Region* (Bangkok, 2019).

<sup>137</sup> Kemendikbudristek.

<sup>138</sup> Paul J. Black and Dylan Wiliam, 'Developing the Theory of Formative Assessment', *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21, no. 1 (2009).

<sup>139</sup> UNESCO.

kompetensi kompleks, termasuk kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi, yang sulit diukur melalui tes tertulis konvensional.

Namun demikian, implementasi asesmen autentik menghadapi berbagai tantangan dalam praktik pendidikan. Kompleksitas pelaksanaan menjadi kendala utama karena membutuhkan waktu, instrumen, dan kompetensi guru yang memadai, terutama dalam kelas besar. Selain itu, budaya evaluasi yang masih berorientasi pada nilai ujian serta faktor kebijakan turut memengaruhi efektivitasnya. Transformasi sistem evaluasi memerlukan sinkronisasi antara kurikulum, kebijakan seleksi, dan sistem akuntabilitas. Tanpa reformasi yang komprehensif, asesmen autentik berisiko menjadi sekadar pelengkap administratif tanpa dampak signifikan terhadap pembelajaran.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pergeseran menuju asesmen autentik tetap menjadi arah utama reformasi evaluasi pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih adil, kontekstual, dan holistik karena menilai proses dan hasil belajar secara terpadu.

Dengan demikian, perkembangan aliran dan teori pendidikan modern mendorong pergeseran sistem evaluasi dari ujian standar menuju asesmen autentik. Transformasi ini didorong oleh kebutuhan menilai kompetensi secara menyeluruh dan tetap menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem evaluasi yang relevan dengan paradigma pendidikan abad ke-21.

# **BAB IV**

## **KOMPONEN KURIKULUM DAN KONEKSINYA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam mencapai tujuan tersebut, kurikulum memegang peranan sentral sebagai instrumen yang menentukan arah, isi, dan hasil dari proses pendidikan.<sup>140</sup> Secara terminologi, kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan erat. Komponen tersebut meliputi tujuan yang ingin dicapai, materi atau isi yang disampaikan, strategi atau metode pembelajaran, serta evaluasi untuk mengukur keberhasilan.<sup>141</sup>

Kurikulum merupakan instrumen krusial dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai peta jalan untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai sebuah sistem, kurikulum tidak berdiri tunggal, melainkan tersusun atas *komponen-komponen fundamental*, ujian, isi, metode, dan evaluasi, yang saling berkelindan. Keberhasilan suatu program pendidikan sangat bergantung pada seberapa harmonis hubungan antar komponen tersebut.

Pentingnya pemahaman terhadap komponen kurikulum terletak pada sifatnya yang sistemik. Pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Para ahli kurikulum, seperti *Ralph Tyler*, menekankan bahwa keterkaitan antara tujuan, pengalaman belajar, dan evaluasi adalah suatu siklus yang tidak terputus.<sup>142</sup> Ketidaksinkronan antara tujuan yang ditetapkan dengan materi yang diberikan, atau antara metode dengan alat evaluasi, akan menyebabkan kegagalan sistemik dalam pendidikan. Oleh

---

<sup>140</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 18.

<sup>141</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 102.

<sup>142</sup> Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 1949), hlm. 1.

karena itu, setiap upaya pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan bagaimana setiap komponen saling mendukung dan menguatkan.

Dalam praktiknya, pengembangan kurikulum sering kali menghadapi tantangan berupa ketimpangan antar komponen. Misalnya, tujuan yang visioner namun tidak didukung oleh materi yang relevan atau metode evaluasi yang tepat. Oleh karena itu, para ahli seperti *Ralph Tyler* dan *Hilda Taba* menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus bersifat sistemik; perubahan pada satu komponen secara otomatis menuntut penyesuaian pada komponen lainnya.

Di Indonesia, dinamika pengembangan kurikulum terus bertransformasi untuk merespons tantangan zaman. Landasan hukum terbaru, yakni Permendikbudristek *Nomor 12 Tahun 2024*, menegaskan pentingnya kurikulum yang fleksibel dan berfokus pada materi esensial.<sup>143</sup> Regulasi ini merupakan turunan dari semangat *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, yang mendefinisikan kurikulum sebagai rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran.<sup>144</sup> Dalam konteks Kurikulum Merdeka, koneksi antar komponen kini lebih ditekankan pada pengembangan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, di mana tujuan pendidikan nasional harus terintegrasi langsung ke dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.

Namun, dalam tataran praktis, masih sering ditemukan pemahaman yang terfragmentasi mengenai komponen-komponen ini. Banyak pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang terjebak pada aspek administratif tanpa memahami hubungan logis antar komponen tersebut. Berdasarkan urgensi tersebut, kajian mengenai komponen kurikulum dan koneksinya

---

<sup>143</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

<sup>144</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 19.

dengan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting untuk dibahas secara mendalam guna memberikan landasan teoretis dan yuridis yang kuat.

## **B. Komponen - Komponen Utama dalam Pengembangan Kurikulum**

Secara terminologi, komponen adalah bagian yang saling bekerja sama sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks pendidikan, komponen kurikulum didefinisikan sebagai elemen-elemen fundamental yang menyusun struktur pendidikan guna mencapai tujuan tertentu. Tanpa komponen yang lengkap, kurikulum tidak akan memiliki landasan yang kuat untuk mengarahkan proses pembelajaran.<sup>145</sup>

Kurikulum dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut para ahli seperti *Ralph Tyler*, terdapat empat hingga lima komponen utama yang harus ada dalam setiap rancangan kurikulum.

### 1. Komponen Tujuan (Objectives)

Komponen ini merupakan "jantung" dari kurikulum karena memberikan arah bagi semua komponen lainnya. Tujuan pendidikan biasanya disusun secara hierarkis:

- a. Tujuan Pendidikan Nasional: Tujuan jangka panjang yang berlandaskan falsafah negara, seperti UUSPN No. 20 Tahun 2003 di Indonesia.
- b. Tujuan Institusional: Tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan tertentu misalnya visi-misi sekolah.
- c. Tujuan Kurikuler: Target kompetensi pada setiap bidang studi atau mata pelajaran.
- d. Tujuan Instruksional: Hasil belajar spesifik yang ingin dicapai dalam satu sesi pembelajaran di kelas.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. (2012). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 102.

<sup>146</sup> Tyler, Ralph W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.

Komponen determinan yang menentukan arah pendidikan. Tujuan mencakup domain kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Dalam struktur kurikulum, tujuan berfungsi sebagai target yang memberikan legitimasi terhadap aktivitas pembelajaran.

Tujuan merupakan pedoman bagi arah pengembangan kurikulum. Menurut *Hilda Taba (1962)*, langkah pertama dalam menyusun kurikulum adalah mendiagnosis kebutuhan yang kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang spesifik. Tujuan ini tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga pembentukan nilai dan sikap yang menjadi standar bagi hasil belajar peserta didik.<sup>147</sup>

## 2. Komponen Isi atau Materi (Content)

Isi kurikulum mencakup segala pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang akan diajarkan kepada peserta didik. Pemilihan materi harus memenuhi kriteria tertentu, seperti:

- a. Signifikansi: Materi harus penting bagi penguasaan suatu disiplin ilmu.
- b. Validitas: Keakuratan informasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.
- c. Kebermanfaatan: Relevansi materi dengan kebutuhan masa depan siswa.<sup>148</sup>

Merupakan substansi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Materi harus dipilih berdasarkan kriteria validitas, tingkat kepentingan, dan kebermaknaan bagi kehidupan siswa. Isi kurikulum mencakup pengetahuan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

---

<sup>147</sup> Taba, Hilda. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt, Brace & World.

<sup>148</sup> Sanjaya, Wina. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Kencana.

Isi kurikulum adalah segala pengalaman belajar yang direncanakan untuk siswa. *Zais (1976)* menjelaskan bahwa isi kurikulum mencakup pengetahuan (fakta, konsep, prinsip), nilai-nilai, dan keterampilan yang dipilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia menekankan bahwa materi harus memiliki kriteria *significance* (kebermaknaan) dan *validity* (kesahihan) agar relevan dengan perkembangan zaman.<sup>149</sup>

### 3. Komponen Strategi Pembelajaran (*Process*)

Strategi atau metode adalah cara yang ditempuh untuk mentransformasikan materi agar dapat diserap oleh peserta didik secara efektif.

- a. Komponen ini mencakup *model pembelajaran* (seperti *Problem Based Learning*), *metode* (ceramah, diskusi, praktikum), serta penggunaan *media pembelajaran* sebagai alat bantu.
- b. Fokus utama strategi modern adalah menciptakan interaksi aktif antara siswa dengan lingkungan belajarnya (*student-centered*).<sup>150</sup>

Merujuk pada proses atau cara materi disampaikan agar tujuan tercapai. Komponen ini mencakup model pembelajaran, media, dan interaksi yang diciptakan di lingkungan belajar. Strategi ini harus bersifat adaptif terhadap karakteristik peserta didik.

Komponen ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengalaman belajar diatur. *Ralph W. Tyler (1949)* menyatakan bahwa strategi pembelajaran menyangkut pemilihan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan perilaku yang disebutkan dalam tujuan. Strategi ini mencakup metode, teknik, dan

---

<sup>149</sup> Zais, Robert S. (1976). *Curriculum: Principles and Foundations*. New York: Harper & Row Publishers.

<sup>150</sup> Hamalik, Oemar. (2014). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

penggunaan sarana penunjang yang memicu interaksi aktif dalam proses edukasi.<sup>151</sup>

#### 4. Komponen Organisasi Kurikulum (Organization)

Organisasi kurikulum mengatur bagaimana isi dan pengalaman belajar disusun agar sistematis. Terdapat dua dimensi utama:

- a. Organisasi Horizontal: Penataan materi antar mata pelajaran pada tingkat kelas yang sama (misalnya: integrasi antara pelajaran Sejarah dan Sosiologi).
- b. Organisasi Vertikal: Pengaturan urutan materi dari yang sederhana ke yang kompleks antar jenjang kelas (sekuens).<sup>152</sup>

Organisasi kurikulum menyangkut pengaturan materi agar memiliki kontinuitas. S. Nasution (2008) berpendapat bahwa organisasi kurikulum menentukan efektivitas pembelajaran. Terdapat pola organisasi kurikulum yang terpisah (*separated subject curriculum*), berkorelasi (*correlated curriculum*), maupun terpadu (*integrated curriculum*) yang bertujuan memudahkan siswa memahami hubungan antarberbagai disiplin ilmu.<sup>153</sup>

#### 5. Komponen Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan sejauh mana efektivitas proses pembelajaran tersebut. Evaluasi formatif dilakukan selama proses berjalan untuk perbaikan langsung. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir periode untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dan efektivitas kurikulum secara keseluruhan. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pengembang kurikulum untuk

---

<sup>151</sup> Tyler, Ralph W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.

<sup>152</sup> Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen*. Jakarta: Kemendikbudristek.

<sup>153</sup> Nasution, S. (2008). *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

melakukan revisi atau penyempurnaan di masa mendatang.<sup>154</sup> Komponen untuk melihat efektivitas sistem kurikulum secara keseluruhan. Evaluasi tidak hanya menilai hasil belajar siswa, tetapi juga menilai apakah tujuan, materi, dan metode yang dipilih sudah tepat atau memerlukan revisi.

Evaluasi digunakan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan, evaluasi kurikulum harus mencakup dua hal utama yaitu evaluasi terhadap hasil belajar siswa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Hasil dari evaluasi ini menjadi bahan pertimbangan (umpan balik) untuk melakukan perbaikan pada siklus pengembangan kurikulum berikutnya.<sup>155</sup>

### **C. Hubungan dan Interaksi Antar Komponen dalam Pengembangan Kurikulum.**

Pengembangan kurikulum (*curriculum development*) pada hakikatnya adalah upaya menyelaraskan hubungan antar komponen agar terjadi sinergi. Berikut perspektif para ahli:

1. Ralph W. Tyler (*The Linear-Rational Model*): Tyler menekankan pada *hubungan sebab-akibat*. Pengembangan kurikulum dimulai dari penentuan tujuan, lalu memilih materi dan metode yang sesuai, dan diakhiri dengan evaluasi. Jika hasil evaluasi tidak sesuai, maka pengembang kurikulum harus meninjau kembali kaitan antara tujuan dan materi tersebut.<sup>156</sup>
2. Hilda Taba (*The Inverted-Inductive Model*): Taba berargumen bahwa hubungan antar komponen bersifat *interaktif-induktif*. Ia meyakini bahwa pengembangan kurikulum harus diawali dari diagnosis kebutuhan siswa di

---

<sup>154</sup> Sari, dkk. (2025). *Evaluasi Kurikulum: Pengertian, Tujuan, dan Prinsip*. Jurnal Manajerial, Vol. 8 (2).

<sup>155</sup> Beauchamp, George A. (1981). *Curriculum Theory*. Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers.

<sup>156</sup> Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 1949), hlm. 40.

lapangan. Hubungan ini menekankan bahwa "Isi Materi" harus memiliki koneksi organik dengan kebutuhan nyata siswa sebelum "Tujuan" diformalkan.<sup>157</sup>

3. DK. Wheeler (*The Cyclical Model*): Berbeda dengan Tyler, Wheeler memandang hubungan antar komponen sebagai sebuah *lingkaran (siklus)*. Evaluasi dalam pandangan Wheeler bukan akhir, melainkan titik tolak untuk merevisi kembali tujuan pendidikan, sehingga pengembangan kurikulum menjadi proses yang dinamis dan tak pernah berhenti.<sup>158</sup>

Hubungan antar komponen dalam pengembangan kurikulum bersifat *sistemik dan sirkular*, di mana setiap elemen saling memengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Berikut adalah analisis hubungan dan interaksinya:

1. Hubungan Hierarkis pada Komponen Tujuan

Tujuan merupakan penggerak utama (*prime mover*) dalam kurikulum. Interaksi dimulai dari tingkat makro ke mikro:

- a. Tujuan Pendidikan Nasional menjadi payung hukum dan filosofis.
- b. Tujuan Institusional menerjemahkan visi negara ke dalam karakter khas lembaga.
- c. Tujuan Kurikuler membreakdown visi lembaga ke dalam kompetensi mapel.
- d. Tujuan Instruksional menjadi ujung tombak teknis di kelas.
- e. Interaksi: Jika tujuan instruksional gagal dicapai, maka target kurikuler dan institusional secara otomatis akan terhambat.<sup>159</sup>

Dalam arsitektur kurikulum, tujuan menduduki posisi sentral sebagai *prime mover* atau penggerak utama. Hal ini dikarenakan setiap aktivitas

---

<sup>157</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice* (New York: Harcourt, Brace & World, 1962), hlm. 12

<sup>158</sup> D.K. Wheeler, *Curriculum Process* (London: University of London Press, 1967), hlm. 15.

<sup>159</sup> Sanjaya, Wina. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana, hal. 65.

Pendidikan, mulai dari pemilihan buku teks hingga metode ujian, harus memiliki legitimasi yang bersumber dari tujuan tersebut. Interaksi ini bekerja dalam sebuah sistem hierarki yang bergerak dari level makro (negara) menuju level mikro (ruang kelas).

Pertama, *Tujuan Pendidikan Nasional* berfungsi sebagai "payung ideologis". Ia adalah kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan cita-cita besar sebuah bangsa. Tanpa payung ini, pendidikan akan kehilangan jati dirinya dan sekadar menjadi proses transfer informasi tanpa ruh kebangsaan. Selanjutnya, *Tujuan Institusional* berperan sebagai penerjemah. Di sini, setiap lembaga pendidikan memiliki "otonomi kreatif" untuk membungkus visi negara ke dalam karakteristik khas sekolah, seperti keunggulan lokal atau nilai religiusitas tertentu.

Bergerak lebih dalam, *Tujuan Kurikuler* berfungsi membedah visi lembaga tersebut ke dalam ruang lingkup mata pelajaran. Pada tahap ini, visi besar sekolah mulai dikonversikan menjadi kompetensi-kompetensi spesifik yang harus dikuasai siswa. Akhirnya, *Tujuan Instruksional* menjadi "ujung tombak" di medan tempur kelas. Inilah level paling teknis di mana guru dan siswa berinteraksi secara langsung.

Kekuatan utama dari hierarki ini terletak pada *interkonektivitasnya*. Terdapat hubungan kausalitas yang tak terelakkan: jika tujuan instruksional gagal dicapai, misalnya karena metode pengajaran yang buruk atau materi yang tidak relevan, maka secara otomatis target kurikuler akan lumpuh. Kegagalan di tingkat mikro ini akan memicu efek domino yang menghambat pencapaian tujuan institusional, dan pada skala luas, akan mencederai pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada sinkronisasi yang presisi antara niat besar di level negara dengan tindakan nyata di dalam kelas.

## 2. Interaksi Antar Komponen (Struktural)

Secara operasional, hubungan antar komponen dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tujuan dengan Isi (Materi): Tujuan menentukan ruang lingkup dan kedalaman materi. Tanpa tujuan yang jelas, pemilihan materi akan menjadi tidak terarah dan membebani siswa.
- b. Isi dengan Strategi: Materi yang bersifat teori memerlukan strategi kognitif, sedangkan materi praktik memerlukan strategi demonstrasi/eksperimen. Strategi berfungsi sebagai "kendaraan" untuk menyampaikan "muatan" (materi).<sup>160</sup>
- c. Evaluasi sebagai Kontrol Kualitas: Evaluasi tidak hanya menilai hasil belajar (siswa), tetapi juga menilai apakah tujuan masih relevan, apakah materi terlalu sulit, atau apakah strategi yang digunakan sudah tepat.

Secara operasional, kurikulum bekerja layaknya sebuah ekosistem yang saling bergantung. Hubungan ini bukan sekadar urutan formalitas, melainkan sebuah fungsionalitas yang menentukan mutu pembelajaran di lapangan.

Pertama, interaksi antara Tujuan dan Isi (Materi) menciptakan batasan yang logis. Tujuan berfungsi sebagai "filter" atau penyaring bagi materi yang sangat luas. Tanpa kompas tujuan yang jelas, materi akan cenderung menumpuk tanpa arah, yang pada akhirnya hanya akan membebani daya tampung kognitif siswa tanpa memberikan makna yang esensial. Sebaliknya, materi yang dipilih secara presisi berdasarkan tujuan akan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima siswa memiliki relevansi langsung terhadap kompetensi yang ingin dibangun.

Kedua, hubungan antara *Isi dengan Strategi* dapat diibaratkan sebagai hubungan antara "muatan" dan "kendaraan". Sebuah kendaraan

---

<sup>160</sup> Hamalik, Oemar. (2014). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 78.

(strategi) harus disesuaikan dengan karakteristik muatannya (materi). Materi yang bersifat teoretis dan abstrak tentu memerlukan strategi kognitif seperti diskusi mendalam atau pemetaan konsep. Namun, jika materi tersebut bersifat praktis atau psikomotorik, maka strategi demonstrasi dan eksperimen menjadi kendaraan yang jauh lebih efektif. Ketidaksesuaian antara metode dan materi tidak hanya menghambat pemahaman siswa, tetapi juga membuang sumber daya waktu secara sia-sia.

Ketiga, Evaluasi hadir sebagai Kontrol Kualitas yang menyeluruh. Peran evaluasi melampaui sekadar pemberian angka pada rapor siswa, namun menjadi alat audit bagi sistem kurikulum itu sendiri. Melalui evaluasi, pengembang kurikulum dapat melakukan refleksi kritis: apakah tujuan yang dicanangkan masih relevan dengan tuntutan zaman, atau apakah materi yang diberikan terlalu tinggi tingkat kesulitannya bagi usia siswa atau, apakah strategi yang digunakan guru sudah cukup mumpuni untuk menjembatani materi tersebut. Dengan demikian, evaluasi menjadi jaminan bahwa kurikulum tetap adaptif dan efektif dalam mencapai visi pendidikan yang diharapkan.

#### **D. Implementasi Koneksi Komponen Berdasarkan Regulasi Terbaru di Indonesia**

Implementasi kurikulum di Indonesia saat ini mengalami transformasi besar melalui kebijakan Kurikulum Merdeka yang didasarkan pada landasan hukum terbaru:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Dalam Pasal 1 angka 19, ditegaskan bahwa kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai *tujuan, isi, dan bahan pelajaran*. Secara

yuridis, UU ini mewajibkan adanya integrasi mutlak antar komponen tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>161</sup>

Secara hukum, kurikulum di Indonesia memiliki landasan yang sangat kokoh melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pada Pasal 1 angka 19, undang-undang ini menegaskan bahwa kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah rencana dan pengaturan yang komprehensif. Saya melihat bahwa secara yuridis, UU ini mewajibkan adanya integrasi mutlak antar komponen. Artinya, jika salah satu elemen (seperti bahan pelajaran) tidak selaras dengan tujuan pendidikan nasional, maka secara hukum kurikulum tersebut dianggap cacat atau tidak memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan yang sah.

## 2. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024

Peraturan terbaru ini merupakan tonggak implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional. Koneksi antar komponen diwujudkan melalui:

*Capaian Pembelajaran (CP)*: Sebagai peleburan komponen tujuan dan materi. CP dirancang secara terintegrasi agar tidak terjadi pemisahan antara pengetahuan dan keterampilan.<sup>162</sup> Ini adalah bentuk peleburan antara komponen tujuan dan materi. CP tidak lagi memandang pengetahuan dan keterampilan sebagai entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan kompetensi yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih holistik.

*Fleksibilitas Metode*: Memberikan wewenang kepada guru untuk mengoneksikan strategi pembelajaran dengan konteks lokal dan karakteristik siswa (pembelajaran berdiferensiasi).<sup>163</sup> Peraturan ini memberikan kedaulatan kepada guru untuk mengoneksikan strategi

---

<sup>161</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>162</sup> Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

<sup>163</sup> *Ibid.*

pembelajaran dengan konteks lokal. Strategi tidak lagi dipaksakan seragam dari pusat, melainkan tumbuh dari karakteristik siswa (pembelajaran berdiferensiasi), sehingga interaksi di kelas menjadi lebih manusiawi dan relevan.

*Asesmen Otentik*: Evaluasi tidak lagi hanya berfokus pada angka akhir, melainkan pada proses pembelajaran yang berkelanjutan (*formative assessment*) untuk memperbaiki kualitas instruksional secara *real-time*.<sup>164</sup> Evaluasi mengalami reposisi. Fokusnya kini bukan lagi pada penghakiman nilai akhir (angka), melainkan pada proses yang berkelanjutan (*formative assessment*). Evaluasi ini berfungsi sebagai alat navigasi bagi guru untuk memperbaiki kualitas pengajaran secara langsung dan tepat sasaran.

### 3. Koneksi dengan Profil Pelajar Pancasila

Regulasi terbaru menempatkan Profil Pelajar Pancasila sebagai "benang merah" yang mengikat seluruh komponen. Tujuan (CP), materi, dan metode harus bermuara pada penguatan karakter, sehingga kurikulum tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter luhur.<sup>165</sup>

Analisis saya menyimpulkan bahwa *Profil Pelajar Pancasila* berfungsi sebagai "benang merah" atau ruh yang menyatukan seluruh elemen kurikulum. Regulasi terbaru menempatkan profil ini sebagai kompas moral. Hal ini berarti bahwa setiap Capaian Pembelajaran (Tujuan/Materi) dan setiap metode yang dijalankan harus bermuara pada pembentukan karakter. Dengan demikian, kurikulum tidak lagi hanya mengejar kecerdasan akademik semata, tetapi secara sadar dirancang untuk melahirkan lulusan yang memiliki integritas, semangat gotong royong, dan kemandirian sebagai identitas bangsa.

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> Kemendikbudristek, *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan*, 2024.

## **E. Analisis Tantangan Sinkronisasi Komponen Kurikulum di Sekolah**

Meskipun secara teoritis komponen kurikulum (tujuan, isi, metode, evaluasi) harus berjalan seiring, dalam praktiknya di satuan pendidikan sering kali terjadi ketimpangan atau "mismatch". Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Fragmentasi Pemahaman Pendidik: Banyak guru masih melihat Capaian Pembelajaran (Tujuan) sebagai beban administratif, bukan sebagai kompas dalam menentukan Metode. Akibatnya, metode yang digunakan sering kali monoton dan tidak selaras dengan kedalaman materi yang diminta oleh kurikulum terbaru.<sup>166</sup>
2. Dilema Antara Materi Esensial dan Alokasi Waktu: Sesuai dengan semangat Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, kurikulum kini berfokus pada materi esensial. Namun, tantangannya adalah kecenderungan sekolah untuk tetap mengejar ketuntasan seluruh isi buku teks, sehingga komponen "Metode" yang seharusnya eksploratif berubah menjadi terburu-buru demi mengejar target materi.
3. Ketidakselarasan Evaluasi dengan Proses (Assessment Gap): Sering terjadi situasi di mana proses pembelajaran sudah menggunakan pendekatan modern (proyek), namun sistem evaluasi akhirnya masih berbasis tes kognitif pilihan ganda yang sempit. Hal ini memutus koneksi sistemik yang seharusnya dibangun antara proses dan hasil.

## **F. Koneksi Komponen dalam Perspektif Kurikulum Merdeka**

Dalam kerangka pengembangan kurikulum saat ini, koneksi antar komponen tidak lagi bersifat linear kaku, melainkan fleksibel dan integratif:

1. Penyelarasan melalui KOSP: Satuan pendidikan kini memiliki wewenang untuk Menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). Di sini, sekolah harus mengoneksikan Visi-Misi Sekolah

---

<sup>166</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 142.

(Tujuan) dengan Karakteristik Lingkungan (Isi) dan Kebutuhan Siswa (Metode).<sup>167</sup>

2. Peran Asesmen Formatif sebagai Jembatan: Evaluasi tidak lagi diletakkan hanya di akhir, melainkan di Tengah proses (formatif). Ini berfungsi sebagai "perekat" yang mengoneksikan Kembali tujuan dan metode; jika hasil evaluasi harian menunjukkan siswa belum paham, maka guru secara otomatis harus mengubah strategi atau metodenya saat itu juga.

### **G. Sinkronisasi Yuridis: Menjawab Tantangan Melalui Regulasi**

Secara hukum, pemerintah melalui UU Sisdiknas dan peraturan turunannya telah memberikan solusi atas tantangan sinkronisasi ini:

1. Otonomi Kurikulum: Pasal 35 UU No. 20/2003 memberikan ruang bagi daerah dan sekolah untuk melakukan penyesuaian. Artinya, koneksi kurikulum tidak harus seragam secara nasional, melainkan harus relevan dengan konteks lokal.<sup>168</sup>
2. Penyederhanaan Administrasi: Melalui aturan terbaru tahun 2024, pemerintah mengurangi beban administrasi guru agar mereka lebih fokus pada sinkronisasi interaksi di kelas (metode) daripada sekadar menyusun dokumen yang tebal.
3. Profil Pelajar Pancasila sebagai Standar Output: Hal ini memastikan bahwa apa pun materi dan metode yang digunakan, semua komponen harus mengerucut pada satu tujuan besar yang sama, sehingga mengurangi risiko kurikulum yang "kehilangan arah".<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> Kemendikbudristek, *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan*, 2024.

<sup>168</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35.

<sup>169</sup> Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, Lampiran tentang Profil Pelajar Pancasila.

## H. Studi Kasus: Fenomena Sinkronisasi Kurikulum di Indonesia

Untuk memahami bagaimana komponen kurikulum berinteraksi dalam realitas pendidikan kita, berikut adalah beberapa kasus yang sering terjadi:

1. Kasus "Miskoneksi" Antara Materi dan Evaluasi (Ujian Nasional vs KBK/KTSP)

Pada era Kurikulum 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP), Indonesia mengalami tantangan besar dalam hal sinkronisasi. Secara teori (*komponen Tujuan*), kurikulum menekankan pada kompetensi dan karakter siswa. Namun, komponen *Evaluasi* saat itu masih menggunakan Ujian Nasional (UN) yang bersifat pilihan ganda dan hanya menguji kognitif rendah.

*Dampaknya:* Guru cenderung mengabaikan *Metode* eksploratif (diskusi/praktikum) dan beralih ke metode "Drilling" soal. Ini adalah contoh nyata di mana satu komponen (Evaluasi) yang tidak sinkron dapat merusak seluruh sistem pengembangan kurikulum.<sup>170</sup>

2. Kasus Kurikulum Darurat (Pandemi COVID-19 2020-2022)

Ini adalah contoh sukses adaptasi koneksi komponen secara cepat. Ketika pandemi melanda, pemerintah menyadari bahwa komponen *Materi* yang terlalu padat tidak mungkin tersampaikan dengan *Metode* daring yang terbatas waktu.

*Solusinya:* Pemerintah meluncurkan "Kurikulum Darurat" yang memangkas materi hingga 50% dan hanya menyisakan *Materi Esensial*.

*Hasilnya:* Guru memiliki ruang bernapas untuk mengoneksikan materi dengan kondisi psikologis siswa, membuktikan bahwa fleksibilitas komponen materi adalah kunci keberhasilan kurikulum di masa krisis.<sup>171</sup>

---

<sup>170</sup> Doni Koesoema A., *Strategi Pendidikan Karakter* (Jakarta: Kanisius, 2010), hlm. 55.

<sup>171</sup> Kemendikbudristek, *Laporan Evaluasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus*, 2021.

### 3. Kasus Implementasi P5 dalam Kurikulum Merdeka (2022-Sekarang)

Dalam Kurikulum Merdeka, terdapat komponen baru bernama *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*. Di lapangan, ditemukan kasus di beberapa sekolah di mana P5 hanya dipahami sebagai "pameran produk" atau "pentas seni" semata.

Tantangannya: Terjadi pemutusan koneksi antara Tujuan (pembentukan karakter/dimensi profil) dengan Metode (proses projek). Sekolah terkadang terlalu fokus pada hasil akhir (produk) daripada proses refleksi dan pemecahan masalah yang dialami siswa.

Relevansi Hukum: Hal ini dijawab dalam Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 yang menekankan bahwa asesmen projek harus berfokus pada perkembangan karakter, bukan kemegahan produk akhir.<sup>172</sup>

### 4. Kasus Adaptasi Kurikulum Lokal di Daerah Terpencil (3T)

Di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sering terjadi ketidaksesuaian antara *komponen Isi* yang dibuat secara nasional dengan realitas lokal. Misalnya, materi tentang "Sistem Transportasi Kereta Api" di buku teks pusat, sementara siswa di pedalaman Papua atau Kalimantan belum pernah melihat kereta api.

*Implementasi Baru:* Melalui semangat otonomi dalam UU Sisdiknas Pasal 36 ayat (2), sekolah di daerah kini didorong untuk melakukan *Kontekstualisasi Kurikulum*. Guru mulai mengganti contoh-contoh dalam materi dengan kearifan lokal (seperti transportasi sungai atau laut) agar koneksi antara materi dan pemahaman siswa menjadi lebih kuat.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, Lampiran II tentang Pedoman P5.

<sup>173</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 36 ayat 2 mengenai diversifikasi kurikulum.

# **BAB V**

**DINAMIKA DALAM PENGEMBANGAN  
KURIKULUM DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP MANAJEMEN  
PENGEMBANGAN KURIKULUM**

## A. Pendahuluan

Kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan karena menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, isi, bahan ajar, dan proses pembelajaran. Dalam sistem pendidikan, kurikulum tidak hanya dipahami sebagai macam macam mata pelajaran, selain itu juga sebagai perangkat strategis yang mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Oleh sebab itu, keberadaan kurikulum sangat menentukan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.<sup>174</sup>

Pada kenyataannya, kurikulum tidak bersifat tetap, melainkan selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia pendidikan menjadikan kurikulum harus terus diperbarui agar tetap relevan. Dinamika dalam pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa kurikulum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan sosial yang terus berubah. Dengan demikian, pengembangan kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan kajian, perencanaan, dan penyesuaian secara terus-menerus.<sup>175</sup>

Dalam konteks Indonesia, dinamika pengembangan kurikulum dapat dilihat dari berbagai perubahan kebijakan kurikulum hingga lahirnya Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pemulihan pembelajaran serta mendorong proses belajar yang lebih fleksibel, mendalam, dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, kurikulum juga diarahkan untuk memperkuat kompetensi, karakter, dan kemampuan peserta

---

<sup>174</sup> Wiji Hidayati, Syaefudin, dan Umi Muslimah, *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan (Konsep dan Strategi Pengembangan)* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021).

<sup>175</sup> Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

didik dalam menghadapi perubahan zaman. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum menjadi salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.<sup>176</sup>

Dinamika pengembangan kurikulum tersebut membawa implikasi yang besar terhadap manajemen pengembangan kurikulum di sekolah. Sekolah bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan sebagai pengembang kurikulum operasional yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, karakteristik peserta didik, serta lingkungan sekitar. Pengelolaan pengembangan kurikulum mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum agar implementasinya berjalan secara efektif dan berkelanjutan.<sup>177</sup>

Namun demikian, pelaksanaan pengembangan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan guru, kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana pendukung, dan kemampuan sekolah dalam melakukan evaluasi kurikulum. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kurikulum harus diimbangi dengan manajemen yang baik agar perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dinamika dalam pengembangan kurikulum dan implikasinya terhadap manajemen pengembangan kurikulum menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Direktorat PAUD, Dikdas, dan Dikmen, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

<sup>177</sup> Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan* (Jakarta: BSKAP, 2022).

<sup>178</sup> Nurul Huda, "Manajemen Pengembangan Kurikulum," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 52–75.

## B. Hakikat Dinamika dalam Pengembangan Kurikulum

Dinamika dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya merujuk pada sifat kurikulum yang selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pendidikan. Dalam regulasi nasional, kurikulum dipahami sebagai sekumpulan rencana dan susunan yang mencakup tujuan, isi, materi pembelajaran, serta metode yang dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guna mencapai sasaran pendidikan tertentu. Pengertian tersebut berarti bahwa kurikulum bukanlah hal yang bersifat kaku melainkan suatu sistem yang dirancang untuk menjawab tujuan pendidikan sesuai dengan konteks zamannya. Karena masyarakat, peserta didik, ilmu pengetahuan, serta kebijakan pendidikan terus berubah, maka kurikulum pun harus terus diperbarui agar tetap relevan dan efektif.<sup>179</sup>

Secara konseptual, pengembangan kurikulum dapat dipahami sebagai proses merancang, menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan. Nurul Huda menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum dapat dilihat sebagai proses perekayasaan dan konstruksi yang mencakup penentuan fondasi, penyusunan model kurikulum, implementasi, dan evaluasi. Dalam perspektif ini, pengembangan kurikulum tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi mencakup keseluruhan proses yang berlangsung secara sistematis. Oleh sebab itu, dinamika pengembangan kurikulum berarti adanya perubahan, penyempurnaan, dan penyesuaian kurikulum secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan lapangan, dan tantangan pendidikan yang berkembang.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2024).

<sup>180</sup> Nurul Huda, "Manajemen Pengembangan Kurikulum," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 52–75.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, dinamika kurikulum terlihat jelas pada lahirnya Kurikulum Merdeka. Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya menangani krisis pembelajaran yang telah lama dialami Indonesia dan semakin memburuk akibat pandemi. Dokumen yang sama juga menegaskan bahwa kurikulum baru tidak dimaksudkan sebagai kebijakan yang final dan tertutup, melainkan akan terus disempurnakan dengan mempertimbangkan evaluasi dan umpan balik dari berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pengembangan kurikulum merupakan bagian dari proses pembaruan pendidikan yang berlandaskan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar pergantian istilah atau administrasi semata.<sup>181</sup>

Dinamika kurikulum juga menunjukkan bahwa sekolah memiliki posisi yang aktif dalam proses pengembangan kurikulum. Panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan dalam menentukan format serta sistematika penyusunan kurikulum operasional, dan panduan tersebut akan terus disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Artinya, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah bukan hanya menjalankan instruksi dari pusat, tetapi juga menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan, visi sekolah, dan kebutuhan pembelajaran. Dengan demikian, dinamika pengembangan kurikulum mengandung unsur fleksibilitas, kontekstualitas, dan keberlanjutan.<sup>182</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat dinamika dalam pengembangan kurikulum terletak pada kemampuannya untuk terus berubah secara terarah. Perubahan itu bukan dilakukan tanpa dasar, melainkan

---

<sup>181</sup> Direktorat PAUD, Dikdas, dan Dikmen, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

<sup>182</sup> Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan* (Jakarta: BSKAP, 2022).

melalui proses analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang sistematis. Dalam perspektif manajemen, kurikulum harus dipandang sebagai sistem saling berkaitan antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka pelaksanaan kurikulum tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, dinamika pengembangan kurikulum harus dikelola melalui manajemen yang baik agar perubahan yang terjadi benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan pada jenjang dasar dan menengah.<sup>183</sup>

Agar lebih jelas, hakikat dinamika dalam pengembangan kurikulum dapat dilihat melalui beberapa ciri berikut:

1. Bersifat adaptif, yaitu kurikulum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
2. Bersifat berkelanjutan, yaitu pengembangan kurikulum dilakukan melalui revisi dan evaluasi secara terus-menerus.
3. Bersifat kontekstual, yaitu kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan belajar.
4. Bersifat sistemik, yaitu perubahan kurikulum harus memperhatikan keterkaitan antara tujuan, materi, metode, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Bersifat manajerial, yaitu perubahan kurikulum memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang baik.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa dinamika dalam pengembangan kurikulum merupakan proses perubahan, penyesuaian, dan penyempurnaan kurikulum dilakukan secara terus-menerus agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, kebutuhan

---

<sup>183</sup> Wiji Hidayati, Syaefudin, dan Umi Muslimah, *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan (Konsep dan Strategi Pengembangan)* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021).

peserta didik, serta tujuan pendidikan, yang pelaksanaannya harus didukung oleh manajemen kurikulum yang sistematis dan adaptif.

### **C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Dinamika Pengembangan Kurikulum**

Dinamika pengembangan kurikulum tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kurikulum selalu bergerak mengikuti perubahan kebutuhan pendidikan, perkembangan masyarakat, serta arah kebijakan nasional. Dalam konteks Indonesia, perubahan dan penyempurnaan kurikulum juga berkaitan dengan upaya menjawab tantangan mutu pembelajaran, kebutuhan abad ke-21, dan penyesuaian pembelajaran yang lebih fleksibel di satuan pendidikan. Karena itu, pengembangan kurikulum harus dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal pendidikan.<sup>184</sup>

Secara umum, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi dinamika pengembangan kurikulum, yaitu faktor filosofis, sosiologis, psikologis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pemerintah, serta faktor manajerial dan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memberi pengaruh dalam menentukan arah, isi, metode, dan evaluasi kurikulum. Dengan demikian, setiap perubahan kurikulum sesungguhnya merupakan hasil dari respons pendidikan terhadap berbagai tuntutan tersebut.

#### **1. Faktor filosofis**

Faktor filosofis berkaitan dengan pandangan dasar tentang manusia, pendidikan, pengetahuan, dan tujuan hidup yang ingin diwujudkan melalui proses pendidikan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan nilai, cita-cita,

---

<sup>184</sup> Trys Supriadi, Dicky Yatim, Inrya Nofika, Sylvia Gusti Handayani, dan Nizwardi Jalinus, "Pengembangan Kurikulum Merdeka dalam Satuan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).

dan orientasi pendidikan yang dianut oleh suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pengembangan kurikulum harus sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, perubahan kurikulum tidak boleh dilepaskan dari landasan filosofis yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang beriman, berkarakter, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Faktor filosofis inilah yang membuat kurikulum tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik.<sup>185</sup>

## 2. Faktor sosiologis

Faktor sosiologis berhubungan dengan perubahan kehidupan masyarakat, budaya, kebutuhan sosial, dan perkembangan lingkungan tempat pendidikan berlangsung. Kurikulum perlu disusun dengan memperhatikan realitas masyarakat agar hasil pendidikan tidak terlepas dari kebutuhan kehidupan nyata. Perubahan sosial, globalisasi, keberagaman budaya, serta tuntutan dunia kerja menyebabkan kurikulum harus terus diperbarui agar peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam kajian manajemen kurikulum disebutkan bahwa kurikulum perlu merelevansikan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah, sehingga kurikulum menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan lingkungan tempat peserta didik belajar.<sup>186</sup>

## 3. Faktor psikologis

Faktor psikologis berkaitan dengan perkembangan peserta didik, karakteristik belajar, minat, bakat, kebutuhan, dan tahap pertumbuhan mereka. Kurikulum yang baik harus memperhatikan kondisi psikologis peserta didik agar materi, metode, dan pengalaman belajar sesuai dengan

---

<sup>185</sup> Nurul Huda, "Manajemen Pengembangan Kurikulum," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 52–75.

<sup>186</sup> Inanna Nasution, "Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis," artikel PDF di Neliti, 2017.

tingkat perkembangan mereka. Dalam pengembangan Kurikulum Merdeka, penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa sangat ditekankan, sehingga pembelajaran tidak lagi semata-mata seragam, tetapi memberi ruang pada diferensiasi, fleksibilitas, dan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kurikulum juga dipengaruhi oleh semakin kuatnya perhatian terhadap aspek perkembangan individu peserta didik.<sup>187</sup>

#### 4. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor paling kuat yang mendorong perubahan kurikulum. Kemajuan teknologi digital, perubahan akses informasi, dan kebutuhan kompetensi abad ke-21 menuntut kurikulum yang adaptif, inovatif, dan relevan. Kajian tentang pengembangan Kurikulum Merdeka menegaskan bahwa kurikulum berkembang secara berkala untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan zaman. Karena itu, kurikulum tidak cukup hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah.<sup>188</sup>

#### 5. Faktor kebijakan dan regulasi pemerintah

Dinamika pengembangan kurikulum juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan perubahan regulasi pendidikan. Negara memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka dasar kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, serta arah pengembangan pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 menegaskan bahwa kerangka dasar kurikulum

---

<sup>187</sup> Ahmad Suryadi, Effy Mulyasari, Derry Hendriawan, dan Maria Ulfah, "Penerapan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur Sistematis," *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 13, no. 2 (2025).

<sup>188</sup> Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan* (Jakarta: BSKAP, 2022).

menjadi landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yang memuat tujuan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Ini menunjukkan bahwa setiap perubahan kebijakan akan langsung berpengaruh pada arah pengembangan kurikulum di sekolah. Dengan kata lain, dinamika kurikulum sangat erat kaitannya dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional.<sup>189</sup>

#### 6. Faktor manajerial dan kelembagaan

Selain faktor substansi, dinamika pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor manajerial dan kelembagaan di tingkat satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum tidak akan berjalan efektif tanpa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang baik. Panduan pengembangan kurikulum operasional menegaskan bahwa satuan pendidikan perlu melakukan analisis karakteristik sekolah, merumuskan visi-misi, mengorganisasikan pembelajaran, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Penelitian tentang implementasi Kurikulum Merdeka juga menunjukkan bahwa pelatihan guru, dukungan kebijakan sekolah, penguatan infrastruktur, dan evaluasi berkala menjadi faktor penting bagi keberhasilan penerapan kurikulum. Dengan demikian, kualitas manajemen sekolah sangat menentukan cepat atau lambatnya penyesuaian kurikulum terhadap perubahan yang terjadi.<sup>190</sup>

Agar lebih ringkas, faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Faktor	Pengaruh terhadap dinamika kurikulum
1	Filosofis	Menentukan arah, nilai, dan tujuan pendidikan
2	Sosiologis	Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan

<sup>189</sup> JDIH BPK RI, metadata *Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024*, diakses 24 Maret 2026.

<sup>190</sup> Siti Rahma Ismiatun, Neliwati, dan Budi Setiawan Ginting, "Implementasi Manajemen Kurikulum di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (2022): 965–969.

3	Psikologis	Menyesuaikan isi dan metode dengan perkembangan peserta didik
4	IPTEK	Mendorong pembaruan materi, metode, dan kompetensi abad ke-21
5	Kebijakan/regulasi	Menetapkan kerangka, struktur, dan arah perubahan kurikulum
6	Manajerial/kelembagaan	Menentukan efektivitas implementasi dan evaluasi kurikulum

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa dinamika pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh banyak faktor yang bekerja secara bersama-sama. Faktor filosofis memberikan arah nilai dan tujuan, faktor sosiologis dan psikologis memastikan relevansi kurikulum dengan masyarakat serta peserta didik, faktor IPTEK mendorong pembaruan isi dan metode, faktor kebijakan memberikan landasan formal, sedangkan faktor manajerial menentukan keberhasilan implementasi di sekolah. Oleh karena itu, Pengembangan kurikulum harus dilaksanakan secara komprehensif agar perubahan yang terjadi tidak bersifat parsial, tetapi benar-benar mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

#### **D. Peran Kepala Sekolah, Guru, dan Pemangku Kepentingan Lain dalam Manajemen Pengembangan Kurikulum**

Dalam manajemen pengembangan kurikulum, kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pemimpin pendidikan di satuan sekolah. Kepala sekolah tidak hanya bertugas mengawasi jalannya pembelajaran, tetapi juga mengarahkan perencanaan, koordinasi, implementasian, dan evaluasi kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Pada konteks kurikulum yang dinamis, kepala sekolah dituntut mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong inovasi, membangun kerja sama, dan memastikan bahwa perubahan kurikulum dapat diterapkan secara efektif di sekolah.

Guru juga memegang peranan yang sangat strategis karena guru merupakan pelaksana utama kurikulum di kelas. Keberhasilan pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam memahami capaian pembelajaran, menyusun perangkat ajar, memilih strategi pembelajaran, serta melakukan asesmen sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam Kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Karena itu, guru tidak lagi hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi pengembang pembelajaran yang aktif dan kreatif.<sup>191</sup>

Selain kepala sekolah dan guru, tim pengembang kurikulum di sekolah juga berperan dalam menyusun, meninjau, dan merevisi kurikulum operasional satuan pendidikan. Tim ini membantu memastikan bahwa kurikulum yang disusun sesuai dengan visi sekolah, karakteristik peserta didik, dan ketentuan nasional. Keberadaan tim pengembang kurikulum penting karena pengelolaan kurikulum tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan kerja kolektif dan koordinasi yang baik antarwarga sekolah.

Pemangku kepentingan lain, seperti pengawas sekolah, dinas pendidikan, wali murid, dan masyarakat, turut memiliki peran dalam mendukung pengembangan kurikulum. Pengawas sekolah berfungsi melakukan supervisi dan pendampingan agar implementasi kurikulum tetap sesuai arah kebijakan dan kebutuhan sekolah. Dinas pendidikan berperan dalam pembinaan serta penyediaan dukungan program. Sementara itu, orang tua dan masyarakat dapat memberikan masukan agar kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan lingkungan dan perkembangan peserta didik. Dengan demikian,

---

<sup>191</sup> Ahmad Suryadi, Effy Mulyasari, Derry Hendriawan, dan Maria Ulfah, "Penerapan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur Sistematis," *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 13, no. 2 (2025).

pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama.<sup>192</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen pengembangan kurikulum akan berjalan baik apabila semua pihak menjalankan perannya secara sinergis. Kepala sekolah berperan sebagai pengarah dan pengendali, guru sebagai pelaksana sekaligus pengembang pembelajaran, tim sekolah sebagai perencana teknis, dan pemangku kepentingan lain sebagai pendukung serta pengawas pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan kurikulum sangat bergantung pada kolaborasi, koordinasi, dan komitmen seluruh unsur pendidikan.

#### **E. Strategi Penguatan Manajemen Pengembangan Kurikulum di Sekolah**

Penguatan manajemen pengembangan kurikulum di sekolah perlu dilakukan agar perubahan kurikulum tidak berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar berdampak pada proses dan hasil pembelajaran. Salah satu strategi utama adalah memperkuat perencanaan kurikulum berbasis kebutuhan satuan pendidikan. Sekolah perlu melakukan analisis karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan, serta kebutuhan belajar sebelum menyusun kurikulum operasional. Dengan cara ini, kurikulum yang dikembangkan menjadi lebih kontekstual, relevan, dan mudah diterapkan.

Strategi berikutnya adalah peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah. Dinamika kurikulum menuntut guru untuk terus mengembangkan kompetensi dalam menyusun perangkat ajar, melaksanakan pembelajaran yang fleksibel, dan melakukan asesmen yang sesuai. Kepala sekolah juga perlu memperkuat perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengarahkan, mendampingi, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum di

---

<sup>192</sup> Ratna Widya Irmayanti, Sri Marmoah, dan Muhammad Ismail Sriyanto, "Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak dalam Perspektif Fungsi Manajemen di Sekolah Dasar," *Didaktika Dwija Indria* 11, no. 2 (2023).

sekolah. Oleh karena itu, pelatihan, lokakarya, komunitas belajar, dan pendampingan profesional menjadi bagian penting dalam penguatan manajemen kurikulum.

Selain itu, sekolah perlu membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik antarwarga sekolah maupun dengan pemangku kepentingan lain. Pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan secara individual, tetapi memerlukan kerja sama antara kepala sekolah, guru, tim pengembang kurikulum, pengawas, dan orang tua. Kolaborasi ini penting agar kurikulum yang disusun tidak hanya sesuai dengan kebijakan nasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata peserta didik dan lingkungan sekolah.<sup>193</sup>

Strategi lainnya adalah memperkuat supervisi dan evaluasi berkelanjutan. Sekolah perlu meninjau pelaksanaan kurikulum secara berkala untuk mengetahui hambatan, kekurangan, dan keberhasilan yang telah dicapai. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum pada periode berikutnya. Dengan demikian, manajemen pengembangan kurikulum tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami penyempurnaan sesuai hasil pelaksanaan di lapangan.

## **F. Dinamika Pengembangan Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia**

Dinamika pengembangan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat dilihat dari perubahan orientasi, struktur, dan strategi implementasi kurikulum yang terus menyesuaikan kebutuhan zaman. Secara umum, perubahan kurikulum di Indonesia tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti dokumen pembelajaran, tetapi juga untuk memperbaiki mutu hasil belajar, memperkuat karakter peserta didik, dan menyesuaikan proses

---

<sup>193</sup> Nurul Huda, "Manajemen Pengembangan Kurikulum," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 52–75.

pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka kebijakan terbaru, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 menegaskan bahwa kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kurikulum di Indonesia bersifat sistemik dan tidak lepas dari arah kebijakan nasional.<sup>194</sup>

Salah satu bentuk dinamika yang paling menonjol adalah pergeseran dari pendekatan kurikulum yang cenderung seragam menuju pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam dokumen *Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*, dijelaskan bahwa pada masa transisi satuan pendidikan pernah diberi tiga opsi, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Pada Kurikulum Merdeka, guru diberi keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Fleksibilitas ini menandai perubahan penting dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, karena sekolah dan guru tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran yang lebih adaptif.<sup>195</sup>

Dinamika berikutnya tampak pada perubahan orientasi pembelajaran. Jika pada praktik sebelumnya pembelajaran sering berfokus pada ketuntasan materi yang luas, maka arah Kurikulum Merdeka menekankan materi yang lebih esensial, pembelajaran mendalam, dan penguatan kompetensi. Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran menempatkan pembaruan kurikulum sebagai bagian dari strategi mengatasi krisis belajar dan mendorong pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, edisi Januari 2022 Majalah *JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan*

---

<sup>194</sup> JDIH BPK RI, “Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024,” diakses 24 Maret 2026.

<sup>195</sup> Direktorat PAUD, Dikdas, dan Dikmen, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka diluncurkan pada Februari 2022 dengan karakter fleksibilitas dan fokus pada pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter serta *soft skills* sesuai Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, dinamika kurikulum di Indonesia juga tercermin dalam perubahan cara pandang terhadap tujuan belajar, yakni dari sekadar penguasaan isi ke penguatan kompetensi dan karakter.<sup>196</sup>

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dinamika pengembangan kurikulum juga terlihat dalam semakin kuatnya kewenangan satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan konteksnya. Panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan menegaskan bahwa sekolah aturan pendidikan diberikan fleksibilitas penuh dalam merancang format serta sistematika penyusunan kurikulum operasionalnya. Selain itu, pedoman yang ada bersifat dinamis dan akan terus disempurnakan secara berkelanjutan melalui proses evaluasi serta penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Edisi revisi tahun, 2025 bahkan menegaskan kembali pentingnya proses peninjauan, revisi, koordinasi, dan supervisi dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kurikulum di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat sekolah melalui proses adaptasi yang berkelanjutan.<sup>197</sup>

Dari sisi implementasi, dinamika kurikulum pada pendidikan dasar juga dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian. Tinjauan literatur sistematis yang dimuat di *Kalam Cendekia* menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar berkaitan dengan peningkatan kompetensi siswa, penguatan karakter Pelajar Pancasila, dan pembelajaran yang lebih relevan

---

<sup>196</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Majalah JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan*, edisi Januari 2022 (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

<sup>197</sup> Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, *Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan: Edisi Revisi Tahun 2025* (Jakarta: BSKAP, 2025).

dengan kehidupan nyata. Namun, penelitian yang sama juga mencatat adanya tantangan berupa kurangnya pelatihan guru dan keterbatasan infrastruktur. Temuan tentang tantangan implementasi ini penting, sebab dinamika kurikulum tidak hanya menunjukkan adanya pembaruan kebijakan, tetapi juga memperlihatkan perlunya kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan agar perubahan kurikulum benar-benar berjalan efektif.<sup>198</sup>

Dengan demikian, dinamika pengembangan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa kecenderungan utama, yaitu perubahan kebijakan yang lebih adaptif, pembelajaran yang lebih fleksibel, fokus pada kompetensi esensial dan karakter, penguatan peran satuan pendidikan, serta munculnya tantangan baru dalam implementasi. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa kurikulum di Indonesia terus bergerak menuju model yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perubahan zaman. Namun, keberhasilan dinamika ini tetap bergantung pada kemampuan sekolah, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam mengelola perubahan secara sistematis dan berkelanjutan.<sup>199</sup>

Agar lebih ringkas, bentuk dinamika pengembangan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Bentuk dinamika	Penjelasan singkat
1	Perubahan kebijakan kurikulum	Adanya penyesuaian regulasi dan kerangka kurikulum nasional sesuai kebutuhan pendidikan
2	Fleksibilitas pembelajaran	Guru diberi keleluasaan memilih perangkat ajar dan menyesuaikan pembelajaran
3	Fokus pada materi esensial	Pembelajaran diarahkan pada kompetensi inti dan pemahaman yang lebih mendalam

<sup>198</sup> Ahmad Suryadi, Effy Mulyasari, Derry Hendriawan, dan Maria Ulfah, "Penerapan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar: Tinjauan Literatur Sistematis," *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 13, no. 2 (2025).

<sup>199</sup> Sucipto, Muhammad Sukri, Yuyun Elizabeth Patras, dan Lina Novita, "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review," *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 12, no. 1 (2024).

4	Penguatan karakter	Kurikulum menekankan Profil Pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis proyek
5	Kewenangan satuan pendidikan	Sekolah menyusun kurikulum operasional sesuai konteks dan karakteristiknya
6	Tantangan implementasi	Diperlukan pelatihan guru, dukungan infrastruktur, supervisi, dan evaluasi berkala

### **G. Implikasi Dinamika Pengembangan Kurikulum terhadap Manajemen Pengembangan Kurikulum**

Dinamika pengembangan kurikulum membawa implikasi langsung terhadap manajemen pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Ketika kurikulum terus berubah mengikuti kebutuhan peserta didik, perkembangan masyarakat, dan kebijakan nasional, maka pengelolaan kurikulum juga harus berubah menjadi lebih adaptif, sistematis, dan berkelanjutan. Secara regulatif, kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah saat ini diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, yang kemudian diubah melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini menunjukkan bahwa manajemen kurikulum tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan pendidikan, sehingga sekolah harus mampu menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaannya secara berkelanjutan. Adapun beberapa implikasinya yaitu:

#### 1. Pada fungsi perencanaan kurikulum.

Dinamika kurikulum menuntut sekolah untuk tidak lagi hanya memakai dokumen kurikulum secara administratif, tetapi melakukan analisis satuan pendidikan, menyusun visi, misi, tujuan, mengorganisasikan pembelajaran, dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Panduan pengembangan kurikulum operasional tahun 2022 menegaskan bahwa pengembangan kurikulum di satuan pendidikan memuat analisis karakteristik, penyusunan visi-misi, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, serta pendampingan dan evaluasi. Edisi revisi

tahun 2025 juga mplementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Saat ini menekankan pentingnya proses evaluasi dan revisi dokumen secara periodik. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap transformasi kurikulum menuntut pola perencanaan yang lebih kontekstual serta berbasis pada data riil (*evidence-based*). Dengan demikian, pengembangan kurikulum tidak lagi dipandang sebagai produk kebijakan yang bersifat final atau sekali jadi, melainkan sebuah proses dinamis yang menuntut adaptasi berkelanjutan demi menjawab kebutuhan lembaga pendidikan.

2. Pada fungsi pengorganisasian kurikulum.

Dinamika kurikulum menuntut sekolah membangun pembagian peran yang jelas antara kepala sekolah, guru, tim pengembang kurikulum, pengawas, dan pihak lain yang terlibat. Dalam perspektif manajemen kurikulum, keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada kerja sama antarkomponen, sebab jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik maka sistem kurikulum tidak akan optimal. Pada panduan revisi 2025, peran koordinasi dan supervisi bahkan ditegaskan secara khusus, termasuk keterlibatan pengawas sekolah atau penilik untuk memastikan dokumen kurikulum satuan pendidikan selaras dengan prinsip pengembangan dan komponen minimum yang ditetapkan. Artinya, semakin dinamis kurikulum, semakin penting pula pengorganisasian kelembagaan yang rapi dan kolaboratif.<sup>200</sup>

3. Pada fungsi pelaksanaan kurikulum.

Kurikulum yang dinamis menuntut perubahan nyata dalam praktik pembelajaran. Pada Kurikulum Merdeka, guru diberi ruang lebih luas untuk memilih perangkat ajar, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, dan menekankan materi esensial. Hal ini berarti manajemen

---

<sup>200</sup> Nurul Huda, "Manajemen Pengembangan Kurikulum," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 52–75.

pengembangan kurikulum tidak cukup hanya berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi harus memastikan kesiapan guru, ketersediaan perangkat ajar, penguatan komunitas belajar, serta pendampingan implementasi. Penelitian di SDN Kleco II menunjukkan bahwa Dinamika pengembangan kurikulum membawa implikasi langsung terhadap manajemen pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Ketika kurikulum terus berubah mengikuti kebutuhan peserta didik, perkembangan masyarakat, dan kebijakan nasional, maka pengelolaan kurikulum juga harus berubah menjadi lebih adaptif, sistematis, dan berkelanjutan. Secara regulatif, kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah saat ini diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, yang kemudian diubah melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini menunjukkan bahwa manajemen kurikulum tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan pendidikan, sehingga sekolah harus mampu menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaannya secara berkelanjutan.<sup>201</sup>

#### 4. Pada fungsi pengawasan dan supervisi.

Perubahan kurikulum menyebabkan sekolah harus memperkuat pengawasan agar implementasi tetap sejalan dengan prinsip, tujuan, dan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan revisi 2025 menegaskan adanya proses koordinasi dan supervisi, serta menempatkan pengawas sekolah atau penilik sebagai pihak yang memastikan keselarasan kurikulum satuan pendidikan dengan prinsip pengembangan kurikulum. Temuan penelitian tentang implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar juga menunjukkan bahwa tantangan besar masih muncul pada kesiapan guru, pelatihan, dan infrastruktur. Karena

---

<sup>201</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2024).

itu, pengawasan tidak boleh dipahami sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi harus diarahkan pada supervisi akademik, pendampingan profesional, dan perbaikan praktik pembelajaran.<sup>202</sup>

5. Pada fungsi evaluasi dan tindak lanjut pengembangan kurikulum.

Dinamika kurikulum menuntut evaluasi yang terus-menerus agar sekolah dapat mengetahui apakah kurikulum benar-benar menjawab kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan. Panduan kurikulum operasional 2022 sudah menempatkan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Pada edisi revisi 2025, peninjauan dan revisi dokumen kurikulum satuan pendidikan ditekankan kembali, yang berarti evaluasi harus menjadi proses berkelanjutan. Dalam tinjauan literatur sistematis, implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar dinilai mampu meningkatkan kompetensi siswa, memperkuat karakter Pelajar Pancasila, dan membuat pembelajaran lebih relevan, tetapi masih terkendala pelatihan guru dan keterbatasan infrastruktur. Temuan seperti ini menunjukkan bahwa evaluasi kurikulum harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret, bukan hanya laporan.

Selain itu, dinamika kurikulum juga berimplikasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah. Guru dituntut memahami perubahan capaian pembelajaran, strategi pembelajaran terdiferensiasi, asesmen, dan penyusunan modul ajar, sedangkan kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengarahkan perubahan di sekolah. Penelitian tentang tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah kesiapan guru. Karena itu, manajemen pengembangan kurikulum harus

---

<sup>202</sup> Sucipto, Muhammad Sukri, Yuyun Elizabeth Patras, dan Lina Novita, "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review," *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 12, no. 1 (2024).

memasukkan pelatihan, pengembangan profesional, komunitas belajar, dan pendampingan sebagai bagian inti dari pengelolaan kurikulum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika pengembangan kurikulum berimplikasi besar terhadap manajemen pengembangan kurikulum, terutama pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Semakin dinamis kurikulum, semakin besar kebutuhan akan manajemen yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis evaluasi. Dengan kata lain, perubahan kurikulum baru akan berdampak pada mutu pendidikan apabila dikelola secara sistematis oleh satuan pendidikan.

# **BAB VI**

**MANAJEMEN PENGEMBANGAN  
KURIKULUM (PERENCANAAN,  
PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN DAN  
EVALUASI)**

## A. Pendahuluan

Berjalannya perkembangan zaman yang dibarengi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan mekanisme modern, dunia pendidikan dituntut untuk mampu beradaptasi melalui pembaharuan kurikulum. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Fatoni (2015) bahwa seiring dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sarat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sepatutnya kurikulum terus melakukan upaya perubahan, pengembangan dan inovasi terhadap tuntutan tersebut.<sup>203</sup> Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kurikulum tidak bersifat statis, akan tetapi harus dinamis dengan mengikuti kebutuhan masyarakat sebagai pengguna utama hasil pendidikan.

Kurikulum berada pada posisi yang sangat strategis dalam sistem pendidikan. Bahkan ditegaskan bahwa kurikulum merupakan faktor yang memiliki berpengaruh pada pencapaian pendidikan nasional yang menjadikan suatu elemen dan mempunyai peranan krusial dalam struktur pendidikan.<sup>204</sup> Dengan sebab itu, pengelolaan kurikulum tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, akan tetapi harus menggunakan pendekatan manajerial yang terstruktur dan terencana. Dalam konteks ini, kurikulum dimaksud sebagai suatu sistem, di mana kurikulum merupakan suatu sistem yang menggunakan elemen-elemen yang terhubung dan mendukung satu sama lain.<sup>205</sup>

Dalam praktiknya, pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat dan peserta didik. Hal ini terlihat dalam konteks pendidikan pesantren, dimana kurikulum pendidikan di pondok pesantren pada saat ini harus didahului dengan kajian berdasarkan kebutuhan, sehingga pelaksanaan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan

---

<sup>203</sup> Ahmad Fathoni, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI', *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 5.1 (2015), pp. 76–91, doi:<https://doi.org/10.24042/alidarah.v5i1.755>.

<sup>204</sup> Fathoni, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI'.

<sup>205</sup> Nurul Huda, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum', *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1.2 (2017), pp. 52–75, doi:<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.113>.

santri atau masyarakat dalam memenuhi perkembangan zaman.<sup>206</sup> Dalam konteks manajemen, manajemen kurikulum berfungsi untuk mengatur seluruh proses berawal dari perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, serta evaluasi. Pendekatan ini dikenal dengan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang menjadi kerangka dasar mengelola kurikulum secara efektif.<sup>207</sup>

Namun demikian, pelaksanaan kurikulum masih dihadapkan pada sejumlah kendala, yaitu seperti terbatasnya sumber daya, minimnya kesiapan tenaga pendidik, dan belum optimalnya evaluasi. Padahal, evaluasi berperan penting tidak hanya untuk menilai hasil belajar, akan tetapi juga memperbaiki proses pembelajaran dan menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen perkembangan kurikulum menjadi krusial, sehingga makalah ini difokuskan pada aspek pelaksanaan dan evaluasi sebagai penentu keberhasilan implementasi kurikulum.

## B. Pengertian Manajemen

Secara bahasa, manajemen berasal dari kata *manage*. Kata *manage* sendiri berasal dari kata *manus* yang artinya *to control by hand and gain result*.<sup>208</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily mengemukakan bahwa manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang berarti ketatalaksanaan, pengelolaan. Makna dari pengertian ini adalah manajemen tak hanya terkait dengan pengelolaan pada pekerjaan tulis menulis saja akan tetapi juga mencakup pengelolaan dan pengaturan dalam arti cakupan yang lebih luas.<sup>209</sup> Sejalan dengan hal tersebut, manajemen juga dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui pengaturan yang sistematis dan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen.<sup>210</sup>

---

<sup>206</sup> Nurkholis and Achadi Budi Santoso, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis Pesantren', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7.2 (2022), pp. 113–30.

<sup>207</sup> Huda, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum'.

<sup>208</sup> Ulber Silalahi, 'Asas-Asas Manajemen', *PT. Refika Aditama, Bandung*, 2011, p. 3.

<sup>209</sup> John M Echols and Hassan Shadily, 'Kamus Inggris Indonesia', *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, 1996, p. 372.

<sup>210</sup> Sukarman Purba and others, *Teori Manajemen Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

Menurut Mary Parker Follett, manajemen diartikan sebagai suatu seni dalam melaksanakan pekerjaan melalui perantara orang lain, artinya bahwa para manajer dalam mengerjakan berbagai tugas dan memenuhi target dari organisasi dibantu atau melalui pengaturan orang lain maupun karyawan. Perihal ini selaras dengan pendapat Robbins, dkk (2014) yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses mengoordinasikan dan mengawasi aktivitas kerja orang lain agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.<sup>211</sup> Kata lain, manajemen juga dipandang menjadi suatu kegiatan yang berfungsi untuk menetapkan tujuan, mengoordinasikan sumber daya, serta mengoptimalkan penggunaan berbagai unsur organisasi guna mencapai efektivitas dan efisiensi (Mukhneri dalam Nurkholis, 2022).<sup>212</sup>

Merujuk pada uraian di atas bahwa manajemen memiliki pengertian beraneka ragam dari beberapa ahli, masing-masing ahli memiliki pendapat dan argumennya tersendiri melalui landasan hasil dan pengalaman mereka. Pada intinya manajemen adalah serangkaian kegiatan yang saling terikat meliputi proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian dalam memenuhi target yang telah disepakati sebelumnya, serta melibatkan orang lain dan sumber daya organisasi lainnya. Dengan demikian, manajemen tidak hanya berlandaskan pada pencapaian tujuan, tetapi juga menekankan pada bagaimana proses tersebut dilakukan secara efektif dan efisien melalui kerja sama antar individu dalam suatu organisasi.

### **C. Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan secara terstruktur guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum bersifat fleksibel

---

<sup>211</sup> Stephen P Robbins and others, *Management* (Pearson Australia, 2014), VII.

<sup>212</sup> Nurkholis and Santoso, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis Pesantren'.

dan terus berkembang, sehingga perlu disesuaikan dengan perubahan zaman serta kebutuhan peserta didik yang semakin beragam.<sup>213</sup>

Menurut para ahli, pengembangan kurikulum merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perancangan, penerapan, evaluasi, serta perbaikan kurikulum secara berkelanjutan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum berperan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga perlu disusun secara matang agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Kurikulum sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut harus dirancang secara terpadu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.<sup>214</sup> Dalam praktiknya, pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip relevansi, yaitu kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum juga harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan pendidikan.<sup>215</sup> Pengembangan kurikulum memiliki beberapa prinsip, antara lain:

1. Relevansi, yaitu kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
2. Fleksibilitas, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi.
3. Kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan antar jenjang pendidikan.
4. Efisiensi dan efektivitas, yaitu kurikulum mampu mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal.<sup>216</sup>

---

<sup>213</sup> Nurul Huda, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum', *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1 (2020), pp. 52–75.

<sup>214</sup> Sampiril Taurus Tamaji and Ida Latifatul Umroh, 'Konsep Pengembangan Kurikulum', *Al-Fakkaar: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Arab*, 3.1 (2022), pp. 97–115.

<sup>215</sup> Abdul Wahab and Muh Aidil Sudarmono, 'Proses Dan Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Abstrak', *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3.2 (2021), pp. 278–87.

<sup>216</sup> Bradley Setiyadi, Yulia Sari, and Mince Andri Yani, 'Komponen Pengembangan Kurikulum', *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 22.April (2020), pp. 13–21.

Selain itu, dalam pengembangan kurikulum juga terdapat komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Tujuan pendidikan
2. Isi atau materi pembelajaran
3. Metode atau strategi pembelajaran
4. Evaluasi pembelajaran

Pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan antar jenjang pendidikan, serta prinsip efisiensi dan efektivitas agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal.<sup>217</sup> Dengan demikian, pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks yang memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan agar kurikulum tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman

#### **D. Perencanaan**

Perencanaan dalam pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang terstruktur dalam menyusun berbagai komponen kurikulum agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Tahapan ini menjadi dasar yang sangat penting karena berfungsi menentukan arah, materi, serta strategi pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan.

Perencanaan kurikulum tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui serangkaian langkah yang terstruktur dan berbasis pada analisis yang mendalam. Menurut Hamalik (2013), Perencanaan kurikulum perlu memperhatikan berbagai faktor penting, seperti karakteristik dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan

---

<sup>217</sup> Marzuqi and Badrul Munir, 'Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Prinsip Dan Faktor Yang Mempengaruhi', *JoIEM*, 4.2 (2023), pp. 99–116.

dan teknologi, serta kebijakan pendidikan yang berlaku secara nasional.<sup>218</sup>  
Ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan, diantaranya:<sup>219</sup>

1. Analisis Kebutuhan (*Need Assessment*)

Tahap awal dalam perencanaan kurikulum adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Kebutuhan yang dianalisis meliputi:

- a. Kebutuhan peserta didik (minat, bakat, kemampuan)
- b. Kebutuhan masyarakat dan dunia kerja
- c. Perkembangan IPTEK
- d. Nilai-nilai budaya dan agama

Dengan adanya analisis tersebut, kurikulum yang disusun akan menjadi lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Nana Syaodih Sukmadinata (2012) menyatakan bahwa kurikulum yang berkualitas adalah kurikulum yang mampu merespons perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam pendidikan.

2. Perumusan Tujuan Kurikulum

Setelah kebutuhan dianalisis, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan kurikulum. Tujuan ini menjadi arah utama dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Tujuan kurikulum biasanya mengacu pada:

- a. Tujuan pendidikan nasional
- b. Visi dan misi lembaga pendidikan
- c. Standar kompetensi lulusan

Tujuan pembelajaran perlu dirumuskan secara jelas, terukur, serta mencakup tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya unggul

---

<sup>218</sup> Widodo Winarso, *DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH*, ed. by Education= Future (Cirebon, 2015).

<sup>219</sup> Syamsul Bahri, 'PENGEMBANGAN KURIKULUM DASAR DAN TUJUANNYA', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11.1 (2011).

dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki sikap serta keterampilan yang berkembang dengan baik.

### 3. Penentuan dan Pengorganisasian Isi/Materi

Tahap berikutnya adalah menentukan isi atau materi pembelajaran. Materi harus:

- a. Relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan
- b. Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
- c. Disusun secara sistematis dan berkesinambungan
- d. Memiliki nilai kegunaan dalam kehidupan nyata.

Pengorganisasian materi dapat dilakukan secara spiral, tematik, atau berbasis kompetensi. Hal ini bertujuan agar pembelajaran lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh peserta didik.

### 4. Pemilihan Strategi dan Metode Pembelajaran

Perencanaan kurikulum juga mencakup penentuan strategi pembelajaran. Strategi ini meliputi pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran yang akan digunakan.

Beberapa pendekatan yang sering digunakan antara lain:

- a. Pembelajaran berbasis kompetensi
- b. Pembelajaran aktif (active learning)
- c. Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning)
- d. Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning)

Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran agar proses belajar menjadi efektif dan menyenangkan.

### 5. Perencanaan Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian penting dalam perencanaan kurikulum. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kurikulum serta pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Evaluasi formatif (selama proses pembelajaran)
- b. Evaluasi sumatif (akhir pembelajaran)
- c. Evaluasi diagnostik (untuk mengetahui kesulitan belajar)

Selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum di masa yang akan datang (*feedback*).

#### 6. Perencanaan Sumber Daya dan Implementasi

Perencanaan kurikulum juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, seperti:

- a. Tenaga pendidik (kompetensi guru)
- b. Sarana dan prasarana
- c. Media pembelajaran
- d. Waktu dan biaya

Tanpa perencanaan sumber daya yang baik, kurikulum yang telah dirancang tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal.

#### 7. Keterkaitan dengan Fungsi Manajemen (POAC)

Dalam perspektif manajemen, perencanaan kurikulum merupakan bagian dari fungsi Planning dalam konsep POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

- a. *Planning*: Menyusun rancangan kurikulum
- b. *Organizing*: Mengatur pembagian tugas dan sumber daya
- c. *Actuating*: Melaksanakan pembelajaran
- d. *Controlling*: Melakukan evaluasi dan pengawasan

Dengan menerapkan prinsip POAC, pengembangan kurikulum dapat berjalan lebih sistematis, terarah, dan terkontrol. Perencanaan dalam pengembangan kurikulum merupakan tahap yang sangat krusial karena menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Perencanaan yang baik harus melalui tahapan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, penentuan materi, pemilihan strategi, serta perencanaan evaluasi dan sumber daya. Selain itu, perencanaan juga harus terintegrasi dengan fungsi manajemen agar implementasi kurikulum berjalan secara optimal.

## E. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam pengembangan kurikulum merupakan proses penataan seluruh komponen kurikulum agar dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terkoordinasi. Tahap ini menjadi lanjutan dari perencanaan yang bertujuan untuk mengatur struktur kerja, pembagian tugas, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Dalam praktiknya, pengorganisasian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menekankan pada kerja sama antar pihak agar kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.<sup>220</sup>

### 1. Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum

Pembentukan tim pengembang kurikulum merupakan langkah awal dalam proses pengorganisasian. Tim ini biasanya terdiri dari kepala sekolah atau madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, guru, serta pihak lain seperti pengawas atau ahli pendidikan. Keterlibatan berbagai unsur ini bertujuan agar kurikulum yang dikembangkan bersifat komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengembangan kurikulum sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar hasilnya lebih relevan dan aplikatif dalam dunia pendidikan.<sup>221</sup>

### 2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Setelah tim terbentuk, langkah berikutnya adalah pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan serta memastikan setiap anggota tim dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan perannya. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil kebijakan dan pengarah, wakil bidang kurikulum sebagai koordinator, sedangkan guru bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Dengan

---

<sup>220</sup> Aset Sugiana, 'Proses Pengembangan Organisasi Kurikulum Di Indonesia', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 12.1 (2018), pp. 91–103.

<sup>221</sup> Slameto, 'Pengembangan Pengorganisasian', 2012, pp. 1–14.

pembagian tugas yang terstruktur, proses pengembangan kurikulum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.<sup>222</sup>

### 3. Penyusunan Struktur Kurikulum

Pengorganisasian juga mencakup penyusunan struktur kurikulum yang meliputi pengaturan mata pelajaran, alokasi waktu, serta urutan penyampaian materi. Struktur kurikulum harus disusun secara sistematis dan logis agar peserta didik dapat memahami materi secara bertahap. Penyusunan ini umumnya mengacu pada standar nasional pendidikan serta disesuaikan dengan karakteristik lembaga pendidikan. Struktur yang baik akan mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran secara optimal.

### 4. Pengorganisasian Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran perlu diorganisasikan dengan baik agar mudah dipahami oleh peserta didik. Pengorganisasian ini dapat dilakukan berdasarkan pendekatan mata pelajaran, tematik, atau berbasis kompetensi. Dengan pengelompokan yang tepat, materi pembelajaran dapat disajikan secara runtut dan berkesinambungan, sehingga membantu peserta didik dalam membangun pemahaman yang utuh terhadap suatu konsep.

### 5. Pengelolaan Sumber Daya

Pengorganisasian kurikulum juga melibatkan pengelolaan berbagai sumber daya, seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana, media pembelajaran, serta waktu yang tersedia. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, setiap komponen harus direncanakan dan diorganisasikan secara matang agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.

---

<sup>222</sup> Slameto, 'Pengembangan Pengorganisasian'.

## 6. Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat menjadi aspek penting dalam pengorganisasian kurikulum. Melalui koordinasi yang baik, setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Komunikasi yang efektif juga membantu dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan kurikulum, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.<sup>223</sup>

## 7. Pengorganisasian dalam Perspektif POAC

Dalam perspektif manajemen, pengorganisasian merupakan bagian dari fungsi Organizing dalam konsep POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Fungsi ini berperan dalam menyusun struktur kerja dan mengatur berbagai sumber daya agar proses pelaksanaan kurikulum dapat berjalan secara terarah. Dengan pengorganisasian yang baik, setiap komponen dalam kurikulum dapat saling mendukung dan bekerja secara sinergis.

Pengorganisasian dalam pengembangan kurikulum merupakan proses penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen kurikulum dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi. Melalui pembentukan tim, pembagian tugas, penyusunan struktur kurikulum, serta pengelolaan sumber daya, kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, koordinasi yang baik antar pihak menjadi kunci keberhasilan dalam pengorganisasian kurikulum.

## F. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kurikulum merupakan tahap implementatif yang tidak hanya menjalankan kurikulum yang telah dirancang, tetapi juga menjadi proses aktualisasi dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan. Dalam tahap ini, kurikulum diuji dalam

---

<sup>223</sup> Aset Sugiana, 'PROSES PENGEMBANGAN ORGANISASI KURIKULUM DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA', 05.02 (2018), pp. 257–73.

praktik nyata sehingga memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik, kondisi lembaga, serta tuntutan perkembangan zaman. Hal ini ditegaskan oleh Huda (2017) bahwa implementasi kurikulum bertujuan agar program pendidikan berjalan optimal. Manajemen berperan memfasilitasi sarana fisik, sumber daya manusia, serta lingkungan kondusif guna menjamin keberlangsungan kurikulum.<sup>224</sup> Dengan demikian, pelaksanaan dalam konteks pengembangan kurikulum tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis karena menjadi ruang untuk mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum secara langsung.

Menurut E. Mulyasa dalam Suryani, dkk (2024) menyatakan bahwa implementasi pengembangan kurikulum tidak hanya berhubungan dengan penyampaian materi, akan tetapi juga meliputi pengelolaan pembelajaran yang efektif, termasuk strategi, metode, dan evaluasi yang terintegrasi.<sup>225</sup> Pada tingkatan sekolah, pelaksanaan pengembangan kurikulum berada di bawah kewajiban manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, akan tetapi juga mengarahkan pengembangan kurikulum sesuai dengan visi dan kebutuhan lembaga. Adapun bentuk pengembangan kurikulum meliputi:

1. Penyusunan kalender akademik yang adaptif terhadap program sekolah
2. Pengaturan jadwal pelajaran yang mendukung efektivitas pembelajaran
3. Pembagian tugas guru sesuai kompetensi dan kebutuhan kurikulum
4. Pengembangan program unggulan sebagai bentuk inovasi kurikulum.<sup>226</sup>

Dengan hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pada tingkat sekolah mampu menjadi bagian dari pengembangan kurikulum secara institusional. Seterusnya, pada tingkat kelas, guru berperan sebagai

---

<sup>224</sup> Huda, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum'.

<sup>225</sup> Puji Lestari, Abdul Asib, and Dewi Sri Wahyuni, 'The Implementation of School Curriculum in Teaching', *Journal Of Social Work and Science Education*, 5.2 (2024), pp. 157–68, doi:<https://doi.org/10.52690/jswse.v5i2.814>.

<sup>226</sup> Lestari, Asib, and Wahyuni, 'The Implementation of School Curriculum in Teaching'.

pelaksana dan juga berperan sebagai pengembang kurikulum. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, akan tetapi juga harus melakukan penyesuaian dan inovasi dalam pembelajaran.

Kegiatan yang dilaksanakan guru dalam pengembangan kurikulum dalam tingkatan kelas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses pembelajaran (intrakurikuler)
  - a. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler sebagai penunjang kurikulum.
  - b. Pelaksanaan bimbingan belajar untuk mengembangkan potensi siswa.

Adapun peran guru dalam konteks pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Pengembang metode pembelajaran
- b. Penyesuai materi dengan kebutuhan peserta didik
- c. Inovator dalam proses belajar.<sup>227</sup>

Maka dari itu, peran guru sebagai fasilitator sangat vital dalam implementasi dan pengembangan kurikulum, sebab guru menjadi aktor utama dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang nyata.

Adapun pelaksanaan pengembangan kurikulum tidak bersifat statis, melainkan harus adaptif terhadap kebutuhan. Hal ini terlihat dalam penyesuaian materi dengan perkembangan zaman, pengembangan strategi pembelajaran sesuai karakter siswa, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Nurkholis dan Santoso bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.<sup>228</sup>

Keberhasilan pelaksanaan pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kepemimpinan kepala sekolah,

---

<sup>227</sup> Suryani, Syarwani Ahmad, and Yenny Puspita, 'Implementation of Curriculum Management To Improve Teacher's Performance', *Journal of Social Work and Science Education*, 5.2 (2024), 771–84 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52690/jswse.v5i2.814>>.

<sup>228</sup> Nurkholis and Santoso, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum Berbasis Pesantren'.

berperan dalam mengarahkan kebijakan serta memastikan kurikulum berjalan secara sistematis, kompetensi guru, menentukan kualitas implementasi pembelajaran dan melakukan inovasi, sarana dan prasarana, sebagai penunjang utama agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal, kebutuhan peserta didik yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum agar tetap relevan dengan kondisi nyata.<sup>229</sup> Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penentu utama dalam keberhasilan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan.

## G. Evaluasi

Evaluasi pengembangan kurikulum tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi juga berlangsung selama proses pelaksanaan melalui kegiatan pemantauan. Dalam konteks ini, pemantauan menjadi bagian penting dari evaluasi karena berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis terkait implementasi kurikulum. Sebagaimana dinyatakan Dadang Suhardan, dkk dalam Nurul Huda (2017) bahwa monitoring kurikulum adalah proses penghimpunan data yang valid dan komprehensif terkait penerapan dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan perbaikan kurikulum.<sup>230</sup> Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi dalam pengembangan kurikulum bersifat berkelanjutan dan tidak terpisah dari proses pelaksanaan.

Lebih lanjut, pemantauan dilakukan agar pelaksanaan kurikulum tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Karenanya, penilaian tidak hanya berfungsi sebagai penilaian akhir, tetapi juga sebagai alat pengendalian untuk memastikan kurikulum tidak menyimpang dari rencana. Dalam praktiknya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam melakukan monitoring, karena melalui kegiatan tersebut dapat dihimpun dan dianalisis berbagai data yang digunakan untuk

---

<sup>229</sup> Anggi Anastasia Kinanti and Zuraidah Adlina, 'Evaluation of the Implementation of the Independent Curriculum in Mathematics Learning at SMA Negeri 5 Medan City', *MES: Journal of Mathematics Education and Science*, 10.1 (2024).

<sup>230</sup> Huda, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum'.

memperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman (Hamalik dalam Nurul Huda, 2017).<sup>231</sup> Dengan demikian, evaluasi dalam pengembangan kurikulum berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan yang lebih efektif.

Adapun aspek evaluasi melalui pemantauan kurikulum, pemantauan sebagai bagian dari evaluasi pengembangan kurikulum mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Peserta didik meliputi cara belajar, prestasi, motivasi, keaktifan, kreativitas, serta hambatan yang dihadapi
2. Tenaga pengajar mencakup tanggung jawab, kompetensi profesional, sosial, dan loyalitas
3. Media pembelajaran meliputi jenis media, penggunaan, serta pengelolaan dan pemeliharannya
4. Prosedur penilaian mencakup instrumen, pelaksanaan, dan pelaporan hasil belajar
5. Hasil lulusan meliputi kualitas, kategori, serta capaian kompetensi peserta didik.

Evaluasi melalui pemantauan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan, akan tetapi juga menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Artinya, data hasil pemantauan digunakan untuk:

- a. Memperbaiki kelemahan kurikulum
- b. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik
- c. Menyempurnakan desain kurikulum di masa depan.

---

<sup>231</sup> Huda, 'Manajemen Pengembangan Kurikulum'.

# **BAB VII**

## **PERENCANAAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN DALAM MANAJEMEN KURIKULUM**

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, manajemen kurikulum memiliki peranan yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengaturan dan pengelolaan seluruh komponen pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil belajar peserta didik.

Perencanaan pembelajaran adalah salah satu tahapan paling krusial dalam proses pendidikan. Tanpa perencanaan yang matang, proses pembelajaran cenderung berjalan tidak terarah dan tidak efektif. Menurut Hamalik (2007), perencanaan pembelajaran merupakan suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guru sebagai pelaksana kurikulum dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyusun rencana pembelajaran yang sistematis, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.<sup>232</sup>

Di sisi lain, asesmen atau penilaian pembelajaran merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembelajaran. Asesmen berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam paradigma pendidikan modern, asesmen tidak hanya dipandang sebagai alat pengukur hasil akhir (sumatif), tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran itu sendiri (formatif). Pergeseran paradigma ini membawa implikasi besar terhadap cara guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.

Dalam kerangka manajemen kurikulum, perencanaan pembelajaran dan asesmen harus dirancang secara terpadu dan saling mendukung. Manajemen kurikulum yang baik akan memastikan bahwa setiap elemen pembelajaran, dari tujuan, materi, metode, hingga penilaian, terorganisasi dengan baik dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perencanaan

---

<sup>232</sup> Hamalik, "Manajemen Pengembangan Kurikulum."

pembelajaran dan asesmen dalam konteks manajemen kurikulum sangat diperlukan oleh para calon pendidik dan pengelola pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini disusun untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai konsep, komponen, dan implementasi perencanaan pembelajaran serta asesmen dalam konteks manajemen kurikulum, sehingga mahasiswa dapat memahami dan menerapkannya dalam praktik pendidikan nyata.

## **B. Konsep dan Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah**

### **1. Pengertian Manajemen Kurikulum**

Secara etimologi, kata "manajemen" berasal dari bahasa Latin, yaitu "manus" yang berarti tangan, dan "agere" yang berarti melakukan. Dalam perkembangannya, kata ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi "*management*" yang kemudian diartikan sebagai pengelolaan atau pengurusan.<sup>233</sup> Sementara itu, kurikulum berasal dari bahasa Latin "*curriculum*" yang berarti "jalan" atau "lintasan". Dalam konteks pendidikan, kurikulum dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>234</sup>

Manajemen kurikulum dapat didefinisikan sebagai segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.<sup>235</sup> Senada dengan hal tersebut, Hamalik mendefinisikan manajemen kurikulum sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang dilaksanakan secara kooperatif,

---

<sup>233</sup> Terry and Rue, "Principios Adm."

<sup>234</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

<sup>235</sup> Triwoelandari et al., "MANAJEMEN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN SD SOLIHUDDIN SCHOOL THAILAND Noerlitasari, Retno Triwoelandari, Muhammad Fahri."

komprehensif, dan sistematis demi tercapainya tujuan kurikulum yang telah ditetapkan.<sup>236</sup>

Menurut Dakir manajemen kurikulum adalah seluruh usaha yang disengaja dan terencana untuk membimbing peserta didik agar mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lebih lanjut, Nasbi menyatakan bahwa manajemen kurikulum merupakan proses pengelolaan kurikulum yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

## 2. Fungsi Manajemen Kurikulum

Sebagai bagian dari sistem manajemen pendidikan, manajemen kurikulum memiliki sejumlah fungsi yang esensial. Rusman (2012) mengidentifikasi fungsi manajemen kurikulum sebagai berikut:<sup>237</sup>

### a. Fungsi Perencanaan (*Planning*).

Fungsi perencanaan dalam manajemen kurikulum mencakup kegiatan menyusun tujuan, menetapkan isi dan bahan ajar, serta merumuskan strategi pembelajaran. Perencanaan kurikulum merupakan langkah awal yang menentukan arah seluruh proses pendidikan. Menurut Tyler (1949),<sup>238</sup> perencanaan kurikulum yang baik harus menjawab empat pertanyaan pokok: tujuan apa yang ingin dicapai, pengalaman belajar apa yang perlu disediakan, bagaimana pengalaman belajar diorganisasikan, dan bagaimana menentukan apakah tujuan telah tercapai.

### b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*).

Fungsi pengorganisasian menyangkut penetapan struktur tugas dan wewenang dalam pengelolaan kurikulum, serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam konteks ini, kepala sekolah

---

<sup>236</sup> Hamalik, "Manajemen Pengembangan Kurikulum."

<sup>237</sup> Syahfitri et al., "Manajemen Kurikulum."

<sup>238</sup> Tyler and Hlebowitsh, *Basic Principles of Curriculum and Instruction*.

berperan sebagai manajer kurikulum yang bertanggung jawab mengorganisasikan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum.<sup>239</sup>

c. Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*).

Fungsi pelaksanaan berkaitan dengan implementasi kurikulum di kelas melalui kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum merupakan inti dari kegiatan pendidikan karena pada tahap inilah kurikulum yang telah direncanakan diwujudkan dalam bentuk interaksi nyata antara guru dan peserta didik.<sup>240</sup>

d. Fungsi Pengendalian (*Controlling*).

Fungsi pengendalian mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan. Pengendalian kurikulum bertujuan untuk menjamin mutu dan relevansi kurikulum secara berkelanjutan.<sup>241</sup>

3. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Ruang lingkup manajemen kurikulum mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan. Menurut Rusman (2012), ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi:<sup>242</sup>

a. Manajemen Perencanaan Kurikulum

Manajemen perencanaan kurikulum adalah proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang sistematis. Pada tingkat satuan pendidikan, perencanaan kurikulum diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) sesuai kebijakan yang berlaku atau dokumen kurikulum

---

<sup>239</sup> Syahfitri et al., "Manajemen Kurikulum."

<sup>240</sup> Mulyasa, *Management and Leadership of Madrasah Principals*.

<sup>241</sup> Hamalik, "Manajemen Pengembangan Kurikulum."

<sup>242</sup> Dian, *Manajemen Pendidikan*.

lainnya sesuai kebijakan yang berlaku. Perencanaan ini mencakup penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, program pembelajaran, kalender akademik, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).<sup>243</sup>

b. Manajemen Pelaksanaan Kurikulum

Manajemen pelaksanaan kurikulum berkaitan dengan implementasi kurikulum yang telah direncanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, kemampuan kepala sekolah dalam kepemimpinan instruksional, serta dukungan fasilitas dan sumber belajar yang memadai.<sup>244</sup>

c. Manajemen Evaluasi Kurikulum

Manajemen evaluasi kurikulum mencakup kegiatan penilaian terhadap program kurikulum secara keseluruhan maupun komponen-komponen spesifiknya. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang perbaikan dan pengembangan kurikulum.<sup>245</sup>

d. Manajemen Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum. Dakir mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum perlu mempertimbangkan berbagai landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>243</sup> Mulyasa, *Management and Leadership of Madrasah Principals*.

<sup>244</sup> Mulyasa.

<sup>245</sup> Stufflebeam and Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications*.

### **C. Prinsip-Prinsip Manajemen Kurikulum**

Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum berpedoman pada sejumlah prinsip. Rusman mengemukakan beberapa prinsip manajemen kurikulum sebagai berikut:

1. Produktivitas: hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi: pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan sasaran kurikulum pada posisi yang seharusnya.
3. Kooperatif: untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas dan efisiensi: Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan ketepatan waktu, tenaga, dan anggaran untuk mencapai tujuan kurikulum secara optimal.
5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan: Seluruh proses pengelolaan kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan institusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

### **D. Manajemen Perubahan Kurikulum Kontemporer Makro Perspektif Manajer Pendidikan**

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, manajemen kurikulum tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif yang biasa-biasa saja (*business as usual*). Seorang manajer pendidikan wajib berpikir kritis dalam merespons dinamika perubahan zaman. Kebijakan transformasi kurikulum yang digulirkan oleh Kemendikbudristek pada dasarnya membawa misi penting dalam hal digitalisasi pendidikan. Hal ini ditandai dengan integrasi platform digital (seperti Platform Merdeka Mengajar/PMM), penyediaan perangkat *Chromebook*, hingga orientasi pasar kerja masa depan yang menuntut kemandirian teknologi serta

meminimalisasi pekerjaan fisik secara manual. Namun, dalam perspektif manajemen makro, seorang manajer kurikulum tidak bisa menutup mata terhadap tantangan nyata (kesenjangan) yang dihadapi di lapangan:

Akselerasi Kompetensi Pendidik: Perubahan kurikulum sering kali berjalan jauh lebih cepat daripada proses adaptasi para guru. Keberadaan program Guru Penggerak maupun Sekolah Penggerak menuntut manajemen kurikulum di sekolah untuk mampu mendistribusikan praktik baik tersebut secara merata, agar perubahan kurikulum tidak dipandang sebagai beban yang menyulitkan guru, melainkan sebuah transformasi kenyamanan belajar.

#### **E. Prosedur Perencanaan Pembelajaran dalam Manajemen Kurikulum**

##### **1. Pengertian Perencanaan Pembelajaran**

Perencanaan pembelajaran merupakan proses sistematis dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajar. Menurut Majid (2011), perencanaan pembelajaran adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen kurikulum, perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran operasional dari kurikulum yang berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Ibrahim & Syaodih (2010) mendefinisikan perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses pemikiran sebelum pelaksanaan pembelajaran yang mencakup pemilihan metode, pendekatan, media, dan sumber belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran yang baik akan menjadi blueprint bagi guru dalam mengelola kelas dan mengarahkan aktivitas belajar peserta didik.

##### **2. Komponen Perencanaan Pembelajaran**

Berdasarkan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, perencanaan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk dokumen operasional yang sistematis. Dalam Kurikulum 2013, dokumen tersebut

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Komponennya meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran/tema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup), serta penilaian.

Berdasarkan Permendikbud No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, perencanaan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

**F. Komponen-komponen RPP menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2016 meliputi:**

Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahap pendahuluan, inti, dan penutup; serta

1. Penilaian hasil pembelajaran.

Dalam Kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran mengalami transformasi menjadi lebih fleksibel melalui penggunaan Modul Ajar. Modul ajar tidak lagi kaku, melainkan dikembangkan secara kontekstual berdasarkan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang diturunkan langsung dari Capaian Pembelajaran (CP). Komponen modul ajar secara garis besar mencakup Informasi Umum (identitas, kompetensi awal, Profil Pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran), Komponen Inti (tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, refleksi), dan Lampiran.

2. *Prosedur Penyusunan Rencana Pembelajaran Sebelum Masuk Kelas (Pre-Instructional)*

Sebelum proses interaksi tatap muka di dalam kelas dimulai, fungsi perencanaan makro dalam manajemen kurikulum mengharuskan guru menyusun desain instruksional yang matang. Tahapan prosedural yang harus dilewati meliputi:

*Analisis Dokumen Kurikulum:*<sup>246</sup> Menganalisis target kompetensi utama (analisis KI-KD pada Kurikulum 2013 atau analisis Capaian Pembelajaran/CP pada Kurikulum Merdeka) guna memetakan arah kompetensi akhir yang dituju.

*Pengembangan Materi Berbasis Capaian:*<sup>247</sup> Menyusun bahan ajar tidak sekadar berfokus pada penyelesaian kuantitas lembar materi buku, melainkan berorientasi pada pencapaian sub-kompetensi (sub-capaian) pembelajaran..

*Penentuan Model Pembelajaran Berorientasi Siswa:* Memilih model pembelajaran abad 21 yang memicu keaktifan siswa, seperti *Problem-Based Learning (PBL)*, *Project-Based Learning (PjBL)*, maupun *Discovery Learning*.

3. *Perencanaan Asesmen Pendahuluan (Asesmen Awal/Diagnostik)*

Salah satu poin paling krusial dalam prosedur perencanaan sebelum masuk kelas (*pre-instructional*) adalah merancang Asesmen Pendahuluan. Langkah ini sering kali terlewatkan karena fokus guru cenderung langsung melompat pada tahap kegiatan pendahuluan di kelas. Asesmen pendahuluan dirancang bukan untuk memberikan bobot nilai rapor (skor akademis), melainkan sebagai sarana menjajaki dan memetakan profil serta kesiapan (*readiness*) peserta didik. Wakil

---

<sup>246</sup> Dr. Wina Sanjaya, *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*.

<sup>247</sup> Rindaningsih, *Buku Ajar Mata Kuliah*.

Kepala kurikulum harus mengarahkan guru untuk menyusun indikator-indikator asesmen awal yang mencakup tiga dimensi strategis:

**Penguasaan Pengetahuan Dasar (Kognitif):** Mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik terhadap materi prasyarat. Melalui data ini, guru dapat mengambil keputusan manajerial di kelas, apakah harus melakukan strategi penguatan dasar terlebih dahulu atau bisa langsung masuk ke materi inti.

**Status Sosial dan Ekonomi Keluarga:** Memetakan kondisi latar belakang ekonomi serta bagaimana pola pengambilan keputusan sehari-hari di dalam keluarga dalam memfasilitasi kebutuhan belajar anak di rumah.

**Budaya Sosial di dalam Keluarga dan Lingkungan Masyarakat:** Mengidentifikasi kebiasaan, adat, serta nilai sosial yang dianut di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Pemahaman terhadap aspek budaya sosial ini sangat penting agar model pembelajaran yang dibawa oleh guru tidak kontradiktif dengan realitas kehidupan siswa sehari-hari, sekaligus mencegah timbulnya sikap apatis anak terhadap aktivitas sekolah.

#### 4. Perencanaan Pembelajaran dalam Konteks Kurikulum Merdeka

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk Modul Ajar yang menggantikan RPP. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran (ATP) (Kemendikbudristek, 2022).

Modul ajar dalam Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dibandingkan RPP pada kurikulum sebelumnya. Guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Komponen-komponen modul ajar

mencakup informasi umum (identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran), komponen inti (tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi), dan lampiran (lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, glosarium, daftar pustaka) (Kemendikbudristek, 2022).

## **G. Prosedur Pengelolaan Asesmen dalam Manajemen Kurikulum Pendidikan**

### **1. Pengertian Asesmen dalam Manajemen Kurikulum**

Asesmen merupakan proses sistematis yang tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dalam konteks kebijakan terbaru, asesmen didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, serta capaian hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan.<sup>248</sup> Dalam manajemen kurikulum, asesmen berfungsi sebagai sarana pengendalian mutu sekaligus sebagai dasar pengembangan pembelajaran yang lebih efektif, bukan sekadar memproduksi angka-angka penilaian di akhir semester..

Menurut Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield, asesmen dipandang sebagai proses sistematis untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan pendidikan.<sup>249</sup> Sementara itu, W. James Popham menekankan bahwa asesmen harus menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar menghasilkan nilai.<sup>250</sup> Artinya manajemen kurikulum, asesmen berfungsi sebagai sarana pengendalian

---

<sup>248</sup> Pendidikan, Dasar, and Lembaran, PEMENDIKBUD NOMOR 21.

<sup>249</sup> Stufflebeam and Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications*.

<sup>250</sup> Popham, *Test Better, Teach Better: The Instructional Role of Assessment*.

mutu sekaligus sebagai dasar pengembangan pembelajaran yang lebih efektif.

## 2. Fungsi dan Tujuan Asesmen

Asesmen dalam pembelajaran memiliki berbagai fungsi strategis yang tidak hanya berorientasi pada pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Fungsi-fungsi asesmen tersebut dapat dipahami secara komprehensif melalui integrasi pandangan beberapa ahli.

Secara umum, asesmen berfungsi sebagai alat formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Fungsi formatif berkaitan dengan penggunaan asesmen sebagai umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui asesmen formatif, guru dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik sehingga dapat melakukan perbaikan strategi pembelajaran secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Paul Black dan Dylan Wiliam yang menegaskan bahwa asesmen formatif merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran karena memberikan umpan balik yang langsung dan bermakna bagi peserta didik.<sup>251</sup>

Menurut Kunandar (2013), asesmen dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi dan tujuan, di antaranya:<sup>252</sup>

Fungsi formatif: asesmen digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Fungsi sumatif: asesmen digunakan untuk menentukan nilai dan prestasi belajar peserta didik. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir

---

<sup>251</sup> Black et al., *Assessment and Classroom Learning Assessment and Classroom Learning*.

<sup>252</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik*.

suatu periode pembelajaran (akhir semester, akhir tahun pelajaran) untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan.

Fungsi diagnostik: asesmen digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Fungsi penempatan: asesmen digunakan untuk menempatkan peserta didik pada program pembelajaran yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya

#### Penjaminan Evaluasi Luaran Kompetensi Abad 21

Manajemen kurikulum modern dituntut untuk melahirkan profil peserta didik yang memiliki kecakapan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Target luaran dari implementasi proses kurikulum ini harus bermuara pada pembentukan karakter siswa yang Kritis, Kreatif, Inovatif, dan Komunikatif. Guna memastikan ketercapaian luaran kompetensi tersebut, manajer kurikulum wajib menetapkan sistem penjaminan evaluasi yang ketat melalui tahapan berikut:

Penyusunan Instrumen Evaluasi: Guru tidak boleh hanya mengandalkan instrumen tes konvensional (pilihan ganda tertulis). Instrumen harus dikembangkan dalam bentuk lembar penilaian kinerja (performance assessment), rubrik penilaian produk kreatif, lembar observasi nalar kritis, dan penilaian portofolio.

Analisis Evaluasi secara Berkala: Melakukan analisis terhadap data evaluasi yang masuk untuk mengukur efektivitas metode mengajar guru. Jika instrumen menunjukkan nalar kritis siswa belum berkembang, maka manajer kurikulum berhak memberikan rekomendasi perbaikan strategi instruksional.

Pengambilan Kesimpulan Manajerial: Hasil analisis evaluasi digunakan oleh kepala sekolah dan tim kurikulum sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, baik untuk program pelatihan guru,

restrukturisasi jadwal, maupun pengadaan media berbasis teknologi penunjang kreativitas

### 3. Prinsip-Prinsip Asesmen

Permendikbud No. 21 Tahun 2022 menetapkan bahwa asesmen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Prinsip-prinsip asesmen dalam Kurikulum Merdeka pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari prinsip-prinsip sebelumnya, dengan penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bersifat reflektif. Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Valid (sahih)

Asesmen harus didasarkan pada data yang benar-benar mencerminkan kemampuan yang diukur. Validitas menjadi aspek utama agar hasil penilaian dapat menggambarkan capaian belajar peserta didik secara akurat

#### b. Objektif

Pelaksanaan asesmen harus menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, sehingga mengurangi subjektivitas penilai. Objektivitas penting untuk menjamin keadilan dalam penilaian.

#### c. Adil dan inklusif

Asesmen harus memperhatikan keberagaman peserta didik tanpa diskriminasi. Penilaian tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak tertentu berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, maupun kondisi khusus peserta didik.

#### d. Terpadu

Asesmen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan belajar, bukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.

e. Transparan (terbuka)

Kriteria, prosedur, dan hasil asesmen harus dapat diketahui oleh peserta didik dan pihak terkait. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan serta pemahaman terhadap proses penilaian.

f. Menyeluruh dan berkelanjutan

Asesmen dilakukan secara komprehensif dengan mencakup seluruh aspek kompetensi, serta dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan peserta didik.

g. Sistematis

Asesmen dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan mengikuti prosedur yang jelas agar menghasilkan data yang dapat dipercaya.

h. Beracuan kriteria

Penilaian didasarkan pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, bukan pada perbandingan antar peserta didik. Hal ini mendukung pembelajaran yang lebih adil dan berorientasi pada penguasaan kompetensi.

i. Akuntabel

Hasil asesmen harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun administratif kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

j. Edukatif

Asesmen harus memberikan manfaat bagi pembelajaran, terutama dalam bentuk umpan balik yang membantu peserta didik memperbaiki dan mengembangkan kemampuannya.

#### k. Jenis, Teknik, dan Prosedur Pengelolaan Asesmen

Secara umum, tata kelola asesmen dalam manajemen kurikulum dibagi berdasarkan fungsi dan pendekatannya. Berdasarkan fungsinya, terdapat fungsi formatif (umpan balik perbaikan proses) dan sumatif (pengukuran capaian akhir periode). Berdasarkan pendekatannya, Kunandar (2013) membagi penilaian menjadi asesmen konvensional (tes tertulis) dan asesmen autentik (*authentic assessment*) yang menuntut peserta didik menampilkan performa pada situasi riil, meliputi teknik observasi, penilaian kinerja, portofolio, proyek, penilaian diri (*self-assessment*), dan penilaian antarpeserta didik (*peer assessment*).<sup>253</sup>

#### 4. Prosedur Pengelolaan Asesmen

Pengelolaan asesmen dalam manajemen kurikulum mencakup beberapa tahapan yang harus dilaksanakan secara sistematis. Berdasarkan Permendikbud No. 21 Tahun 2022, prosedur pengelolaan asesmen meliputi:<sup>254</sup>

Pertama, perencanaan asesmen. Pada tahap ini, guru merumuskan tujuan asesmen yang selaras dengan capaian pembelajaran, menentukan bentuk asesmen (diagnostik, formatif, dan sumatif), memilih teknik serta instrumen yang relevan, menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, serta menyusun alur dan jadwal pelaksanaan asesmen. Dalam Kurikulum Merdeka, perencanaan asesmen menekankan fleksibilitas dan keberpihakan pada peserta didik, sehingga asesmen dirancang untuk mendukung proses belajar, bukan sekadar mengukur hasil akhir.

Kedua, pengembangan instrumen asesmen. Instrumen yang digunakan harus valid, reliabel, dan sesuai dengan karakteristik

---

<sup>253</sup> Kunandar.

<sup>254</sup> Pendidikan, Dasar, and Lembaran, PEMENDIKBUD NOMOR 21.

kompetensi yang diukur. Pengembangan instrumen mencakup langkah-langkah: (a) menetapkan tujuan asesmen; (b) menyusun kisi-kisi berbasis capaian pembelajaran; (c) mengembangkan butir instrumen; (d) melakukan telaah dan validasi; serta (e) merevisi instrumen berdasarkan hasil uji coba terbatas jika diperlukan. Pada pendekatan terbaru, instrumen tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga mencakup penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan observasi.<sup>255</sup>

Ketiga, pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan asesmen dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif dilaksanakan selama proses belajar untuk memberikan umpan balik, sedangkan asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menentukan ketercapaian tujuan. Guru perlu menciptakan suasana yang kondusif agar peserta didik dapat menunjukkan kompetensi secara optimal tanpa tekanan yang berlebihan.<sup>256</sup>

Keempat, pengolahan dan analisis hasil asesmen. Data hasil asesmen diolah secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan jenis asesmen yang digunakan. Analisis hasil asesmen bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik, mengidentifikasi kesulitan belajar, serta mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam Kurikulum Merdeka, analisis lebih menekankan pada deskripsi capaian belajar daripada sekadar angka.<sup>257</sup>

Kelima, interpretasi dan tindak lanjut hasil asesmen. Hasil asesmen diinterpretasikan untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan intervensi berupa pembelajaran remedial, sedangkan peserta

---

<sup>255</sup> Popham, *Test Better, Teach Better: The Instructional Role of Assessment*.

<sup>256</sup> Mulyasa, *Management and Leadership of Madrasah Principals*.

<sup>257</sup> Kunandar, *Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik*.

didik yang telah mencapai atau melampaui target diberikan pengayaan. Selain itu, hasil asesmen juga digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran guru pada pertemuan berikutnya.<sup>258</sup>

Keenam, pelaporan hasil asesmen. Pelaporan hasil belajar dilakukan secara informatif, transparan, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Dalam Kurikulum Merdeka, laporan hasil belajar tidak hanya berupa angka, tetapi juga dilengkapi dengan deskripsi capaian kompetensi. Pelaporan disampaikan kepada peserta didik dan orang tua/wali sebagai bentuk akuntabilitas dan komunikasi pendidikan.<sup>259</sup>

#### 5. Pengelolaan Assesmen dalam Kurikulum Merdeka

Dalam Kurikulum Merdeka, paradigma asesmen mengalami perubahan signifikan. Kemendikbudristek (2022) menegaskan bahwa asesmen dalam Kurikulum Merdeka berorientasi pada:<sup>260</sup>

Asesmen sebagai proses pembelajaran (*assessment as learning*): peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses asesmen sehingga mereka dapat merefleksikan dan memonitor perkembangan belajar mereka sendiri.

Asesmen untuk pembelajaran (*assessment for learning*): asesmen digunakan untuk memberikan umpan balik yang bermakna bagi guru dalam merencanakan dan menyesuaikan pembelajaran.

Asesmen dari pembelajaran (*assessment of learning*): asesmen digunakan untuk mengukur dan melaporkan capaian belajar peserta didik setelah melalui proses pembelajaran.

Dalam Kurikulum Merdeka, terdapat dua jenis asesmen yang dikelola secara sistematis, yaitu asesmen formatif yang dilakukan

---

<sup>258</sup> Pendidikan and Dan, Pembelajaran dan Asesmen.

<sup>259</sup> Pendidikan, Dasar, and Lembaran, PEMENDIKBUD NOMOR 21.

<sup>260</sup> Pendidikan and Dan, Pembelajaran dan Asesmen.

selama proses pembelajaran dan asesmen sumatif yang dilakukan pada akhir unit pembelajaran. Asesmen sumatif di akhir semester berfungsi untuk mengonfirmasi capaian belajar peserta didik, sebagai bahan laporan hasil belajar, dan sebagai bahan evaluasi kualitas pembelajaran.

#### 6. Pengelolaan Asesmen Struktur Proyek: P5 dan PPRA

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan (termasuk pada jenjang madrasah di bawah naungan Kementerian Agama), struktur kurikulum dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan intrakurikuler (mata pelajaran) dan kokurikuler berupa proyek penguatan karakter. Proyek tersebut diwujudkan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (PPRA). Dalam kerangka manajemen kurikulum, perencanaan dan pengelolaan evaluasi struktur proyek ini didasarkan pada tiga model teori pengorganisasian:

Sistem evaluasi dan asesmen untuk P5 dan PPRA diatur melalui tata kelola dan instrumen yang tersendiri (terpisah dari nilai akademik). Asesmen proyek ini berfokus pada penilaian proses pembentukan karakter (afektif dan psikomotorik) melalui lembar observasi berkala, jurnal pendidik, dan penilaian diri. Hasil capaian akhir proyek tidak dilaporkan dalam bentuk angka kuantitatif (0–100), melainkan menggunakan kategori deskriptif tahap perkembangan, yaitu: Mulai Berkembang (MB), Sedang Berkembang (SB), Berkembang Sesuai Harapan (BSH), dan Sangat Berkembang (SAB). Laporan ini dituangkan dalam dokumen khusus berupa Rapor Proyek yang dikumpulkan terpisah dari rapor penilaian mata pelajaran.

# **BAB VIII**

**MANAJEMEN KURIKULUM DI PENDIDIKAN  
DASAR DAN MENENGAH: ANALISIS JENIS  
KURIKULUM DAN PERENCANAAN  
PROGRAM PEMBELAJARAN**

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk individu yang mampu menghadapi tantangan global di era modern. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan pembelajaran telah mengalami transformasi signifikan dengan berkembangnya teknologi, penelitian pendidikan, dan kebutuhan siswa untuk memahami konsep secara lebih mendalam. Dalam penyelenggaraan Pendidikan, kurikulum menjadi komponen utama yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum mengatur tujuan, isi, serta proses pembelajaran hingga kegiatan Pendidikan dapat berjalan secara terarah dan sistematis.<sup>261</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>262</sup> Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kurikulum bersifat fleksibel dan harus terus dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta relevan dengan tuntutan zaman. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan Pendidikan yang mereka butuhkan di era digital ini. Beberapa kurikulum yang pernah ditetapkan di Indonesia antara lain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka serta pendekatannya. Perubahan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di era modern.<sup>263</sup>

Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan ilmiah dan pembelajaran berbasis aktivitas, sedangkan kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas pada satuan Pendidikan untuk menyelesaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta

---

<sup>261</sup> Karakteristik Kurikulum Kbk et al., “Karakteristik Kurikulum Kbk, Ktsp, K13 Dan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Tingkat Smp Dan Sederajat” 4, no. 1 (2024): 58–68.

<sup>262</sup> Kurikulum Dan and Kurikulum Merdeka, “Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Jenjang Sma” 1, no. 2 (2023): 77–82.

<sup>263</sup> Studi Analisis and Kebijakan Pengembangan, “SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA,” 2013.

didik.<sup>264</sup> Perbedaan kurikulum ini dapat dikatakan menunjukkan bahwa kurikulum terus berkembang untuk menjawab tantangan Pendidikan yang semakin kompleks. Meskipun demikian, keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya ditentukan oleh desainnya, akan tetapi ditentukan oleh bagaimana kurikulum tersebut dikelola. Manajemen kurikulum menjadi aspek penting dalam mencakup perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembelajaran<sup>265</sup>.

Dalam praktiknya, implementasi kurikulum masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu tantangan utamanya yaitu kurangnya pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang terus mengalami perubahan. Sementara itu, perkembangan Pendidikan saat ini mengarah pada pembelajaran mendalam melalui konsep deep learning yang menekankan pada pemahaman, berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata.<sup>266</sup> Serta Kurikulum Berbasis Cinta yang menekankan pada pendekatan humanis melalui empati, kasih sayang, dan penghargaan terhadap peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan bermakna. Kedua pendekatan ini mendukung pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan tetapi juga focus pada penguatan karakter.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa manajemen kurikulum memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dengan pemahaman yang baik terhadap manajemen kurikulum, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, sistematis, dan mampu meningkatkan kualitas Pendidikan secara menyeluruh.

---

<sup>264</sup> Ag Hamdan Syukril Imama, Ikhwan Fadhilah, Ilham Maulana An-Nafi'i, MambaulNgadimah, M, "PERBANDINGAN KURIKULUM DI INDONESIA: KURIKULUM 2013 (K13) DENGAN KURIKULUM MERDEKA" 2013 (2025): 141–67.

<sup>265</sup> Andi Ulfah Khuzaimah, Mukti Ali, and Nurul Kami Sani, "Transformasi Kurikulum Fisika Di Indonesia : Kajian Dari KTSP Hingga Kurikulum Merdeka Transformation of Physics Curriculum ... Transformation of Physics Curriculum ..." 13, no. 1 (2025): 47–56, <https://doi.org/10.24252/jpf.v13i1.57597>.

<sup>266</sup> Aria Nur Akmal et al., "Pemahaman Deep Learning Dalam Pendidikan : Analisis Literatur Melalui Metode Systematic Literature Review ( SLR )" 8 (2025).

## **B. Kurikulum yang diterapkan di Pendidikan Dasar dan Menengah**

### **1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang dilaksanakan di masing-masing satuan Pendidikan di Indonesia. Secara yudiris KTSP diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun dalam pengembangannya diserahkan kepada sekolah itu sendiri. Hal ini dilakukan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL.<sup>267</sup>

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat: 1) Kerangka dasar

---

<sup>267</sup> Loeziana Uce, "REALITAS AKTUAL PRAKSIS KURIKULUM : Analisis Terhadap KBK , KTSP Dan Kurikulum 2013 Loeziana Uce" 16, no. 2 (2016): 216–29.

dan struktur kurikulum; 2) Beban belajar; 3) kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan; dan 4) kalender pendidikan.<sup>268</sup>

SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; 2) Beragam dan terpadu; 3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; 5) menyeluruh dan berkesinambungan; 5) Belajar sepanjang hayat; dan 6) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah<sup>269</sup>.

Kesiapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di sekolah ditandai dengan terselesaikan dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum memuat minimal rasionalitas, struktur kurikulum, muatan lokal pengembangan diri, ketuntasan belajar dan kalender pendidikan, serta dilampiri dengan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dokumen ini menjadi penting tatkala penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah sebagai bagian dari komponen yang menjadi penilaian dan juga untuk kebutuhan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).<sup>270</sup>

---

<sup>268</sup> “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2005 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah,” 2006.

<sup>269</sup> “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2005 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.”

<sup>270</sup> Uce, “REALITAS AKTUAL PRAKSIS KURIKULUM : Analisis Terhadap KBK , KTSP Dan Kurikulum 2013 Loeziana Uce.”

## 2. Kurikulum 2013 (Kurtilas)

Dalam dinamika kurikulum setidaknya ada dua tuntutan untuk mencapai SDM yang kompeten. Pertama, perkembangan dunia global yang meliputi persoalan akademik, industri dan sosial budaya. Dan kedua, perubahan kebutuhan yang tersangkut dengannya persoalan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Semua komponen itu dicapai melalui pengembangan kurikulum dengan landasan pedagogi dan psikologi untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompentensi.<sup>271</sup>

Sebagai advokasi kenapa kurikulum berubah dialamatkan pada keharusan memenuhi tantangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Tekanan perubahan kurikulum itu disebabkan oleh: 1) Dunia berubah dengan cepat; 2) Tuntutan masyarakat berubah; 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni; 4) Partisipasi dalam era global; 5) Persaingan kemampuan Sumber Daya Manusia; serta 6) Peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Dalam kurikulum 2013 pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, akan tetapi pada kurikulum ini mencakup 3 aspek yaitu aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Kurtilas memuat mata pelajaran dari kompetensi yang ingin dicapai peserta didik. Sementara KTSP menurunkan kompetensi dari mata pelajaran. Implementasi kurtilas terlihat pada pusat pembelajaran yang terpusat pada aktivitas siswa. Maka dari itu pembelajaran lebih interaktif.<sup>272</sup>

Dalam kurtilas digunakan pendekatan saintifik meliputi:

- a. Materi pembelajaran didasarkan pada keadaan nyata atau fenomena yang masih bisa dijelaskan secara logika.

---

<sup>271</sup> Uce.

<sup>272</sup> D A N Keterampilan Siswa, "IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 DALAM MENINGKATKAN MUTU PENGETAHUAN, SIKAP, DAN KETERAMPILAN SISWA," 2013, 29–43, <https://doi.org/10.30868/im.v3i01.649>.

- b. Penjelasan guru, respon siswa, serta interaksi guru-siswa mengacu pada akidah tetap tanpa terkaan.
- c. Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan masalah.
- d. Berbasis pada konsep teori dan fakta empiris.
- e. Penyajian tujuan pembelajaran dikemas dengan menarik.

Kegiatan siswa dalam kurtilas lebih cenderung untuk mencaritahu sebuah konsep ilmu tidak lagi menunggu datangnya ilmu. Dengan kata lain siswa dituntut untuk mandiri dalam hal mencari informasi.<sup>273</sup> Pengembangan Kurikulum 2013, dikaitkan dengan kesinambungan KBK 2004, KTSP 2006, dan Kurikulum 2013, Prosedur Penyusunan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 yang mengkaitkan dengan yang diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan Baru, SK-KD Lama mata pelajaran per kelas (KTSP 2006), dievaluasi dengan mempertahankan SK-KD lama yang sesuai dengan SKL Baru Merevisi SK KD lama disesuaikan dengan SKL baru dan menyusun SK-KD Baru.

Tema kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Perbedaan esensial kurikulum SD antara lain bahwa tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda. Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama (saintifik) melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar.<sup>274</sup>

---

<sup>273</sup> Siswa.

<sup>274</sup> Uce, "REALITAS AKTUAL PRAKSIS KURIKULUM : Analisis Terhadap KBK , KTSP Dan Kurikulum 2013 Loeziana Uce."Universitas Dwijendra and Universitas Pendidikan Ganesha, "ANALISIS KURIKULUM MERDEKA DAN PLATFORM" 8 (2022): 238–44.

### 3. Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka dirancang untuk mengejar ketertinggalan didalam literasi dan numerasi. Kurikulum merdeka yang akan memberikan solusi untuk penyempurnaan kurikulum, ini dapat dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sekolah masing-masing.<sup>275</sup> Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan tersebut yakni kurikulum lebih sederhana dan mendalam.<sup>276</sup> Pada Kurikulum Merdeka, pembelajaran menitik beratkan pada pengetahuan yang esensial dan pengembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan fasenya. Pembelajaran yang lebih dalam, bermakna, tidak tergesa-gesa dan menyenangkan. Keunggulan kedua adalah lebih merdeka. Seperti pada tingkat SMA tidak ada lagi program peminatan, peserta didik menentukan mata pelajaran yang diminati, sesuai bakat dan aspirasinya.

Untuk guru dalam kegiatan mengajar dapat melaksanakan pengajaran sesuai penilaian terhadap jenjang capaian dan perkembangan peserta didik. Untuk sekolah pada penerapan kurikulum merdeka ini diberikan wewenang dalam pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta proses belajar-mengajar yang disesuaikan dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan yang ketiga yakni lebih relevan, dan interaktif. Dalam hal ini pembelajaran lebih banyak dilakukan melalui pengerjaan proyek dan diberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk secara aktif bereksplorasi, menggali dan menggambarkan isu-isu aktual seperti isu lingkungan, ekonomi sirkular, sanitasi dan sebagainya untuk menumbuhkan kemampuan *critical thinking*, *crenness* dan *complex problem solving* sebagai bentuk perkembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.

---

<sup>275</sup> Dwijendra and Ganesha, "ANALISIS KURIKULUM MERDEKA DAN PLATFORM."

<sup>276</sup> Dwijendra and Ganesha.

Kurikulum Merdeka dalam penerapannya harus didukung dengan penyediaan pelatihan, penyediaan sumber bahan belajar guru dan perangkat ajar yang inovatif, didukung oleh kepala sekolah dan dinas setempat. Satuan Pendidikan dalam Penyediaan perangkat ajar yang dimaksud adalah berupa buku teks, bahan ajar pendukung, contohnya rancangan dan skema tujuan pembelajaran, kurikulum operasional sekolah, modul ajar serta proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila yang tersedia pada platform digital bagi guru.

Kurikulum merdeka menawarkan pembelajaran yang lebih adaptif dan menekankan pada materi yang penting. Hal ini akan memperkuat kemampuan siswa melalui penilaian yang diberikan sehingga dapat bersaing pada tingkat internasional. Berikut ini adalah tiga karakteristik khusus pada kurikulum merdeka yaitu 1) Kurikulum merdeka fokus pada materi esensial; 2) Fleksibel; 3) Tersedia perangkat ajar yang banyak. Kurikulum merdeka harus responsif dan komprehensif dalam kehidupan sosial yang relevan, dan mampu menyeimbangkan keberagaman dan keperluan dalam setiap masa. Selain itu, kurikulum merdeka harus selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dalam faktor yang mendasarinya. Seiring perkembangannya, kurikulum selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan siswa.

Pada kurikulum merdeka terdapat dua pendekatan yaitu Kurikulum berbasis Cinta (KBC) dan Deep Learning yang mana keduanya merupakan pendekatan yang diintegrasikan dalam bingkai Kurikulum Merdeka. Keduanya bukan kurikulum terpisah yang menggantikan kurikulum merdeka melainkan penguatan pada proses pembelajaran yang terdapat di Kurikulum Merdeka agar lebih bermakna (deep), kontekstual, humanis, dan berbasis kasih sayang (cinta) sesuai dengan semangat Merdeka Belajar yang mana Kurikulum cinta menekankan nilai kasih sayang, empati, dan relasi yang hangat sebagai fondasi pembelajaran, sedangkan pembelajaran mendalam

berfokus pada pemahaman konseptual, berpikir kritis, reflektif, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata<sup>277</sup>:

a. Pendekatan *Deep Learning*

Kurikulum Merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada tahun 2022 menekankan pentingnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan fleksibel terhadap konteks sekolah serta kebutuhan peserta didik. Salah satu prinsip utama dalam Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek, yang merupakan salah satu pendekatan utama dalam deep learning. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa dihadapkan pada permasalahan nyata dan diajak untuk menemukan solusi melalui eksplorasi, diskusi, dan refleksi<sup>278</sup>. Project-based learning dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis siswa, dua aspek utama dari deep learning. Hal ini sejalan dengan pendekatan Kurikulum Merdeka yang memberikan ruang eksplorasi lebih besar pada siswa.

Kurikulum Merdeka juga menekankan pembelajaran diferensiasi, di mana guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Prinsip ini berhubungan erat dengan pendekatan deep learning, karena pembelajaran mendalam hanya dapat terjadi jika siswa merasa terhubung dan tertarik dengan materi yang dipelajari. Selain itu, kurikulum merdeka memperkuat peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar. Dalam deep learning, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan menjadi pendamping yang membangun dialog, memberikan umpan balik reflektif, dan menciptakan lingkungan

---

<sup>277</sup> Wildan Sahuri Ramdani et al., "Kurikulum Cinta Dan Pembelajaran Mendalam Serta Implementasinya Di Madrasah" 1, no. 2 (2025): 86–100.

<sup>278</sup> Ali Hasan Assidiqi et al., "IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM ( DEPP LEARNING ) DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI PENGUATAN" 02 (2026).

belajar yang mendukung eksplorasi. Hal ini sesuai dengan filosofi student-centered learning dalam deep learning, yang mempercayai bahwa siswa belajar lebih efektif ketika mereka aktif membangun pemahaman sendiri. Keterkaitan lainnya antara deep learning dan Kurikulum Merdeka adalah pada aspek asesmen. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya asesmen formatif yang berorientasi pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir.

Dari perspektif penguatan karakter, deep learning juga mendukung tujuan Kurikulum Merdeka untuk membentuk pelajar yang berakhlak mulia dan berdaya saing global. Melalui proses belajar yang mendalam, siswa belajar membangun makna, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri.

b. Kurikulum Berbasis Cinta

Kurikulum berbasis cinta merupakan pendekatan kurikulum yang menempatkan cinta, kasih sayang, dan kepedulian sebagai nilai inti dalam seluruh proses pendidikan. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses humanisasi yang melibatkan dimensi emosional, sosial, dan spiritual<sup>279</sup>. Kurikulum cinta menempatkan nilai kasih sayang, empati, spiritualitas, dan hubungan manusia yang hangat sebagai fondasi utama pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan membangun peserta didik secara holistic meliputi aspek spiritual, emosional, moral, dan intelektual.

Kurikulum berbasis cinta menawarkan alternatif penting dalam mengembangkan pendidikan yang lebih humanis, holistik, dan bermakna. Pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan siswa

---

<sup>279</sup> “KURIKULUM BERBASIS CINTA DI SEKOLAH DASAR:IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AFEKTIF UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SISWA” 5, no. 2 (2026): 1799–1818.

untuk sukses akademik, tetapi juga membentuk karakter yang kuat, empati yang tinggi, kecerdasan emosional yang baik, dan kepribadian yang seimbang. Dalam konteks tantangan pendidikan di era modern yang ditandai dengan degradasi moral, penurunan empati sosial, dan meningkatnya kekerasan di kalangan anak, kurikulum berbasis cinta menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan.

Selain itu, kurikulum berbasis cinta sejalan dengan visi pendidikan abad ke-21 yang menekankan pentingnya kompetensi 4C (Critical Thinking, Creativity, Collaboration, Communication) dan karakter yang kuat. Keterampilan-keterampilan ini tidak dapat dikembangkan dalam lingkungan yang kering dan otoriter, tetapi membutuhkan lingkungan yang penuh kepercayaan, dukungan, dan kasih sayang. Dengan demikian, kurikulum berbasis cinta bukan hanya penting untuk membentuk karakter siswa, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan dan tantangan masa depan. Akhirnya, implementasi kurikulum berbasis cinta memerlukan komitmen jangka panjang, kesabaran, dan ketekunan dari semua pihak.

Perubahan paradigma pendidikan tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui proses yang bertahap dan berkelanjutan. Namun, dengan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan cinta sebagai fondasi pendidikan, kita dapat bersama-sama mewujudkan sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan anak-anak Indonesia. Pendidikan yang didasari cinta.

### **C. Penyusunan Program Tahunan dalam Manajemen Kurikulum**

#### **1. Pengertian Program Tahunan (Prota)**

Program tahunan merupakan salah satu perangkat penting dalam manajemen kurikulum karena berfungsi sebagai pedoman umum pembelajaran selama satu tahun ajaran. Secara sederhana, program

tahunan adalah rencana alokasi waktu pembelajaran untuk setiap mata pelajaran atau kompetensi dalam rentang satu tahun ajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan sistematis, terarah, dan sesuai dengan kalender pendidikan.<sup>280</sup> Dalam konteks manajemen kurikulum, program tahunan menempati posisi strategis karena menjadi dasar bagi penyusunan program semester, penyusunan perangkat ajar, dan pengendalian ketercapaian kompetensi peserta didik.<sup>281</sup>

Secara teoritis, perencanaan pembelajaran merupakan bagian integral dari fungsi manajemen pendidikan. George R. Terry menyatakan bahwa perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan cara terbaik untuk mencapainya secara sistematis.<sup>282</sup> Dalam konteks ini, Program Tahunan dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari fungsi perencanaan tersebut dalam lingkup pembelajaran.

Prota juga dipahami sebagai penjabaran kurikulum ke dalam rencana waktu tahunan yang mencakup pemetaan kompetensi dan materi pembelajaran. Menurut Rusman, Program Tahunan adalah rencana distribusi alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar atau capaian pembelajaran selama satu tahun ajaran.<sup>283</sup> Dengan demikian, Prota tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjamin ketercapaian tujuan pendidikan.

## 2. Fungsi dan Tujuan Program Tahunan

Secara fungsional, program tahunan memiliki beberapa kegunaan utama. Pertama, program tahunan berfungsi sebagai pedoman distribusi waktu pembelajaran selama satu tahun ajaran. Kedua, program tahunan menjadi alat pengontrol agar seluruh kompetensi dapat tersampaikan tanpa terjadi penumpukan materi pada akhir semester. Ketiga, program tahunan membantu guru menjaga kesinambungan pembelajaran antartopik sehingga urutan materi

---

<sup>280</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

<sup>281</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019).

<sup>282</sup> George R. Terry, *Principles of Management* (Homewood: Richard D. Irwin, Inc, 1972).

<sup>283</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*.

menjadi lebih terstruktur. Keempat, program tahunan mendukung evaluasi kurikulum karena memungkinkan sekolah menilai apakah alokasi waktu yang direncanakan telah sesuai dengan pelaksanaan nyata di lapangan.<sup>284</sup>

Secara lebih spesifik, fungsi Program Tahunan meliputi: (1) sebagai alat perencanaan pembelajaran jangka panjang, (2) sebagai dasar pengorganisasian materi dan waktu, serta (3) sebagai instrumen kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran.<sup>285</sup> Fungsi ini menunjukkan bahwa Prota memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan implementasi kurikulum.

Tujuan penyusunan program tahunan adalah agar proses pembelajaran berlangsung efektif, efisien, dan selaras dengan target kurikulum. Perencanaan waktu yang baik akan memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, memberikan penilaian, melakukan remedial, dan menyelenggarakan pengayaan. Program tahunan juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyelesaian materi, tetapi juga pada ketercapaian kompetensi secara utuh.<sup>286</sup> Karena itu, program tahunan merupakan bagian dari siklus manajemen kurikulum yang mendukung keteraturan, kesinambungan, dan mutu pembelajaran.

Menurut Wina Sanjaya, perencanaan pembelajaran yang baik harus mampu mengarahkan proses pembelajaran agar berjalan secara terstruktur dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>287</sup> Dengan demikian, tujuan Prota tidak hanya administratif, tetapi juga pedagogis.

---

<sup>284</sup> Wina Sanjaya, *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>285</sup> Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran*.

<sup>286</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

<sup>287</sup> Sanjaya, *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*.

### 3. Langkah-Langkah Penyusunan Program Tahunan

Penyusunan Program Tahunan dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan teknis agar menghasilkan perencanaan yang akurat dan implementatif. Secara teknis, langkah pertama dalam penyusunan program tahunan adalah menganalisis kalender pendidikan. Guru perlu mengidentifikasi jumlah minggu dalam satu tahun ajaran, minggu efektif belajar, libur semester, hari libur nasional, kegiatan tengah semester, dan agenda sekolah lainnya. Analisis ini penting karena alokasi waktu pembelajaran hanya dapat disusun secara akurat jika guru mengetahui waktu riil yang tersedia untuk pembelajaran.<sup>288</sup>

Langkah kedua adalah menghitung jumlah minggu efektif. Minggu efektif merupakan jumlah minggu yang benar-benar dapat dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Minggu yang digunakan untuk ujian, kegiatan sekolah, atau libur biasanya tidak dihitung sebagai waktu efektif penuh. Hasil penghitungan ini menjadi dasar utama dalam menentukan seberapa banyak kompetensi yang dapat dicapai dalam satu tahun ajaran.<sup>289</sup>

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran atau kompetensi dasar sesuai kurikulum yang digunakan. Pada Kurikulum 2013, guru mengacu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum. Pada Kurikulum Merdeka, guru lebih berorientasi pada capaian pembelajaran yang dijabarkan ke dalam alur tujuan pembelajaran dan perangkat ajar. Identifikasi ini sangat penting karena program tahunan harus disusun berdasarkan target kompetensi yang jelas, bukan sekadar daftar materi.<sup>290</sup>

---

<sup>288</sup> Kemendikbudristek, “Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan” (Jakarta, 2025).

<sup>289</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).

<sup>290</sup> Kemendikbudristek, “Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Kurikulum Merdeka” (Jakarta, 2022).

Langkah keempat adalah menyebarkan materi selama satu tahun ajaran. Pada tahap ini guru menentukan materi mana yang diajarkan pada semester ganjil dan materi mana yang diajarkan pada semester genap. Penyebaran ini harus mempertimbangkan kesinambungan antar materi, tingkat kesulitan, dan bobot masing-masing topik. Materi yang lebih kompleks atau membutuhkan praktik lebih banyak umumnya memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang.<sup>291</sup>

Langkah kelima adalah menentukan alokasi waktu untuk setiap kompetensi atau topik pembelajaran. Alokasi waktu ini biasanya dinyatakan dalam minggu atau jam pelajaran. Guru harus membagi waktu secara proporsional sesuai dengan tingkat urgensi dan kesulitan materi. Pembagian waktu yang terlalu seragam tanpa mempertimbangkan karakter materi dapat menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif.<sup>292</sup>

Langkah keenam adalah menyesuaikan program tahunan dengan program semester. Program tahunan berfungsi sebagai dasar umum, sedangkan program semester merupakan penjabaran yang lebih rinci dari pembagian waktu pada setiap semester. Karena itu, penyusunan program tahunan harus memperhitungkan keseimbangan materi pada semester ganjil dan genap. Jika satu semester terlalu padat, maka perlu dilakukan redistribusi agar beban belajar peserta didik menjadi lebih seimbang.<sup>293</sup>

Langkah ketujuh adalah melakukan revisi dan validasi. Setelah program tahunan disusun, guru perlu menelaah kembali kesesuaian alokasi waktu, kelengkapan kompetensi, dan urutan materi. Pada tahap ini, revisi dapat dilakukan melalui musyawarah guru mata pelajaran, koordinasi dengan tim kurikulum, atau supervisi kepala sekolah.

---

<sup>291</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran* (Depok: Rajawali Press, 2021).

<sup>292</sup> Sanjaya, *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*.

<sup>293</sup> Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran*.

Validasi penting agar program tahunan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga layak diterapkan dalam praktik pembelajaran.<sup>294</sup>

#### 4. Implementasi Prota dalam Kurtilas dan Kumer

Dalam implementasinya, program tahunan pada Kurikulum 2013 (Kurtilas) dan Kurikulum Merdeka (Kurmer) memiliki persamaan pada fungsi dasar, yaitu sama-sama menjadi pedoman pengaturan waktu pembelajaran. Namun, terdapat perbedaan pada dasar penyusunan dan tingkat fleksibilitasnya. Pada Kurikulum 2013, Prota disusun secara lebih terstruktur dengan mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Distribusi materi cenderung linear dan berorientasi pada penyelesaian seluruh KD dalam satu tahun ajaran. Pendekatan ini menekankan pada ketercapaian standar kompetensi yang telah ditetapkan secara nasional.<sup>295</sup>

Sebaliknya, pada Kurmer, perencanaan waktu lebih berorientasi pada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Pengelolaan waktu dalam Kurmer lebih fleksibel karena guru diberi ruang untuk menyesuaikan kedalaman materi, strategi pembelajaran, pembelajaran berdiferensiasi, serta kebutuhan belajar peserta didik. Dalam praktiknya, program tahunan pada Kurmer tidak selalu tampil dalam format yang sama seperti Kurtilas, tetapi esensinya tetap sama, yakni mengatur distribusi waktu agar capaian pembelajaran dapat diraih secara bermakna. Pendekatan ini didukung oleh konsep *deep learning* yang menekankan pemahaman mendalam, refleksi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata.<sup>296</sup>

Perbedaan lain yang penting adalah orientasi pembelajaran. Pada Kurtilas, program tahunan lebih menekankan penyelesaian kompetensi dasar sesuai target waktu yang tersedia. Pada Kurmer,

---

<sup>294</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*.

<sup>295</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendi" (Jakarta, 2018).

<sup>296</sup> Kemendikbudristek, "Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Kurikulum Merdeka."

program tahunan lebih menekankan kedalaman pemahaman, kebebasan guru dalam merancang pembelajaran, dan penyesuaian terhadap kebutuhan siswa. Dalam kerangka deep learning, program tahunan pada Kurmer idealnya memberi ruang yang cukup bagi peserta didik untuk berpikir kritis, mengeksplorasi konsep, berdiskusi, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata.<sup>297</sup>

Dengan demikian, program tahunan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen manajemen kurikulum yang menentukan arah pembelajaran selama satu tahun ajaran. Penyusunannya harus dilakukan secara cermat, teknis, dan sesuai dengan karakter kurikulum yang digunakan. Dalam Kurtilas, program tahunan cenderung lebih rigid karena berbasis kompetensi dasar, sedangkan dalam Kurmer program tahunan lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pembelajaran mendalam. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakter kurikulum agar penyusunan program tahunan benar-benar mendukung efektivitas pembelajaran di kelas.<sup>298</sup>

#### **D. Penyusunan Program Semester dalam Manajemen Kurikulum**

##### **1. Pengertian Program Semester**

Program semester merupakan salah satu perangkat perencanaan pembelajaran yang disusun untuk menjabarkan program tahunan ke dalam pembagian kegiatan belajar pada setiap semester. Secara sederhana, program semester adalah rencana pembelajaran yang memuat distribusi kompetensi, materi, alokasi waktu, serta urutan kegiatan belajar selama satu semester. Dokumen ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran lebih terarah, proporsional, dan sesuai dengan waktu efektif yang tersedia dalam kalender akademik.<sup>299</sup> Dalam manajemen kurikulum, program semester menempati posisi penting

---

<sup>297</sup> Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (New York: Teachers College Press, 2016).

<sup>298</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*.

<sup>299</sup> Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran*.

karena menjadi penghubung antara perencanaan tahunan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Dalam praktiknya, Promes berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengatur strategi pembelajaran, pemilihan metode, serta penjadwalan kegiatan evaluasi. Dengan demikian, Promes memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan terstruktur.

## 2. Hubungan Program Semester dengan Program Tahunan

Program semester berbeda dari program tahunan dalam tingkat rincian. Jika program tahunan memberikan gambaran umum distribusi materi selama satu tahun ajaran, maka program semester memecahnya menjadi langkah yang lebih operasional untuk satu semester tertentu. Dengan kata lain, program semester berfungsi sebagai penjabaran teknis dari target pembelajaran tahunan sehingga guru dapat mengetahui materi apa yang harus diajarkan pada minggu keberapa, berapa lama waktu yang diperlukan, dan bagaimana urutan pencapaiannya.<sup>300</sup> Karena itu, program semester membantu guru menjaga kesinambungan pembelajaran sekaligus memastikan bahwa seluruh kompetensi dapat dicapai secara sistematis. Secara fungsional, program semester memiliki beberapa peran utama.

Pertama, program semester menjadi pedoman rinci dalam mengatur urutan pembelajaran selama satu semester. Kedua, program semester membantu guru menyesuaikan materi dengan jumlah minggu efektif yang tersedia. Ketiga, program semester memudahkan guru melakukan pengawasan terhadap ketercapaian target pembelajaran pada tengah dan akhir semester. Keempat, program semester mendukung efisiensi pembelajaran karena guru dapat menghindari penumpukan materi pada akhir semester.<sup>301</sup> Dengan demikian, program

---

<sup>300</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*.

<sup>301</sup> Rusman.

semester bukan hanya perangkat administratif, tetapi juga alat manajerial yang memengaruhi mutu pelaksanaan pembelajaran.

Hubungan antara program semester dan program tahunan bersifat hierarkis dan komplementer. Program tahunan berfungsi sebagai kerangka besar perencanaan pembelajaran selama satu tahun ajaran, sedangkan program semester merupakan rincian operasional dari kerangka tersebut. Program semester tidak boleh disusun terpisah dari program tahunan karena keduanya harus saling konsisten. Jika program tahunan menggambarkan distribusi kompetensi sepanjang tahun, maka program semester memastikan distribusi tersebut benar-benar realistis untuk masing-masing semester.<sup>302</sup> Oleh sebab itu, penyusunan program semester harus selalu didasarkan pada analisis program tahunan, kalender pendidikan, dan karakteristik peserta didik.

### 3. Langkah Penyusunan Program Semester

Penyusunan Program Semester dilakukan melalui tahapan yang lebih rinci dibandingkan Program Tahunan karena berorientasi pada implementasi langsung di kelas. Dalam penyusunannya, langkah pertama adalah menelaah program tahunan yang telah dibuat. Guru perlu melihat kompetensi, materi, atau topik yang telah dialokasikan untuk semester tertentu. Dari sana, guru dapat menentukan urutan pembelajaran yang akan dijalankan selama satu semester. Tahap ini penting karena program semester harus selaras dengan pembagian waktu yang telah ditetapkan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih materi atau kekosongan pembelajaran.<sup>303</sup>

Langkah kedua adalah menganalisis kalender pendidikan secara lebih rinci. Guru perlu menghitung jumlah minggu efektif dalam satu semester, termasuk memperhatikan minggu yang digunakan untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, libur nasional, kegiatan sekolah, dan hari-hari yang tidak efektif. Analisis ini penting karena

---

<sup>302</sup> Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik*.

<sup>303</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*.

program semester harus benar-benar realistis terhadap waktu yang tersedia. Jika jumlah minggu efektif tidak dihitung secara cermat, maka pembelajaran berisiko tidak selesai tepat waktu atau justru terlalu padat di akhir semester.<sup>304</sup>

Langkah ketiga adalah memetakan kompetensi atau materi ke dalam minggu-minggu efektif. Pada tahap ini, guru membagi materi pembelajaran berdasarkan urutan logis dan tingkat kesulitannya. Materi yang bersifat dasar biasanya diletakkan di awal semester, sedangkan materi lanjutan, penguatan, atau aplikasi ditempatkan pada minggu-minggu berikutnya. Dalam Kurikulum 2013, pemetaan ini biasanya didasarkan pada Kompetensi Dasar. Sementara itu, dalam Kurikulum Merdeka, pemetaan lebih dekat pada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang dijabarkan secara fleksibel.<sup>305</sup>

Langkah keempat adalah menentukan alokasi waktu untuk setiap materi atau kegiatan pembelajaran. Alokasi waktu ini harus mempertimbangkan kedalaman materi, strategi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan kebutuhan asesmen. Materi yang memerlukan praktik, diskusi, observasi, atau proyek biasanya memerlukan waktu lebih panjang dibanding materi yang hanya membutuhkan pengenalan konsep. Karena itu, guru harus cermat dalam membagi waktu agar seluruh proses pembelajaran tetap proporsional.<sup>306</sup>

Langkah kelima adalah menyesuaikan program semester dengan kebutuhan evaluasi dan pengayaan. Dalam praktiknya, tidak semua peserta didik mencapai kompetensi pada kecepatan yang sama. Oleh karena itu, program semester perlu memberi ruang bagi kegiatan remedial, pengayaan, dan refleksi pembelajaran. Penyesuaian ini sangat penting terutama dalam kurikulum yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi, seperti Kurikulum Merdeka. Dengan memberi ruang

---

<sup>304</sup> Kemendikbudristek, "Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan."

<sup>305</sup> Kemendikbudristek, "Panduan Pembelajaran Dan Asesmen" (Jakarta, 2025).

<sup>306</sup> Kemendikbudristek.

pada evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran, program semester menjadi lebih adaptif dan berorientasi pada pencapaian belajar yang sesungguhnya.<sup>307</sup>

Langkah keenam adalah melakukan validasi dan revisi. Setelah program semester disusun, guru perlu menelaah kembali kesesuaian antara materi, alokasi waktu, minggu efektif, dan target pembelajaran. Revisi dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kalender akademik, pergeseran jadwal, atau penyesuaian kondisi kelas. Dalam konteks manajemen kurikulum, validasi ini penting agar dokumen perencanaan tidak hanya baik secara teoretis, tetapi juga layak diterapkan dalam praktik pembelajaran.<sup>308</sup>

Menurut Oemar Hamalik, perencanaan pembelajaran yang rinci akan membantu guru dalam mengelola kelas secara efektif dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.<sup>309</sup> Oleh karena itu, penyusunan Promes harus dilakukan secara cermat dan sistematis.

#### 4. Implikasi terhadap Efektivitas Pembelajaran

Implikasi program semester terhadap efektivitas pembelajaran sangat besar. Pertama, program semester membantu guru mengelola waktu secara lebih efisien sehingga pembelajaran tidak berlangsung tergesa-gesa atau terlalu lambat. Kedua, program semester mendukung keteraturan pembelajaran karena guru memiliki peta kerja yang jelas untuk setiap minggu. Ketiga, program semester memudahkan pelaksanaan evaluasi karena guru dapat memantau apakah target semester berjalan sesuai rencana. Keempat, program semester meningkatkan mutu pembelajaran karena materi dapat disampaikan secara bertahap, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.<sup>310</sup>

---

<sup>307</sup> Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013*.

<sup>308</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*.

<sup>309</sup> Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran*.

<sup>310</sup> Sanjaya, *Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran*.

Selain itu, program semester juga berimplikasi pada peningkatan profesionalitas guru. Guru yang mampu menyusun program semester dengan baik menunjukkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen kurikulum yang menempatkan guru bukan hanya sebagai pelaksana materi ajar, tetapi juga sebagai perencana pembelajaran yang bertanggung jawab terhadap mutu hasil belajar.<sup>311</sup> Dengan demikian, keberadaan program semester tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada capaian kompetensi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program semester merupakan perangkat penting dalam manajemen kurikulum karena menjembatani program tahunan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Penyusunannya dilakukan melalui analisis program tahunan, kalender pendidikan, pemetaan materi, penentuan alokasi waktu, serta penyesuaian terhadap evaluasi dan kebutuhan belajar peserta didik. Dalam Kurikulum 2013, program semester bersifat lebih struktural dan berbasis Kompetensi Dasar, sedangkan dalam Kurikulum Merdeka program semester lebih fleksibel, adaptif, serta mendukung pembelajaran mendalam (*deep learning*) dan bermakna (*meaningful learning*). Oleh karena itu, program semester menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan pembelajaran berjalan.

---

<sup>311</sup> Sanjaya.

# **BAB IX**

**ANALISIS PERUBAHAN KURIKULUM  
DAN IMPLIKASINYA DALAM  
MANAJEMEN LEMBAGA  
PENDIDIKAN**

## A. Latar Belakang

Perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi karena pendidikan harus senantiasa adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman, baik dalam aspek ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, maupun kebutuhan dunia kerja. Kurikulum sebagai “jantung pendidikan” memiliki peran strategis dalam menentukan arah, isi, dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan dalam konteks eksternal, maka kurikulum juga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan kontekstual.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam memajukan peradaban suatu bangsa. Agar tetap relevan, kurikulum sebagai "jantung" pendidikan harus terus bertransformasi. Perubahan kurikulum bukanlah sekadar pergantian dokumen formal, melainkan respon strategis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Tanpa adaptasi, sistem pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi realitas zamannya.

Implikasi dari perubahan ini menyentuh seluruh lapisan ekosistem sekolah. Guru dituntut menguasai pedagogi baru, sarana prasarana harus menyesuaikan standar kompetensi yang berbeda, dan sistem penilaian pun ikut bergeser. Di sinilah manajemen kurikulum memegang peran vital. Manajemen yang efektif memastikan bahwa visi perubahan di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di ruang kelas, meminimalisir resistensi, dan menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.

Menurut Ralph W. Tyler, kurikulum harus dirancang berdasarkan tujuan pendidikan yang jelas serta mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat.<sup>312</sup> Sementara itu, Nana Syaodih Sukmadinata menegaskan bahwa perubahan kurikulum merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan

---

<sup>312</sup> Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 1949), hlm. 1–3.

perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman.<sup>313</sup> Dengan demikian, perubahan kurikulum bukan sekadar pergantian dokumen, tetapi merupakan bentuk respon strategis terhadap tantangan global dan lokal.

Namun, perubahan kurikulum tidak hanya berdampak pada aspek pembelajaran, melainkan juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap manajemen lembaga pendidikan. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam perencanaan program, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi pendidikan. Dalam perspektif manajemen, kurikulum menjadi bagian integral yang harus dikelola secara efektif agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Menurut Oemar Hamalik, manajemen kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum secara sistematis dan berkesinambungan.<sup>314</sup> Perubahan kurikulum menuntut kesiapan manajerial dari pimpinan lembaga pendidikan, terutama dalam mengelola sumber daya manusia seperti guru, sarana prasarana, serta sistem evaluasi yang sesuai dengan kurikulum baru. Tanpa manajemen yang baik, implementasi kurikulum yang baru berpotensi tidak berjalan secara efektif.

Lebih lanjut, Michael Fullan, seorang pakar perubahan pendidikan, menyatakan bahwa keberhasilan perubahan kurikulum sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi pendidikan dalam mengelola perubahan tersebut secara menyeluruh, termasuk aspek kepemimpinan, budaya organisasi, dan kesiapan guru.<sup>315</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat manajerial dan kultural.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan kurikulum merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki implikasi luas terhadap manajemen lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan

---

<sup>313</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 102

<sup>314</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 18.

<sup>315</sup> Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (New York: Teachers College Press, 2007), hlm. 44–45.

analisis yang mendalam agar perubahan kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

## **B. Konsep Perubahan Kurikulum**

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam perkembangannya, kurikulum bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Perubahan kurikulum pada dasarnya adalah hasil dari usaha sadar untuk memodifikasi atau mengganti komponen-komponen kurikulum guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif.<sup>316</sup> Perubahan ini mencakup pergeseran dalam rencana belajar yang meliputi tujuan, isi, hingga metode evaluasi yang digunakan.<sup>317</sup>

Menurut *Ralph W. Tyler*, pengembangan kurikulum harus didasarkan pada empat komponen utama, yaitu tujuan pendidikan, pengalaman belajar, organisasi pengalaman belajar, dan evaluasi.<sup>318</sup> Perubahan kurikulum terjadi ketika salah satu atau seluruh komponen tersebut mengalami penyesuaian akibat tuntutan zaman.

Perubahan kurikulum tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup tiga dimensi utama: substansi (materi), metodologis (cara mengajar), dan sosiologis (pandangan masyarakat).<sup>319</sup> Kurikulum yang dinamis adalah kurikulum yang mampu merespons tuntutan eksternal secara berkelanjutan.<sup>320</sup>

Sementara itu, Nana Syaodih Sukmadinata menyatakan bahwa perubahan kurikulum merupakan proses yang dilakukan secara sistematis

---

<sup>316</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 15.

<sup>317</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 33.

<sup>318</sup> Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Chicago: University of Chicago Press, 1949), hlm. 1–3.

<sup>319</sup> Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 182.

<sup>320</sup> Robert S. Zais, *Curriculum: Principles and Foundations* (New York: Harper & Row, 1976), hlm. 17.

untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.<sup>321</sup>

Secara teoretis, faktor yang melatarbelakangi perubahan kurikulum meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pasar tenaga kerja, serta hasil evaluasi terhadap kekurangan pada kurikulum sebelumnya.<sup>322</sup> Proses perubahan memerlukan manajemen yang matang melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Manajemen yang baik memastikan bahwa ide perubahan di tingkat pusat dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh guru di kelas.

### C. Faktor-Faktor Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling memengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor utamanya antara lain:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan IPTEK menuntut adanya pembaruan materi dan metode pembelajaran. Pendidikan harus selaras dengan laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penemuan teori baru atau teknologi mutakhir menuntut kurikulum untuk memperbarui materi ajar agar peserta didik tetap kompeten di era digital.<sup>323</sup>

2. Perubahan Sosial dan Budaya (*Link and Match*)

Nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang mempengaruhi arah pendidikan. Kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi atau munculnya jenis pekerjaan baru

---

<sup>321</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 102.

<sup>322</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 50.

<sup>323</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 55.

memaksa institusi pendidikan mengubah standar kompetensi lulusannya agar relevan dengan tuntutan dunia industri.<sup>324</sup>

### 3. Dinamika Politik dan Kebijakan Pemerintah

Kurikulum harus mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Sebagai bagian dari sistem kenegaraan, kurikulum sering kali mengalami perubahan saat terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan visi politik negara. Kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan menjadi penentu utama arah perubahan tersebut.<sup>325</sup>

### 4. Hasil Evaluasi Kurikulum Sebelumnya

Regulasi dan kebijakan pendidikan menjadi faktor utama perubahan kurikulum. Setiap kurikulum memiliki masa berlaku dan titik jenuh. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, jika kurikulum lama dianggap tidak lagi efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional atau terdapat banyak hambatan dalam implementasinya, maka perubahan menjadi sebuah keharusan.<sup>326</sup>

### 5. Globalisasi

Arus globalisasi menuntut standar pendidikan yang setara dengan kualitas internasional. Persaingan antarnegara dalam indeks literasi dan numerasi (seperti PISA) sering kali mendorong pemerintah untuk mereformasi kurikulumnya agar dapat bersaing di tingkat global.<sup>327</sup> Menurut *Hilda Taba*, kurikulum harus dirancang secara fleksibel agar dapat merespon kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.<sup>328</sup>

---

<sup>324</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 92.

<sup>325</sup> Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori & Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 201.

<sup>326</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 40.

<sup>327</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 22.

<sup>328</sup> Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice* (New York: Harcourt, Brace & World, 1962), hlm. 24.

#### D. Implikasi Perubahan Kurikulum terhadap Manajemen Pendidikan

Perubahan kurikulum membawa dampak langsung terhadap sistem manajemen lembaga pendidikan,

1. Perencanaan (*Planning*): Lembaga pendidikan harus menyusun kembali program kerja dan perangkat pembelajaran.
2. Pengorganisasian (*Organizing*): Penyesuaian struktur organisasi dan pembagian tugas guru.
3. Pelaksanaan (*Actuating*): Implementasi kurikulum baru dalam proses pembelajaran. Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*): Monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kurikulum.

Menurut *Oemar Hamalik*, manajemen kurikulum merupakan proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum secara terpadu.<sup>329</sup> Perubahan kurikulum membawa konsekuensi logis terhadap tata kelola atau manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Manajemen harus bertransformasi agar ide perubahan kurikulum dapat terwujud dalam praktik pembelajaran di kelas. Berikut adalah implikasi utamanya:

##### a. Reorientasi Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran

Manajemen pendidikan harus mengubah fokus dari sekadar penyelesaian materi (*administratif*) menjadi orientasi pada proses dan hasil belajar siswa. Kepala sekolah dan wakil kurikulum dituntut untuk menyusun jadwal dan beban belajar yang lebih fleksibel sesuai dengan kerangka kurikulum yang baru.<sup>330</sup>

##### b. Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Perubahan kurikulum berimplikasi langsung pada kebutuhan pengembangan SDM. Manajemen sekolah harus merancang program pelatihan, *workshop*, dan pendampingan berkelanjutan bagi guru agar

---

<sup>329</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 18.

<sup>330</sup> E. Mulyasa, *Manajemen serta Perubahan Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm.

mampu menguasai metode pembelajaran dan sistem penilaian (*asesmen*) yang baru.<sup>331</sup>

c. Penyesuaian Sarana dan Prasarana

Kurikulum baru sering kali membutuhkan dukungan fasilitas yang berbeda. Jika kurikulum menekankan pada literasi digital atau pembelajaran berbasis proyek, maka manajemen harus merealokasi anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi, laboratorium, atau ruang kolaborasi yang sesuai.<sup>332</sup>

d. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Perubahan kurikulum menuntut penyesuaian dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Implikasinya, sekolah perlu melakukan efisiensi atau mencari sumber pendanaan baru untuk membiayai pengadaan modul ajar baru, pelatihan guru, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kurikulum tersebut.<sup>333</sup>

e. Penguatan Hubungan Masyarakat (*School-Community Relation*)

Manajemen pendidikan harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Perubahan kurikulum sering kali menimbulkan kebingungan bagi wali murid, sehingga sekolah perlu melakukan sosialisasi intensif agar mendapat dukungan penuh dalam implementasinya.<sup>334</sup>

---

<sup>331</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 82.

<sup>332</sup> Barnawi dan Mohammad Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 30.

<sup>333</sup> Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 115.

<sup>334</sup> Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.

## E. Peran Manajemen dalam Implementasi Kurikulum

Keberhasilan perubahan kurikulum sangat bergantung pada kualitas manajemen pendidikan. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi berjalan optimal. Menurut *Michael Fullan*, keberhasilan perubahan pendidikan ditentukan oleh kepemimpinan yang efektif, kolaborasi antar guru, serta budaya organisasi yang mendukung perubahan.<sup>335</sup> Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai penggerak perubahan (*Agent Of Change*).

Manajemen pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan kurikulum di atas kertas dengan praktik nyata di lapangan. Tanpa manajemen yang kuat, perubahan kurikulum hanya akan menjadi beban administratif tanpa perubahan kualitas belajar. Berikut adalah peran strategis manajemen:

### a. Peran Perencanaan (*Planning*)

Manajemen bertanggung jawab menjabarkan kurikulum nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal ini meliputi penyusunan kalender akademik, pembagian tugas mengajar, dan pemetaan sumber daya yang diperlukan agar implementasi berjalan terstruktur.<sup>336</sup>

### b. Peran Pengorganisasian (*Organizing*)

Manajemen mengatur pembagian wewenang dan koordinasi antar lini di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer harus memastikan tim kurikulum, guru mata pelajaran, dan staf pendukung bekerja secara sinergis dalam menjalankan struktur kurikulum yang baru.<sup>337</sup>

---

<sup>335</sup> Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (New York: Teachers College Press, 2007), hlm. 44–45.

<sup>336</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 150.

<sup>337</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 67

c. Peran Kepemimpinan dan Penggerak (*Actuating*)

Implementasi kurikulum sering kali menghadapi resistensi dari guru. Di sinilah peran manajemen untuk memberikan motivasi, memfasilitasi forum diskusi (seperti KKG atau MGMP), serta menciptakan iklim sekolah yang kondusif terhadap perubahan.<sup>338</sup>

d. Peran Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*)

Manajemen melakukan monitoring secara berkala terhadap proses pembelajaran di kelas (supervisi akademik). Hasil supervisi ini digunakan untuk mengevaluasi apakah kurikulum telah dijalankan sesuai standar dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru maupun siswa.<sup>339</sup>

e. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)

Manajemen memastikan bahwa implementasi kurikulum tetap berada pada koridor pencapaian tujuan pendidikan nasional. Manajemen mengelola data hasil belajar sebagai indikator keberhasilan kurikulum dan melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).<sup>340</sup>

## F. Analisis Penyebab dan Karakteristik Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum di Indonesia, yang saat ini bertransformasi menuju Kurikulum Merdeka, bukanlah sekadar pergantian formalitas. Berdasarkan tinjauan teoretis, perubahan ini dipicu oleh:

1. Kesenjangan Belajar (*Learning Loss*): Terutama pasca pandemi, yang menuntut kurikulum lebih fleksibel.
2. Revolusi Industri 4.0: Kebutuhan akan literasi digital dan *soft skills* (*kreativitas, kritis, kolaborasi*).
3. Link and Match: Menyelaraskan hasil pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis.

---

<sup>338</sup>Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menyongsong Implementasi Kurikulum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 42.

<sup>339</sup>Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 89.

<sup>340</sup>Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 112.

Karakteristik utama perubahan saat ini adalah pergeseran dari materi yang padat menuju materi esensial, serta memberikan otonomi penuh kepada guru untuk mengajar sesuai level kemampuan siswa (*Teaching at the Right Level*). Perubahan kurikulum memaksa manajemen sekolah untuk melakukan transformasi total pada empat pilar utama:

1. *Manajemen SDM*: Guru bukan lagi sekadar penyampai materi, melainkan fasilitator. Sekolah harus mengelola komunitas belajar internal sebagai wadah peningkatan kompetensi.
2. *Manajemen Sarpras*: Fokus beralih pada penyediaan infrastruktur teknologi dan ruang belajar yang kolaboratif, bukan hanya ruang kelas konvensional.
3. *Manajemen Kurikulum*: Perencanaan jadwal menjadi lebih kompleks karena adanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang bersifat lintas mata pelajaran.
4. *Manajemen Keuangan*: Realokasi dana BOS untuk mendukung pelatihan guru dan pengadaan bahan ajar berbasis proyek.

Untuk memberikan analisis yang objektif, berikut adalah indikator utama kualitas pendidikan di Indonesia saat ini:

1. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025*: Mencapai angka 75,90, meningkat 0,88 poin dari tahun 2024 (75,02). Kenaikan ini menunjukkan perbaikan pada akses pendidikan dan kesehatan secara nasional.
2. *Angka Partisipasi Sekolah (APS)*:
  - a. Kelompok usia 13-15 tahun (SMP) mencapai 95,53%.
  - b. Kelompok usia 16-18 tahun (SMA) masih tertahan di angka 71,44%, menunjukkan adanya tantangan besar dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.
3. *Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)*: Pada tahun 2024, penduduk usia 15 tahun ke atas rata-rata hanya bersekolah selama 9,22 tahun. Ini berarti

mayoritas penduduk hanya menamatkan pendidikan hingga kelas 9 (SMP).

4. *Kualitas Infrastruktur*: Tahun ajaran 2024/2025 mencatat 60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak (ringan, sedang, hingga berat). Kondisi yang sama dialami oleh hampir separuh ruang kelas di tingkat SMP.
5. *Kesenjangan Lulusan dan Lapangan Kerja*: Terdapat sekitar 1,01 juta sarjana menganggur pada pertengahan 2025. Selain itu, lulusan SMK masih menjadi penyumbang tingkat pengangguran tertinggi karena adanya ketimpangan antara keterampilan (*hard skill*) dengan kebutuhan industri yang lebih mengutamakan *soft skills*.
6. *Skor PISA dan Literasi*: Indonesia masih berada di peringkat bawah (68 dari 81 negara) dalam survei PISA. Pemerintah menargetkan skor numerasi naik menjadi 419 pada tahun 2028 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Data di atas memberikan sinyal penting bagi manajemen lembaga pendidikan:

1. *Urgensi Renovasi Fisik*: Manajemen sekolah harus memprioritaskan anggaran pemeliharaan karena tingginya persentase kerusakan ruang kelas agar tidak menghambat proses belajar.
2. *Kebutuhan Tenaga Pendidik*: Indonesia diproyeksikan *kekurangan 1,3 juta guru* pada tahun 2024 akibat gelombang pensiun massal. Manajemen sekolah perlu melakukan perencanaan rekrutmen yang strategis dan efisien.
3. *Fokus Literasi dan Numerasi*: Rendahnya skor PISA menuntut manajemen kurikulum untuk lebih serius mengintegrasikan literasi ke dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler.

## G. Analisis Permasalahan Perubahan Kurikulum di Indonesia

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan suatu keniscayaan, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai problematika yang cukup kompleks. Berdasarkan kajian teoritis dan kondisi empiris saat ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang tergolong urgen, yaitu:

### 1. Kesiapan Sumber Daya Manusia (*Guru*) yang Belum Optimal

Meskipun kurikulum terus diperbarui, banyak guru yang belum sepenuhnya siap dalam memahami konsep dan implementasi kurikulum baru, terutama dalam aspek:

- a. Pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*)
- b. Asesmen autentik
- c. Integrasi teknologi dalam pembelajaran

Hal ini sejalan dengan pandangan *Michael Fullan* bahwa perubahan pendidikan sering gagal bukan karena konsepnya lemah, tetapi karena rendahnya kesiapan pelaksana di lapangan.

### 2. Ketimpangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Perubahan kurikulum yang menuntut digitalisasi dan inovasi pembelajaran tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang merata. Sekolah di daerah perkotaan relatif siap, sedangkan sekolah di daerah terpencil masih menghadapi:

- a. Keterbatasan akses internet
- b. Minimnya perangkat teknologi
- c. Keterbatasan media pembelajaran

### 3. Manajemen Kurikulum yang Belum Efektif

Banyak lembaga pendidikan masih menjalankan kurikulum secara administratif, bukan substantif. Artinya:

- a. Fokus pada penyusunan dokumen, bukan implementasi
- b. Kurangnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan
- c. Lemahnya koordinasi antar komponen sekolah
- d. Resistensi terhadap Perubahan.

4. Perencanaan (*Planning*) tidak berbasis kebutuhan nyata
  - a. Pengorganisasian (*Organizing*) tidak fleksibel dan adaptif
  - b. Pelaksanaan (*Actuating*) tidak maksimal karena keterbatasan SDM
  - c. Pengawasan (*Controlling*) belum berbasis data dan evaluasi berkelanjutan

Akibatnya, perubahan kurikulum sering hanya bersifat formalitas tanpa berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran.

## H. Solusi Strategis dalam Mengatasi Permasalahan

Untuk menjawab permasalahan yang urgen dalam pendidikan di Indonesia, diperlukan solusi yang bersifat komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, sebagai berikut:

### 1. Penguatan Kompetensi Guru (Capacity Building)

Banyak guru merasa terbebani dengan laporan administrasi digital sehingga waktu untuk mendampingi siswa berkurang. Solusi utama adalah peningkatan kualitas guru melalui:

- a. Pelatihan berkelanjutan (continuous professional development)
- b. Workshop implementasi kurikulum berbasis praktik
- c. Program mentoring dan coaching
- d. *Simplifikasi Administrasi* melalui integrasi sistem. Manajemen sekolah harus mengambil peran dalam memfasilitasi tim admin khusus untuk membantu input data, sehingga guru dapat kembali fokus pada inovasi pedagogi di kelas.

Solusi konkret:

- a. Mengaktifkan komunitas belajar seperti KKG dan MGMP
- b. Pelatihan berbasis kebutuhan (need-based training)
- c. Integrasi teknologi dalam pelatihan guru

### 2. Pemerataan Sarana dan Prasarana

Masih banyak sekolah di daerah 3T yang kesulitan mengakses platform digital pendukung kurikulum (seperti PMM).

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu:

- a. Meningkatkan akses teknologi di daerah tertinggal

- b. Menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai
  - c. Mengembangkan system pembelajaran hybrid Management, Sekolah yang minim akses internet diberikan modul cetak berbasis proyek yang setara, sementara pemerintah daerah melakukan pendampingan teknis secara luring melalui Guru Penggerak.
3. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- Manajemen harus bertransformasi menjadi lebih adaptif dan inovatif:
- a. Perencanaan berbasis data (data-driven decision making), Memastikan setiap rupiah di RKAS berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
  - b. Penguatan kepemimpinan kepala sekolah, Kepala sekolah bertindak sebagai Instructional Leader (Pemimpin Pembelajaran), bukan sekadar manajer kantor
  - c. Penerapan manajemen partisipatif, Melibatkan seluruh ekosistem sekolah agar merasa memiliki (*sense of ownership*), Salah satunya kolaborasi guru, peran komite dan orang tua, dan suara siswa (Mendengar aspirasi murid mengenai kenyamanan belajar di kelas).
4. Penyesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Dunia Nyata
- Kurikulum harus relevan dengan tuntutan zaman, Menghubungkan sekolah dengan dunia nyata membutuhkan tiga pilar utama yaitu melalui:
- a. Link and match dengan dunia kerja, Kurikulum tidak disusun sendirian oleh guru, tapi melibatkan masukan dari praktisi atau industri agar kompetensi yang diajarkan sesuai dengan standar kerja.
  - b. Penguatan soft skills dan life skills, Fokus pada kemampuan adaptasi, komunikasi, kepemimpinan, dan penyelesaian masalah (problem solving). Ini jauh lebih awet daripada sekadar hafalan materi.
  - c. Pembelajaran kontekstual, Siswa belajar materi akademik melalui contoh kasus nyata yang mereka temui di lingkungan sekitar.
  - d. Solusi konkret:
    - e. Program magang atau praktik kerja
    - f. Pembelajaran berbasis proyek nyata
    - g. Kolaborasi dengan industri dan masyarakat

# **BAB X**

## **ASPEK ISI DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KURUIKULUM**

## A. Pendahuluan

Kurikulum di sekolah sebagai faktor penentu segala kegiatan pembelajaran di sekolah, karena bahwasannya kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan siswa. Tidak hanya berkaitan dengan siswa, melainkan aspek penting dalam menciptakan pendidikan berkualitas tinggi untuk meraih kemajuan masyarakat maupun pencapaian visi misi dan cita-cita bangsa. Maka, sangatlah penting bagi sekolah untuk mengetahui segala sesuatu tentang manajemen kurikulum yang ada di sekolah, sehingga nantinya hal tersebut akan berguna bagi pihak sekolah dalam menentukan sikap terhadap arah pembelajaran dan juga berguna bagi murid, sehingga proses pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat dan juga kurikulum tersebut dapat menghantarkan sekolah dalam mencapai visi dan misinya.<sup>341</sup>

Dalam manajemen pengembangan kurikulum menurut Oemar Hamalik oleh Alfiansyah yang menyatakan bahwa terdiri dari empat tahap manajemen pengembangan kurikulum yang meliputi pertama menentukan fondasi yaitu dasar-dasar yang diperlukan untuk mengembangkan kurikulum, kedua konstruksi yaitu mengembalikan model kurikulum yang diharapkan berdasarkan fondasi, ketiga implementasi atau pelaksanaan kurikulum, keempat evaluasi yaitu menilai kurikulum secara komprehensif dan sistemik. Sehingga kurikulum merupakan suatu sistem yang mempunyai kumpulan komponen yang saling berkaitan dan menunjang satu sama lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi.<sup>342</sup> Dalam bentuk sistem ini, pengembangan kurikulum mengarah pada seluruh komponen-komponen yang ada dalam kurikulum, sehingga kurikulum dikembangkan agar sesuai

---

<sup>341</sup> Muhammad Alfiansyah, Nazaruddin Nazaruddin, and Yuni Afrilita, "Desain Manajemen Kurikulum Sekolah Umum," *At-Tafkir* 14, no. 2 (2021): 116–33, <https://doi.org/10.32505/at.v14i2.2591>.

<sup>342</sup> Nurul Huda, "Manajemen Pengembangan Kurikulum," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 52–75, <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i2.113>.

dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa dalam proses belajar di sekolah.

Sebagian besar sekolah dalam mengembangkan kurikulum hanya sekedar pemenuhan administrasi tanpa mementingkan aspek krusial dalam komponen kurikulum. Pengembangan kurikulum sering terjadi ketidakselarasan antara kompetensi yang diajarkan di lembaga pendidikan dengan tuntutan nyata di dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, kecenderungan ini dipicu oleh lambatnya proses pembaruan materi ajar atau komponen isi dalam kurikulum dan kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam tahap evaluasi kebutuhan, sehingga kurikulum menjadi statis dan kurang relevan.<sup>343</sup> Dampaknya, lulusan sering kali memiliki pengetahuan namun gagap saat dihadapkan pada implementasi praktis dan teknologi terbaru yang pada mengalami penurunan efektivitas manajemen pengembangan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sedangkan pada tahap evaluasi, terlalu sering membuat kurikulum baru dengan dalih mengikuti perkembangan zaman, namun tidak pernah melakukan evaluasi secara ilmiah dan komprehensif.<sup>344</sup> Dengan demikian, kurikulum yang dibuat hanya akan memperbarui program tanpa mengetahui masalah dan kekurangan yang ada pada lembaga pendidikan. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas tentang analisis aspek isi dalam pengembangan kurikulum dan tata kelola evaluasi kurikulum, sehingga dapat menjadi acuan pemangku lembaga pendidikan agar lebih maksimal dalam memperoleh hasil dan tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien.

---

<sup>343</sup> Lalu Abdurrahman Wahid and Tasman Hamami, "Tantangan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Dan Strategi Pengembangannya Dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Masa Depan," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (December 31, 2021), <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.15222>.

<sup>344</sup> Tio Ari Laksono and Imania Fatwa Izzulka, "Evaluasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan," *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 3 (May 11, 2022): 4082–92, <https://doi.org/10.31004/EDUKATIF.V4I3.2776>.

## B. Pengembangan Kurikulum Pada Aspek Isi

Aspek isi dalam kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Komponen isi atau materi dalam kurikulum itu menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang diberikan waktu pembelajaran di sekolah, maupun berupa aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada hakikatnya aspek isi dalam kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.<sup>345</sup> Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Logika, yaitu pengetahuan tentang benar-salah, berdasarkan prosedur keilmuan.
2. Etika, yaitu pengetahuan tentang baik-buruk, nilai, dan moral.
3. Estetika, yaitu pengetahuan tentang indah-jelek, yang ada nilai seni.

Kegiatan inti pada perencanaan dalam tahap manajemen pengembangan kurikulum adalah merumuskan isi kurikulum yang memuat seluruh materi dan kegiatan yang terdapat dalam bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan. Sedangkan menurut Dadang yang dikutip oleh Nurul menjelaskan bahwa isi kurikulum dapat disusun sebagai berikut:

1. Bidang-bidang keilmuan yang terdiri atas ilmu-ilmu sosial, administrasi, ekonomi, komunikasi, IPA, matematika, dan lain-lain.
2. Jenis-jenis mata pelajaran disusun dan dikembangkan bersumber dari bidang-bidang tersebut sesuai dengan tuntutan program.
3. Tiap mata pelajaran dikembangkan menjadi satuan-satuan pembahasan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar.

---

<sup>345</sup> Laksmi Dewi and Gema Rullyana, "Komponen Kurikulum," accessed April 27, 2026, [https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/554048/mod\\_resource/content/2/Modul-3-Komponen-Kurikulum\\_.pdf](https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/554048/mod_resource/content/2/Modul-3-Komponen-Kurikulum_.pdf).

4. Tiap-tiap mata pelajaran dikembangkan dalam bentuk silabus dan RPP.<sup>346</sup>

Oleh karena itu, pengembangan isi kurikulum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengandung bahan kajian atau topik-topik yang dapat dipelajari siswa dalam proses belajar dan pembelajaran.
2. Berorientasi pada tujuan, sesuai dengan hirarki tujuan pendidikan.<sup>347</sup>

Kurikulum Merdeka mengintegrasikan Standar Isi melalui Keputusan Mendikbudristek No. 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran (CP), dengan lima prinsip utama pengembangan isi:

1. Berbasis kompetensi

Prinsip pertama menekankan kompetensi utuh (pengetahuan, keterampilan, sikap) dari CP akhir fase, bukan daftar topik, misalnya CP Bahasa Indonesia Fase D fokus pada menghasilkan teks prosedur logis-kreatif-santun.

2. Orientasi kedalaman spiral

Prinsip kedua menerapkan kurikulum spiral (Bruner) dengan pengurangan materi padat, di mana tema seperti pecahan atau energi berkembang dari pengenalan konkret (Fase A) hingga generalisasi (Fase D). Namun, kritik muncul saat guru mereduksi kompetensi menjadi fakta prosedural atau mengulang materi tanpa peningkatan kognitif, menyebabkan stagnasi belajar.

3. Integrasi horizontal-vertikal

Prinsip ketiga mewajibkan integrasi horisontal (antar-mapel dalam fase sama, seperti tema "Kearifan Lokal" di IPS dan SBdP) dan vertikal (kesinambungan antar-fase via Alur Tujuan Pembelajaran/ATP).

---

<sup>346</sup> Huda, "Manajemen Pengembangan Kurikulum."

<sup>347</sup> Laksmi Dewi and Gema Rullyana, "Komponen Kurikulum."

#### 4. Relevansi kontekstual

Prinsip keempat memberikan fleksibilitas 20-30% untuk konten lokal (misal: studi kasus pembuatan garam di pesisir), dengan 70-80% materi inti nasional via Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kritiknya: integrasi horisontal lemah karena kurang koordinasi lintas-mapel, sementara fleksibilitas lokal jarang dimanfaatkan akibat keterbatasan waktu dan kapasitas guru, sehingga sekolah di seluruh Indonesia mengandalkan buku nasional seragam.

#### 5. Akomodasi dimensi kognitif-psikomotorik-afektif

Prinsip kelima memastikan CP mencakup kata kerja operasional untuk kognitif ("menganalisis"), psikomotorik ("merancang"), dan afektif ("bertanggung jawab"). Meski demikian, ranah afektif sering direduksi menjadi hafalan moral tanpa internalisasi, seperti materi "peduli lingkungan" yang hanya definisi, bukan refleksi atau aksi nyata. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini ideal untuk pendidikan holistik, tapi implementasi lapangan memerlukan penguatan pemahaman guru dan koordinasi sekolah agar tidak kembali ke pendekatan content-based konvensional.<sup>348</sup>

### C. Pengembangan Kurikulum Pada Aspek Evaluasi

Pada konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum, melalui evaluasi akan menentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus diperbaiki. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektifitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum komponen evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan.<sup>349</sup>

---

<sup>348</sup> BSKAP, *Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah, BN 2025 (463); 16 Hlm*, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/322487/permendikdasmen-no-11-tahun-2025>.

<sup>349</sup> Laksmi Dewi and Gema Rullyana, "Komponen Kurikulum."

Secara metodologis, aspek evaluasi dalam kurikulum mencakup dua fungsi utama, yaitu formatif dan sumatif, yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pengembangan kurikulum berlangsung untuk mengidentifikasi kelemahan sejak dini, Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kurikulum selesai diimplementasikan dalam periode tertentu guna mengukur dampak dan keberhasilannya secara menyeluruh. Kedua fungsi ini sangat diperlukan dalam proses pengembangan kurikulum didasarkan pada data empiris yang objektif, bukan sekadar asumsi administratif semata.<sup>350</sup>

Proses pengembangan pada aspek evaluasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya mengukur kognitif siswa tetapi juga meninjau kesiapan sarana prasarana, kompetensi pendidik, dan kecocokan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja atau masyarakat. Karena evaluasi menjadi tahap kritis dalam siklus kurikulum yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas, di mana hasil evaluasi menjadi landasan utama untuk melakukan rekonstruksi dan perbaikan kurikulum secara berkelanjutan.<sup>351</sup>

Evaluasi dalam pengembangan kurikulum merupakan komponen integral sepanjang proses dari tujuan hingga strategi pembelajaran yang diatur oleh Permendikbudristek No. 21/2022 yang selaras dengan Kurikulum Merdeka. Prosedur pengembangan evaluasi meliputi penetapan tujuan, susun kisi-kisi, mengembangkan instrumen (soal/rubrik), telaah kualitas, uji coba, implemetasi penilaian, mengolah hasil (analisis

---

<sup>350</sup> “Scriven The Methodology of Evaluation 1967 | PDF,” accessed April 27, 2026, <https://www.scribd.com/document/495167630/283341599-Scriven-the-Methodology-of-Evaluation-1967>.

<sup>351</sup> Francis P. Hunkins and Allan C. Ornstein, “Curriculum : Foundations, Principles, and Issues, Global Edition,” 2016, 382, [https://books.google.com/books/about/Curriculum\\_Foundations\\_Principles\\_and\\_Is.html?hl=id&id=D8OfjwEACAAJ](https://books.google.com/books/about/Curriculum_Foundations_Principles_and_Is.html?hl=id&id=D8OfjwEACAAJ).

kesalahan), tindak lanjut (remedial/pengayaan/perbaikan strategi), serta laporkan dengan deskripsi kompetensi dan rekomendasi.<sup>352</sup>

Standar Penilaian menekankan bahwa evaluasi harus mengukur capaian kompetensi utuh (pengetahuan, keterampilan, sikap:

JENIS KOMPETENSI	OBJEK PENILAIAN	CONTOH INSTRUMEN
<b>PENGETAHUAN</b>	Kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta	Tes tertulis (uraian, pilihan ganda kompleks), penugasan
<b>KETERAMPILAN</b>	Kemampuan melakukan praktik, menghasilkan karya, atau berpikir prosedural	Observasi kinerja (checklist/rubrik), portofolio, proyek
<b>SIKAP</b>	Nilai, karakter, dan perilaku (Profil Pelajar Pancasila)	Jurnal observasi, penilaian diri, penilaian antar tema

<sup>352</sup> Kemendikbudristek, “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah,” *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi*, 2022, 9.

# **BAB XI**

## **PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KURIKULUM DALAM MODEL PROJECT BASED LEARNING**

## A. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan di era globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma pembelajaran dari yang bersifat konvensional menuju pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tidak lagi hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dalam konteks ini, model pembelajaran menjadi salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan proses pendidikan.

Salah satu model pembelajaran yang dinilai mampu menjawab tantangan tersebut adalah Project Based Learning (PjBL). Model ini menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran melalui kegiatan proyek yang kontekstual dan bermakna. Melalui PjBL, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung dalam memecahkan masalah nyata.<sup>353</sup>

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kurikulum Merdeka mendorong penerapan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik. Kurikulum ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.<sup>354</sup>

Dalam implementasinya, Project Based Learning (PjBL) menjadi salah satu pendekatan yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka. Hal ini karena PjBL memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung, bekerja secara

---

<sup>353</sup> Zaharah, "Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) di SMP Negeri 22 Kota Jambi," *Biodik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi* 09 (2023): 139–150.

<sup>354</sup> M. Ferry Irawan, "Perencanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Project Based Learning pada Kurikulum Merdeka," *PIONIR: Jurnal Pendidikan* 12, no. 3 (2023): 38–46.

kolaboratif, serta menghasilkan produk nyata yang memiliki nilai guna. Selain itu, penerapan PjBL juga sejalan dengan upaya penguatan Profil Pelajar Pancasila yang menjadi fokus utama dalam Kurikulum Merdeka.<sup>355</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan PjBL di sekolah, seperti keterbatasan pemahaman guru, perencanaan pembelajaran yang kurang matang, serta kesulitan dalam mengintegrasikan proyek dengan kurikulum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, desain, langkah-langkah, serta implementasi PjBL dalam Kurikulum Merdeka agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan Project Based Learning dalam Kurikulum Merdeka pada proses pembelajaran.

## **B. Desain Penyusunan Kurikulum Dalam Model PjBL**

Desain penyusunan kurikulum berbasis Project Based Learning (PjBL) merupakan proses perencanaan sistematis yang bertujuan untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ke dalam struktur kurikulum secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kurikulum tidak hanya dipahami sebagai dokumen perencanaan pembelajaran, tetapi juga sebagai pedoman dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik.<sup>356</sup>

Penyusunan kurikulum berbasis PjBL diawali dengan analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang sesuai dengan tingkat

---

<sup>355</sup> Sepdiana Triastuti, Ilham Arvan Junaidi, dan Imelda Ratih Ayu, "Penerapan Model Project Based Learning dalam Kurikulum Merdeka Belajar di SDN 02 Trans Bangsa Negara," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023).

<sup>356</sup> Wahyu, R., "Implementasi Model Project Based Learning (PjBL) Ditinjau dari Penerapan Kurikulum 2013," *Jurnal Tecnoscienza* 1, no. 1 (2016): 49–62.

perkembangan, minat, serta konteks lingkungan peserta didik. Selain itu, analisis juga mencakup identifikasi capaian pembelajaran yang harus dicapai sesuai dengan standar yang berlaku, khususnya dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan diferensiasi pembelajaran.<sup>357</sup>

Tahap berikutnya adalah perumusan tujuan pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan proyek. Dalam kurikulum berbasis PjBL, tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dirancang untuk mendorong peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan proyek. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PjBL efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.<sup>358</sup>

Selanjutnya, penyusunan kurikulum berbasis PjBL melibatkan pengembangan perangkat pembelajaran, seperti modul ajar, bahan ajar, serta media pembelajaran yang mendukung pelaksanaan proyek. Perangkat pembelajaran tersebut harus dirancang secara sistematis agar mampu memfasilitasi peserta didik dalam menjalani setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis PjBL juga menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang efektif.<sup>359</sup>

Selain itu, desain kurikulum berbasis PjBL juga harus memperhatikan integrasi antar mata pelajaran. Proyek yang dirancang sebaiknya bersifat multidisipliner sehingga mampu menghubungkan berbagai konsep dari beberapa bidang studi. Dengan demikian, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan tidak terkotak-kotak berdasarkan mata pelajaran. Pendekatan ini juga mendukung

---

<sup>357</sup> M. Ferry Irawan, "Perencanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Project Based Learning (2023).

<sup>358</sup> Wahyu, R., "Implementasi Model Project Based Learning (PjBL)...," (2016).

<sup>359</sup> K. Dwiningsih et al., "Pelatihan Pembuatan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Berbasis Project Based Learning (PjBL)," *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 6 (2023): 1920–1933.

pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata.<sup>360</sup>

Aspek penting lainnya dalam penyusunan kurikulum berbasis PjBL adalah sistem penilaian. Penilaian harus dirancang secara autentik dan berkelanjutan, mencakup penilaian proses dan hasil. Instrumen penilaian dapat berupa rubrik, portofolio, jurnal refleksi, serta presentasi proyek. Dalam pembelajaran berbasis PjBL, penilaian tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peserta didik.<sup>361</sup>

Dalam era digital, desain kurikulum berbasis PjBL juga dapat diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis teknologi (*e-learning*). Pemanfaatan teknologi memungkinkan peserta didik untuk mengakses berbagai sumber belajar, berkolaborasi secara daring, serta mempresentasikan hasil proyek secara lebih inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa PjBL tidak hanya relevan dalam pembelajaran konvensional, tetapi juga dapat dikembangkan dalam lingkungan pembelajaran digital.<sup>362</sup>

Dengan demikian, desain penyusunan kurikulum berbasis Project Based Learning (PjBL) merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Kurikulum yang dirancang dengan pendekatan PjBL akan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan karakter secara menyeluruh.

---

<sup>360</sup> F. Ahmad, M. Yunus, dan N. I. Sari, "Pelatihan Pengembangan Modul Ajar Berbasis Project Based Learning (PjBL) dan Problem Based Learning (PBL)," *ABDI KIMIA* 1, no. 2 (2024): 10–20.

<sup>361</sup> Wahyu, R., (2016).

<sup>362</sup> P. S. Dewi, "E-Learning: PjBL pada Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum dan Silabus," *Jurnal Cendekia* 5, no. 2 (2021): 1332–1340.

### C. Konsep dan Karakteristik Model Pembelajaran PjBL

Project Based Learning (PjBL) merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang menempatkan proyek sebagai inti dalam proses pembelajaran. Model ini menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan suatu permasalahan nyata. Dalam PjBL, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga secara aktif melakukan eksplorasi, investigasi, serta menghasilkan produk yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari.<sup>363</sup>

Secara konseptual, PjBL berakar pada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta keterampilan pemecahan masalah. Model ini juga sejalan dengan gagasan John Dewey yang menekankan pentingnya *learning by doing*, yaitu belajar melalui pengalaman langsung sebagai cara efektif dalam memahami suatu konsep.<sup>364</sup>

Selain itu, PjBL juga dikembangkan lebih lanjut oleh William Heard Kilpatrick melalui metode proyek (*project method*), yang menempatkan aktivitas proyek sebagai sarana utama dalam pembelajaran. Dalam pendekatan ini, peserta didik didorong untuk terlibat secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mereka sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual.<sup>365</sup> Adapun karakteristik utama dari model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat dilihat dari beberapa aspek.

---

<sup>363</sup> Zaharah, "Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Berbasis Proyek (2023).

<sup>364</sup> John Dewey, *Experience and Education* (New York: Macmillan, 1938).

<sup>365</sup> William Heard Kilpatrick, "The Project Method," *Teachers College Record* (1918).

Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), di mana peserta didik menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran.

Kedua, adanya permasalahan atau pertanyaan mendasar (*driving question*) yang menjadi fokus dalam kegiatan proyek. Pertanyaan ini bersifat terbuka dan menantang, sehingga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mencari solusi secara mandiri maupun kelompok.<sup>366</sup>

Ketiga, pembelajaran berbasis proyek menghasilkan produk nyata sebagai output dari proses pembelajaran. Produk tersebut dapat berupa karya tulis, presentasi, video, atau bentuk lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran.

Keempat, proses pembelajaran dalam PjBL melibatkan kegiatan investigasi yang mendalam, di mana peserta didik melakukan pengumpulan data, analisis, serta interpretasi informasi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.<sup>367</sup>

Kelima, PjBL menekankan pada kolaborasi antar peserta didik. Dalam pelaksanaannya, peserta didik sering bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, serta kemampuan bekerja sama.

Keenam, adanya proses refleksi sebagai bagian dari pembelajaran, di mana peserta didik mengevaluasi pengalaman belajar mereka untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di masa yang akan datang.<sup>368</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Project Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Melalui PjBL, peserta didik dilatih untuk menjadi individu yang aktif, kreatif, dan mampu

---

<sup>366</sup> Sepdiana Triastuti, Ilham Arvan Junaidi, dan Imelda Ratih Ayu, "Penerapan Model Project Based Learning (2023)

<sup>367</sup> M. Ferry Irawan, "Perencanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Project Based Learning (2023).

<sup>368</sup> Junita Dwi Wardhani, Sri Katoningsih, dan Tri Asmawulan, "Manfaat Model Pembelajaran Project Based Learning untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Implementasinya dalam Kurikulum Merdeka," *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas (BRUE)* 9, no. 2 (2023)

menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan nyata. Model ini sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pendidikan modern, khususnya dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan pengembangan kompetensi secara holistik.

#### **D. Desain Penerapan PjBL dalam Kurikulum**

Desain penerapan Project Based Learning (PjBL) dalam kurikulum merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ke dalam sistem pembelajaran secara terencana dan sistematis. Desain ini tidak hanya mencakup pemilihan metode pembelajaran, tetapi juga melibatkan penyusunan tujuan pembelajaran, materi, kegiatan belajar, serta sistem penilaian yang selaras dengan karakteristik PjBL. Dalam konteks ini, kurikulum berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengarahkan proses pembelajaran agar berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>369</sup>

Dalam merancang penerapan PjBL, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Capaian tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Tujuan pembelajaran dalam PjBL harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga aspek keterampilan dan sikap. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran holistik yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik.<sup>370</sup>

Selanjutnya, desain penerapan PjBL perlu memperhatikan pemilihan tema atau topik proyek yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Tema yang kontekstual akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi serta meningkatkan motivasi belajar. Proyek yang dirancang harus mampu

---

<sup>369</sup> M. Ferry Irawan, "Perencanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Project Based Learning (2023).

<sup>370</sup> Junita Dwi Wardhani, Sri Katoningsih, dan Tri Asmawulan, "Manfaat Model Pembelajaran Project Based Learning (2023).

menghubungkan konsep pembelajaran dengan situasi nyata, sehingga peserta didik dapat melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak bersifat abstrak semata.<sup>371</sup>

Selain itu, dalam desain kurikulum berbasis PjBL, guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang terstruktur namun tetap fleksibel. Kegiatan pembelajaran harus mencakup tahapan-tahapan yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan eksplorasi, investigasi, kolaborasi, serta refleksi. Guru juga perlu menentukan strategi pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif peserta didik, seperti diskusi kelompok, observasi lapangan, dan presentasi hasil proyek. Peran guru dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi.<sup>372</sup>

Aspek penting lainnya dalam desain penerapan PjBL adalah sistem penilaian. Penilaian dalam PjBL harus bersifat autentik, yaitu menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Penilaian tidak hanya dilakukan pada hasil akhir proyek, tetapi juga pada proses yang dilalui oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menyiapkan instrumen penilaian seperti rubrik, lembar observasi, serta penilaian diri dan teman sebaya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan peserta didik.<sup>373</sup>

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, desain penerapan PjBL menjadi semakin relevan karena kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka juga mendorong integrasi pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi

---

<sup>371</sup> Zaharah, "Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Berbasis Proyek (2023).

<sup>372</sup> Sepdiana Triastuti, Ilham Arvan Junaidi, dan Imelda Ratih Ayu, "Penerapan Model Project Based Learning (2023).

<sup>373</sup> Sepdiana Triastuti, Ilham Arvan Junaidi, dan Imelda Ratih Ayu, "Penerapan Model Project Based Learning (2023).

peserta didik secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan PjBL dalam kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai strategi pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang lebih luas.<sup>374</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain penerapan Project Based Learning (PjBL) dalam kurikulum harus dirancang secara komprehensif dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, pemilihan tema, strategi kegiatan, serta sistem penilaian. Desain yang baik akan mendukung terciptanya pembelajaran yang aktif, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern.

#### **E. Langkah Pembuatan Proyek PjBL**

Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau *Project Based Learning* (PjBL) merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang semakin banyak diterapkan dalam sistem pendidikan modern, khususnya dalam mendukung implementasi kurikulum yang berorientasi pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Model ini menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pengerjaan proyek yang kontekstual, bermakna, dan berkaitan dengan kehidupan nyata. Dalam PjBL, peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai subjek pembelajaran yang secara mandiri maupun kolaboratif membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung<sup>375</sup>.

Pembuatan proyek PjBL tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan perencanaan yang matang agar proyek yang dirancang benar-benar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Proyek harus disusun berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai, relevan dengan konteks kehidupan siswa, serta memungkinkan adanya proses eksplorasi,

---

<sup>374</sup> Sepdiana Triastuti, Ilham Arvan Junaidi, dan Imelda Ratih Ayu, "Penerapan Model Project Based Learning (2023).

<sup>375</sup> Junita Dwi Wardhani, Sri Katoningsih, and Tri Asmawulan, "Manfaat Model Pembelajaran Project Based Learning (2023).

investigasi, dan refleksi. Selain itu, proyek juga harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, ketersediaan sumber daya, serta waktu yang dialokasikan dalam pembelajaran. Dengan demikian, langkah-langkah dalam pembuatan proyek PjBL menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami oleh pendidik agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

1. Langkah pertama dalam pembuatan proyek PjBL adalah menentukan pertanyaan mendasar atau *driving question*. Pertanyaan ini menjadi titik awal yang akan mengarahkan seluruh proses pembelajaran. Pertanyaan mendasar harus bersifat terbuka, menantang, dan mampu merangsang rasa ingin tahu peserta didik. Selain itu, pertanyaan tersebut harus relevan dengan materi pembelajaran serta memiliki keterkaitan dengan kehidupan nyata. Misalnya, dalam pembelajaran tentang lingkungan, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti “Bagaimana cara mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah?” Pertanyaan ini tidak hanya memicu diskusi, tetapi juga mendorong siswa untuk mencari solusi nyata melalui proyek yang akan mereka kerjakan.
2. Langkah kedua adalah merancang perencanaan proyek. Pada tahap ini, guru bersama peserta didik menentukan tujuan proyek, langkah-langkah yang akan dilakukan, serta produk akhir yang diharapkan. Perencanaan proyek harus mencakup aspek-aspek penting seperti penentuan topik, pembagian tugas, sumber informasi yang akan digunakan, serta metode yang akan diterapkan. Dalam tahap ini, guru juga perlu memastikan bahwa proyek yang dirancang sesuai dengan prinsip ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree). *Audience* merujuk pada siapa yang akan belajar, yaitu peserta didik. *Behavior* menggambarkan kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dimiliki setelah proyek selesai. *Condition* menjelaskan kondisi atau situasi saat pembelajaran berlangsung, sedangkan *Degree* menunjukkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Dengan menggunakan prinsip

ABCD, tujuan pembelajaran dalam proyek menjadi lebih jelas dan terukur<sup>376</sup>.

3. Langkah ketiga adalah menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Guru perlu membagi waktu ke dalam beberapa tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jadwal ini juga harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan proyek serta kemampuan peserta didik. Selain itu, penjadwalan yang baik akan membantu siswa dalam mengatur waktu dan meningkatkan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Guru juga dapat menetapkan tenggat waktu untuk setiap tahap agar proses pembelajaran berjalan lebih terstruktur.
4. Langkah keempat adalah memfasilitasi pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada siswa selama proses berlangsung. Dalam pelaksanaan proyek, siswa diharapkan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam kelompok, melakukan penelitian, mengumpulkan data, serta mengolah informasi yang diperoleh. Proses ini juga melatih keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan komunikasi siswa. Guru perlu memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik secara berkala agar mereka tetap berada pada jalur yang benar.
5. Langkah kelima adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses proyek. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kelompok atau individu menjalankan proyek sesuai dengan rencana. Guru dapat menggunakan berbagai instrumen penilaian seperti lembar observasi, jurnal harian, atau laporan kemajuan. Evaluasi tidak hanya

---

<sup>376</sup> M Ferry Irawan, "PERENCANAAN PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BERBASIS PROJECT BASED LEARNING PADA KURIKULUM MERDEKA," *PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN* 12, no. 3 (2023): 38–46.

dilakukan pada hasil akhir proyek, tetapi juga pada proses yang dilalui oleh siswa. Hal ini penting karena dalam PjBL, proses pembelajaran memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hasil akhir. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proyek yang telah dilaksanakan serta memberikan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya.

6. Langkah keenam adalah menguji hasil proyek atau presentasi produk. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas atau audiens yang lebih luas. Presentasi ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan hasil kerja mereka serta menjelaskan proses yang telah dilalui. Selain itu, tahap ini juga melatih kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri siswa. Guru dapat memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kualitas produk, kreativitas, serta kemampuan dalam menyampaikan informasi. Penilaian juga dapat melibatkan teman sebaya untuk memberikan perspektif yang lebih luas.
7. Langkah ketujuh adalah melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar. Refleksi merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam PjBL. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk mengevaluasi pengalaman mereka selama mengerjakan proyek. Mereka dapat mengidentifikasi apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, serta solusi yang telah dilakukan. Refleksi juga membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran diri dan meningkatkan kemampuan metakognitif. Guru dapat memfasilitasi refleksi melalui diskusi kelas, jurnal refleksi, atau wawancara. Dengan adanya refleksi, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak yang lebih mendalam bagi peserta didik.

## **F. Implementasi PjBL Dalam Kurikulum Merdeka**

Implementasi *Project Based Learning* (PjBL) dalam Kurikulum Merdeka merupakan salah satu langkah strategis dalam mentransformasikan sistem pembelajaran di Indonesia agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi secara holistik yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Dalam konteks ini, PjBL menjadi pendekatan yang sangat selaras karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara aktif, kontekstual, dan bermakna melalui pengalaman langsung. Pembelajaran tidak lagi berfokus pada transfer materi semata, tetapi lebih kepada proses eksplorasi, kolaborasi, dan penciptaan solusi atas permasalahan nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari<sup>377</sup>.

Kurikulum Merdeka juga memperkenalkan konsep *Profil Pelajar Pancasila* yang mencakup enam dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Implementasi PjBL menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan profil tersebut karena dalam prosesnya, peserta didik dilatih untuk bekerja sama, berpikir kritis, serta menghasilkan karya yang inovatif. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek juga memberikan fleksibilitas bagi guru dalam mengembangkan materi sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih adaptif dan inklusif.

Implementasi PjBL dalam Kurikulum Merdeka mengikuti sintak atau tahapan yang sistematis. Sintak *Project Based Learning* (PjBL) adalah enam tahapan utama yang meliputi: (1) *Pertanyaan Mendasar*, (2) *Mendesain Perencanaan*, (3) *Menyusun Jadwal*, (4) *Memonitor Kemajuan Proyek*, (5) *Menguji Hasil (Penilaian)*, dan (6) *Evaluasi Pengalaman*. Keenam tahapan ini menjadi kerangka kerja yang membantu guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek secara efektif.

---

<sup>377</sup> Zaharah, "Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Berbasis Proyek (2023).

1. Tahap pertama, yaitu pertanyaan mendasar (*driving question*), merupakan fondasi utama dalam PjBL. Dalam tahap ini, guru merumuskan pertanyaan yang bersifat terbuka, menantang, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Pertanyaan ini berfungsi sebagai pemicu rasa ingin tahu sekaligus sebagai arah dalam pelaksanaan proyek. Dalam Kurikulum Merdeka, pertanyaan mendasar juga diharapkan mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu aktual, seperti lingkungan, sosial, atau teknologi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata.
2. Tahap kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Pada tahap ini, guru bersama peserta didik menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan selama proyek berlangsung. Perencanaan mencakup penentuan tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, pembagian tugas, serta sumber belajar yang akan digunakan. Dalam Kurikulum Merdeka, perencanaan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, sementara peserta didik didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proyek yang dikerjakan<sup>378</sup>.
3. Tahap ketiga adalah menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Penjadwalan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Guru bersama peserta didik menentukan waktu untuk setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek. Dalam Kurikulum Merdeka, penjadwalan juga mempertimbangkan alokasi waktu pembelajaran yang fleksibel, sehingga memungkinkan integrasi proyek dengan berbagai mata pelajaran. Selain itu, penjadwalan yang baik juga

---

<sup>378</sup> Sepdiana Triastuti, Ilham Arvan Junaidi, and Imelda Ratih Ayu, "Penerapan Model Project Based Learning (2023).

membantu peserta didik dalam mengelola waktu dan meningkatkan disiplin dalam bekerja.

4. Tahap keempat adalah memonitor kemajuan proyek. Pada tahap ini, guru melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta untuk memberikan bimbingan apabila terdapat kendala. Dalam Kurikulum Merdeka, monitoring tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga dapat melibatkan penilaian diri (*self-assessment*) dan penilaian teman sebaya (*peer-assessment*). Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana mereka diberikan kesempatan untuk merefleksikan dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri.
5. Tahap kelima adalah menguji hasil atau penilaian proyek. Penilaian dalam PjBL tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui oleh peserta didik. Dalam Kurikulum Merdeka, penilaian dilakukan secara autentik, yaitu dengan menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Produk yang dihasilkan dalam proyek dapat berupa laporan, presentasi, karya seni, atau produk lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Guru menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur untuk menilai kualitas produk serta proses kerja peserta didik.
6. Tahap keenam adalah evaluasi pengalaman belajar. Evaluasi ini dilakukan untuk merefleksikan seluruh proses pembelajaran yang telah berlangsung. Peserta didik diajak untuk mengidentifikasi apa yang telah mereka pelajari, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah. Dalam Kurikulum Merdeka, refleksi menjadi bagian penting dalam pembelajaran karena membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan metakognitif. Guru juga dapat menggunakan hasil refleksi ini untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran di masa yang akan datang.

# **BAB XII**

**DESAIN KURIKULUM: SENTRALISASI,  
DESENTRALISASI, DAN CAMPURAN**

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, kurikulum menjadi komponen utama yang menentukan arah, tujuan, serta proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara tepat agar mampu menjawab kebutuhan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pentingnya pendidikan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 maka dari itu dapat dipahami bahwa pendidikan sangatlah penting. Pemerintah menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan, anggaran pendidikan akan dinaikkan, langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan akan diambil, dan berbagai masalah di pendidikan dasar, menengah dan tinggi akan diselesaikan. Tentunya hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehubungan dengan itu undang undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan berarti lingkungan belajar dan itu adalah upaya yang disengaja dan sadar untuk menciptakan suatu proses, akhlak mulia dan keterampilan.<sup>379</sup>

Kurikulum merupakan bagian terpenting dalam kelengkapan proses pendidikan. Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan karena itu diantara bidang-bidang pendidikan yaitu: manajemen pendidikan, kurikulum, dan layanan siswa, kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Pengembangan kurikulum tersebut minimal salah satu di antaranya terdapat desain kurikulum atau kurikulum tertulis.<sup>380</sup>

Pembaharuan inovasi kurikulum pendidikan di Indonesia semakin hari kian membawa kemajuan perbaikan kualitas pendidikan nasional. Hal ini terjadi demi mengikuti arus perkembangan revolusi industri 4.0 yang

---

<sup>379</sup> M fadliq Ananta Neliwati, Bunga ulan tika, Fitra khoiron, Juni Tri Iswani, 'Penerapan Kurikulum Campuran (k-13 & Kurikulum Merdeka) Di Man Binjai', 10.2, 92–100.

<sup>380</sup> Zahid Zufar, At Thariq, and Agus Wedi, 'Model Adaptive Blended Curriculum ( ABC ) Sebagai Inovasi Kurikulum Dalam Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan', 8.2 (2020), 91–104 <<https://doi.org/10.31629/kiprah.v8i2.2002>>.

telah terjadi di beberapa negara maju di dunia.<sup>381</sup> Dalam praktiknya, pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan campuran. Pendekatan sentralisasi menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang sepenuhnya mengatur kurikulum, sedangkan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah atau satuan pendidikan. Namun, kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, muncul pendekatan kurikulum campuran sebagai bentuk perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel karena tetap mempertahankan standar nasional sekaligus memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penerapan kurikulum campuran dalam sistem pendidikan di Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara optimal.

## **B. Kurikulum Sentralisasi**

Dalam sistem kurikulum yang bersifat sentralistis, kewenangan utama dalam metode ini berada di tangan pemerintah pusat atau tim ahli yang sudah dipilih secara khusus. Melalui metode ini kurikulum dirancang secara terpusat dengan standar nasional, sehingga sekolah dan guru lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sidik (2016) yakni dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan dan evaluasi kurikulum yang bersifat makro, mereka berperan dalam kurikulum mikro.<sup>382</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam sistem sentralistis terdapat pembagian peran antara perancang kurikulum di tingkat pusat dan

---

<sup>381</sup> Mustiningsih Ruri Indra Fitriani, Septia Dwi Anggraeni Putri, 'PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Ruri Indra Fitriani, Septia Dwi Anggraeni Putri, Mustiningsih', 2003, 265–73.

<sup>382</sup> Firman Sidik, 'Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam', *Jurnal Irfani*, 12.1 (1979), 100–114.

pelaksana di tingkat sekolah. Kurikulum makro mencakup tujuan, struktur, dan arah pendidikan yang disusun oleh tim ahli, sedangkan peran guru hanya mengembangkan kurikulum dalam lingkup terbatas yakni program tahunan dan satuan pembelajaran.

Selain itu, Sidik (2016) menjelaskan bahwa kurikulum makro disusun oleh tim khusus yang terdiri atas para ahli, sedangkan guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu satu tahun, satu semester, beberapa minggu, atau beberapa hari saja.<sup>383</sup> Dengan demikian, penerapan sentralistis dalam pengembangan kurikulum memposisikan guru sebagai pelaksana teknis yang memiliki peranan untuk menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran. Meskipun ruang guru menjadi terbatas, akan tetapi guru masih memiliki peran penting dalam mengorganisasi tujuan, materi, metode, dan evaluasi pada tingkat operasional pembelajaran.

#### 1. Kewenangan dan Standarisasi Kurikulum Nasional

Dalam sistem sentralistis, seluruh kewenangan desain kurikulum berada pada pemerintah pusat, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Perihal ini mencakup penentuan kerangka dasar, struktur kurikulum, hingga perangkat pembelajaran. Widyastono (2012) menjelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengembangan kurikulum dipegang oleh pejabat pusat, bahkan model kurikulum yang akan dikembangkan dapat berasal dari pemegang kekuasaan di pusat.<sup>384</sup>

Selain itu, Widyastono (2012) juga menambahkan bahwa manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional, satu kurikulum yang berlaku di seluruh wilayah negara.<sup>385</sup> Perihal ini menggambarkan bahwa penerapan sentralisasi menekankan pada

---

<sup>383</sup> Sidik.

<sup>384</sup> Herry Widyastono, 'Implikasi RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan Terhadap Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18.3 (2012), 342–51 <<https://doi.org/10.24832/jpnk.v18i3.93>>.

<sup>385</sup> Widyastono.

keseragaman sistem pendidikan, dengan seluruh satuan pendidikan mengacu pada standar yang sama secara nasional.

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Sentralisasi dalam Desain Kurikulum

Penerapan sentralisasi memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam menjaga keseragaman dan kemudahan pengelolaan sistem pendidikan secara nasional. Menurut Widyastono (2012) bahwa kurikulum seragam untuk seluruh daerah lebih mudah dalam pengendalian dan evaluasinya, serta memungkinkan diadakan penilaian hasil belajar yang bersifat nasional.<sup>386</sup>

Selain itu, keseragaman kurikulum memudahkan dalam pembinaan tenaga pendidik serta penyediaan sumber belajar karena standar yang digunakan sama di seluruh wilayah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sentralisasi memberikan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam hal pengawasan, evaluasi, dan standarisasi mutu pendidikan secara nasional.

Di samping kelebihan, sentralisasi juga memiliki keterbatasan, terutama dalam mengakomodasi keragaman kondisi daerah. Widyastono (2012) menjelaskan bahwa kurikulum yang bersifat nasional tidak dapat mengakomodasi keragaman kondisi, kebutuhan, dan tingkat kemajuan daerah.<sup>387</sup>

Penerapan kurikulum nasional dalam wilayah yang luas dapat menghadapi berbagai hambatan serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pemahaman dan implementasinya oleh pelaksana di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sentralisasi cenderung kurang fleksibel dan kurang adaptif terhadap kebutuhan lokal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kurikulum dan kondisi kebutuhan peserta didik.

---

<sup>386</sup> Widyastono.

<sup>387</sup> Widyastono.

### C. Kurikulum Desentralisasi

Penerapan desentralisasi dalam desain kurikulum adalah salah satu bentuk pengelolaan pendidikan yang tertuju pada distribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dan satuan pendidikan. Dalam desain kurikulum desentralisasi ini, pemerintah daerah mempunyai peran yang urgensi dalam mendesain dan melaksanakan kurikulum supaya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk menciptakan kurikulum yang relevan, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sosial.

Menurut Subandijah (1993) bahwa desentralisasi desain kurikulum adalah kegiatan administrasi yang menerapkan pendelegasian kewenangan kepada daerah-daerah dalam pengembangan kurikulum sekolah.<sup>388</sup> Dengan demikian menunjukkan bahwa ini dari metode desentralisasi ini adalah terjadinya pergeseran otoritas dalam pengambilan keputusan kurikulum dari pusat ke tingkat lokal, yakni pemerintah daerah.

#### 1. Pendelegasian Kewenangan dan Otonomi Sekolah dalam Desain Kurikulum

Dalam penerapan desentralisasi, kewenangan desain kurikulum diserahkan secara bertingkat hingga ke level daerah. Hal ini untuk memberikan ruang bagi kepala pemerintahan daerah untuk berperan aktif dalam merancang kurikulum sesuai dengan kondisi nyata peserta didik di lapangan.

Dengan demikian, daerah tidak lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan saja, akan tetapi menjadi aktor utama dalam proses pengambilan keputusan kurikulum. Dengan otonomi ini memungkinkan terjadinya fleksibilitas dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi, metode, hingga evaluasi.

Selain itu, dalam perspektif administrasi, metode desentralisasi juga mempersempit rentang kendali, yang berarti metode desentralisasi

---

<sup>388</sup> Subandijah, 'Suatu Mekanisme · Administrasi Kurikulum Masa Kini', *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1.12 (1993), 13–23.

memperkecil jumlah unit yang diawasi oleh suatu otoritas, sehingga proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum dapat dipantau secara lebih fokus, intensif, dan efektif dalam pelaksanaan kurikulum.

## 2. Relevansi Kurikulum dengan Kebutuhan Lokal

Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah untuk membuat kesesuaian antara kurikulum dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik di daerah tertentu. Subandijah (1993) menegaskan bahwa desentralisasi bertujuan supaya kurikulum relevan dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan masyarakat.<sup>389</sup>

Hal demikian juga diperkuat oleh pandangan Cohen (1982) yakni *the resultant curriculum may be continuously monitored and adjusted to become more relevant to students and more closely related to the needs and values of the local community.*<sup>390</sup>

Artinya kurikulum yang dihasilkan dan dilaksanakan dapat dipantau dan disesuaikan secara berkelanjutan supaya semakin relevan dengan kebutuhan peserta didik serta selaras dengan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat. Dari kedua pandangan diatas dapat dipahami bahwa kurikulum dalam sistem desentralisasi memiliki sifat kontekstual dan dinamis. Kurikulum tidak hanya ditentukan berdasarkan standar umum, akan tetapi juga harus disesuaikan dengan realitas kehidupan peserta didik dan kebutuhan masyarakat.

Implikasi kurikulum dengan metode desentralisasi akan berdampak pada materi pembelajaran yang akan jauh lebih mudah dipahami karena dekat dengan pengalaman nyata peserta didik, sehingga meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.

---

<sup>389</sup> Subandijah.

<sup>390</sup> David Cohen and Marelle Harrison, 'Curriculum Action Project. A Report of Curriculum Decision-Making in Australian Secondary Schools.', 1982.

### 3. *School-Based Curriculum*

Dalam pendekatan desentralisasi, pengembangan kurikulum dipandang sebagai proses yang terus berlangsung dan mengalami penyesuaian secara berkelanjutan. Menurut Cohen (1982) menyatakan bahwa *curriculum decision making is an ongoing and dynamic process*.<sup>391</sup> Lebih tepatnya, pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan bersifat dinamis, sehingga selalu dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada di dalam masyarakat.

Selain itu, Cohen (1982) juga mempertegas kembali dengan *each school and its community is a unique entity, and the curriculum should reflect the unique school context*.<sup>392</sup> Dapat dipahami bahwa setiap sekolah beserta komunitasnya memiliki karakteristik yang khas, supaya kurikulum yang dikembangkan perlu mencerminkan kondisi dan keunikan konteks sekolah tersebut.

Dengan demikian, setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda satu-sama lain, sehingga kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah harus mencerminkan keunikan tersebut. Oleh karena itu, muncul konsep *school-based curriculum decision making*, yaitu pengambilan keputusan kurikulum yang berpusat pada sekolah. Melalui pendekatan ini memungkinkan adanya diversifikasi kurikulum antar sekolah, baik dari segi materi, metode, maupun strategi pembelajaran.

---

<sup>391</sup> Cohen and Harrison.

<sup>392</sup> Cohen and Harrison.

## D. Kurikulum Campuran

### 1. Pengertian Kurikulum Campuran

Kurikulum campuran merupakan model pengembangan kurikulum yang menggabungkan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu sistem yang terpadu. Pendekatan sentralisasi menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak utama dalam merancang dan menentukan kurikulum secara menyeluruh, sedangkan pendekatan desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah atau satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>393</sup> Secara konseptual, kurikulum campuran hadir sebagai solusi atas keterbatasan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi yang berdiri secara terpisah. Pendekatan sentralisasi cenderung menekankan keseragaman dan kontrol penuh dari pemerintah pusat sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya, pendekatan desentralisasi memberikan kebebasan luas kepada daerah atau sekolah, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah.<sup>394</sup> Oleh karena itu, kurikulum campuran berupaya mengintegrasikan kelebihan dari kedua pendekatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, kurikulum campuran memberikan peran yang berbeda antara pemerintah dan satuan pendidikan. Pemerintah berfungsi menetapkan arah dan standar pendidikan nasional, seperti capaian pembelajaran, standar kompetensi lulusan, serta struktur kurikulum. Sementara itu, guru dan sekolah memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum pada tingkat operasional, misalnya melalui penyusunan modul ajar, pemilihan strategi pembelajaran, serta penyesuaian materi dengan kondisi peserta didik. Dengan demikian, guru tidak hanya menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan, tetapi

---

<sup>393</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 57.

<sup>394</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 102.

juga berperan aktif dalam mengembangkan dan menyesuaikan pembelajaran agar lebih relevan dan efektif.<sup>395</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kurikulum campuran merupakan model pengembangan kurikulum yang menitikberatkan pada keseimbangan antara standarisasi dari pemerintah pusat dan fleksibilitas yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Keseimbangan ini menjadi penting agar sistem pendidikan tetap memiliki arah dan mutu yang sama secara nasional, namun tetap mampu menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik peserta didik di masing-masing daerah. Dengan adanya ruang pengembangan di tingkat sekolah, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih kontekstual, relevan, dan bermakna bagi peserta didik.

## 2. Penerapan Kurikulum Campuran

Penerapan kurikulum campuran dalam sistem pendidikan dapat dilihat pada berbagai kurikulum yang pernah maupun yang sedang diterapkan di Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya perpaduan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewenangan yang diberikan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik.

## 3. Kurikulum 13 (K13)

Penerapan kurikulum campuran juga dapat dilihat pada Kurikulum 2013. Kurikulum ini menunjukkan adanya perpaduan antara peran pemerintah pusat dalam menetapkan standar pendidikan dengan peran guru dan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan.

Dalam Kurikulum 2013, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kompetensi inti, kompetensi dasar, serta struktur

---

<sup>395</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 150.

kurikulum yang menjadi acuan nasional.<sup>396</sup> Penetapan standar tersebut bertujuan untuk menjaga keseragaman arah dan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan buku ajar sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Dalam pelaksanaannya guru tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Guru dapat mengembangkan strategi, metode, serta media pembelajaran yang dianggap paling efektif sesuai dengan karakteristik siswa di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum telah ditetapkan secara nasional, pelaksanaannya tetap memberikan fleksibilitas kepada guru sebagai pelaksana utama dalam proses pembelajaran.

Kurikulum 2013 juga menekankan penggunaan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini mengarahkan peserta didik untuk aktif dalam proses belajar melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan hasil pembelajaran. Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan peserta didik.

#### 4. Kurikulum Merdeka

Terbentuknya kurikulum merdeka belajar membantu kebijakan positif pemerintah yang bertujuan untuk membantu anak-anak yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar mendapatkan pendidikan yang setara di seluruh Indonesia. Selain itu, kurikulum merdeka belajar akan mengubah strategi pengajaran kelas tradisional untuk menekankan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran luar kelas akan memberi peserta didik lebih banyak kesempatan untuk

---

<sup>396</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kurikulum 2013: Kompetensi Dasar Sekolah Menengah* (Jakarta: Kemendikbud, 2013), hlm. 4.

berbicara dengan guru. Karakter peserta didik akan dibentuk dengan belajar di luar kelas, baik keberanian mengemukakan pendapat dalam percakapan maupun kemampuan bergaul dan menjadi pembelajar yang berkompeten, sehingga masing-masing faktor tersebut akan semakin membentuk kepribadian peserta didik.<sup>397</sup>

Dalam Kurikulum Merdeka, sekolah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam menyusun kurikulum operasional. Satuan pendidikan dapat merancang struktur pembelajaran, menyusun modul ajar, serta menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru juga memiliki kebebasan dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih fleksibel dan menyenangkan.

Salah satu ciri khas dalam Kurikulum Merdeka adalah adanya kegiatan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Melalui kegiatan ini, sekolah dapat mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang disesuaikan dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik secara menyeluruh.

Dengan adanya pembagian peran antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan, Kurikulum Merdeka mencerminkan penerapan kurikulum campuran yang lebih fleksibel dan adaptif. Pemerintah tetap berperan dalam menjaga standar nasional, sementara sekolah dan guru memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai bentuk pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di era modern.

---

<sup>397</sup> Pingky Sukma Melati, 'Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Sekolah Dasar Mempengaruhi Pada Hasil Evaluasi Belajar Peserta Didik'.

## 5. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Campuran

### a. Kelebihan kurikulum campuran

Setiap kurikulum mempunyai kelebihan, adapun kelebihan dari kurikulum campuran adalah adanya keseimbangan antara standarisasi nasional dan fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mampu menjaga mutu pendidikan secara merata, sementara fleksibilitas yang diberikan kepada sekolah memungkinkan penyesuaian pembelajaran dengan kondisi peserta didik.

Selain itu, kurikulum campuran mendorong kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai pengembang yang dapat menyesuaikan metode, media, dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.<sup>398</sup> Hal ini dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik.

Kelebihan lainnya adalah kemampuan kurikulum campuran dalam mengakomodasi kebutuhan lokal. Sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya, potensi daerah, serta kondisi lingkungan ke dalam pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik.

### b. Kekurangan kurikulum campuran

Selain memiliki kelebihan, kurikulum campuran juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah adanya tuntutan kompetensi yang tinggi bagi guru. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran secara mandiri, sehingga tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama dalam melaksanakannya.

---

<sup>398</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 45.

Selain itu, penerapan kurikulum campuran berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah. Sekolah yang memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai cenderung lebih mampu mengembangkan kurikulum secara optimal dibandingkan dengan sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.

Kekurangan lainnya adalah perlunya pengawasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Jika tidak dikelola dengan baik, pembagian kewenangan ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan di lapangan.

# **BAB XIII**

## **Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Dasar Dan Menengah**

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, sistem pendidikan dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kurikulum sebagai pedoman utama dalam proses pendidikan harus senantiasa dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>399</sup>

Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sebagai bentuk penyempurnaan sistem pendidikan nasional. Perubahan tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memperbaiki berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi, seperti rendahnya kualitas literasi dan numerasi peserta didik, kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, serta pembelajaran yang masih berorientasi pada penguasaan materi semata.<sup>400</sup> Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar terhadap proses pembelajaran sehingga menyebabkan terjadinya learning loss atau penurunan capaian belajar peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.<sup>401</sup>

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadirkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan transformasi pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dan berfokus

---

<sup>399</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

<sup>400</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2021), hlm. 1–3.

<sup>401</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic* (Paris: OECD Publishing, 2021), hlm. 15.

pada materi esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.<sup>402</sup> Kurikulum ini juga memberikan fleksibilitas kepada guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kondisi satuan pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik melalui penerapan Profil Pelajar Pancasila. Profil tersebut mencakup enam dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.<sup>403</sup> Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran diharapkan menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

Meskipun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua satuan pendidikan memiliki kesiapan yang sama dalam menerapkan kurikulum ini, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran berbasis diferensiasi dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.<sup>404</sup> Selain itu, adanya perbedaan kondisi geografis dan sosial ekonomi antarwilayah juga memengaruhi efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelaahan terhadap Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar dan menengah menjadi penting untuk dilakukan. Penelaahan ini bertujuan untuk memahami konsep dasar Kurikulum Merdeka, karakteristiknya, implementasi di sekolah, serta

---

<sup>402</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kurikulum Merdeka sebagai Opsi Satuan Pendidikan dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

<sup>403</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka (Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2022), hlm. 2.

<sup>404</sup> Nur Atik Azkiyah dan Abd Rozak, “Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Mewujudkan Pemerataan Mutu Pendidikan di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 7, no. 2 (2024): 120–123.

kelebihan dan tantangan dalam penerapannya. Dengan demikian, hasil penelaahan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional demi terciptanya sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

## **B. Pengertian Kurikulum Merdeka**

Secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa latin, yaitu curriculum, artinya sirkus balap atau *a running course*.<sup>405</sup> Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memungkinkan peserta didik mampu mendalami suatu konsep dan keterampilan yang memadai dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Fleksibilitas guru lebih diutamakan untuk memilih dari berbagai alat pendidikan yang adaptif dengan model pengajarannya berdasarkan kebutuhan dan minat belajar siswa. Nadiem Makarim sebagai pembuat kebijakan kurikulum merdeka menjelaskan substansi atau inti dari kurikulum ini adalah merdeka belajar yaitu konsep yang dibuat agar peserta didik mampu berkembang secara kognitif afektif dan psikomotorik dengan mendasarkan pada bakat dan minatnya.<sup>406</sup>

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang fleksibel berbasis kreativitas yang ditetapkan pemerintah mulai tahun 2022/2023 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum merdeka sering disebut kurikulum prototipe yang merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 2013.<sup>407</sup> Kurikulum merdeka merupakan program kebijakan yang direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembalikan sistem pendidikan negara pada inti hukum dengan memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa untuk belajar

---

<sup>405</sup> Khoiriah, Beta Hana, dan Deriwanto. 2022. "Implementasi Hidden Curriculum pada Proses Pembelajaran di RA Tunas Literasi Qur'an." *Literasiologi* 2022 9 (1).

<sup>406</sup> Swawikanti, Kenya. 2022. "Kupas Tuntas Kurikulum Merdeka, Begini Konsep & Implementasinya." *Ruang Guru* (blog). 2022. <https://www.ruangguru.com/blog/kurikulum-merdeka>.

<sup>407</sup> Mulyasa, Implementasi Kurikulum Merdeka

secara bebas. Kebebasan berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional.<sup>408</sup>

Merdeka belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif, Dengan adanya kurikulum merdeka tersebut pemerintah mengharapkan peserta didik dapat berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki karena dengan kurikulum merdeka mendapatkan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspresif, aplikatif, variative dan progresif. Dengan adanya perubahan kurikulum merdeka, diperlukan kerjasama, komitmen yang kuat, kesungguhan dan implementasi nyata dari semua pihak. Sehingga profil pelajar pancasila dapat tertanam pada peserta didik. Asumsi utama merdeka belajar adalah pemberian kepercayaan kepada guru sehingga guru merasa merdeka dalam melaksanakan pembelajaran

Kurikulum Merdeka adalah suatu inovasi pendidikan yang diimplementasikan dengan harapan agar dapat membawa perubahan akan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka menjadi pengganti kurikulum sebelumnya (Kurikulum 2013), yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada sekolah dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Prinsip utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka tersebut ialah memerdekakan peserta didik dalam menemukan pengetahuan sesuai minat dan bakatnya sehingga segala bentuk potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal.<sup>409</sup>

---

<sup>408</sup> Dharma dan Sihombing, "Merdeka Belajar : Kajian Literatur."

<sup>409</sup> Dina Kurnia Restanti, Prilly Lastika Manuputty, and Tasya Tamaela, *Merdeka Belajar Merdeka Mengajar Dari Perspektif Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia* (Pabean: Adanu Abimata, 2021), 9

### C. Karakteristik Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Karakteristik kurikulum merdeka mengalami pemulihan pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial serta memilikinya guru yang fleksibilitas dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan penyesuaian peserta didik.<sup>410</sup> Kurikulum merdeka mempunyai beberapa karakteristik seperti berikut:

1. Pembelajaran berbasis proyek pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan adanya proyek ini memberikan peserta didik peluang lebih dalam untuk menggali informasi secara aktif untuk mendukung kompetensi profil siswa pancasila dan pengembangan karakter. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang secara terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan rangkaian kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Pembelajaran berbasis proyek menjadi pilihan dalam kurikulum prototipe yang mana dianggap mampu mendukung pemulihan pembelajaran akibat learning loss sebagai pengembangan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.<sup>411</sup>
2. Pembelajaran berbasis Proyek atau yang di singkat dengan (PjBL) ini dibentuk dengan landasan teori-teori pembelajaran yang sangat inovatif (konstruktivime dan pembelajaran berdasarkan pengalaman) dengan mesetting permasalahan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan solusi yang tepat.<sup>412</sup> PjBL salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pendidik dalam usaha membantu

---

<sup>410</sup> Mulyasa, Implementasi Kurikulum Merdeka.

<sup>411</sup> Nugraheni Rachmawati et al., "Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Prototipe Di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 3 (2022): 3613–3625.

<sup>412</sup> Lutfiana Indah Sari, Hari Satrijono, and Sihono, "Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VA SDN Ajung 03,"

peserta didik agar menjadi kompeten dalam memecahkan masalah, bahkan penyelesaian masalah tersebut dapat menghasilkan suatu produk, sehingga peserta didik siap menghadapi tantangan ke depan.<sup>413</sup>

3. Peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami kompetensi secara bertahap dan memfokuskan terhadap materi esensial.

Pembelajaran berbasis kompetensi mencakup prinsip-prinsip yaitu 1) Terpusat pada Peserta didik, 2) Berfokus pada penguasaan kompetensi, 3) Tujuan pembelajaran spesifik, 4) Penekanan pembelajaran pada unjuk kerja/kinerja, 5) Pembelajaran lebih bersifat individual, 6) Interaksi menggunakan multi metoda: aktif, pemecahan masalah dan kontekstual, 7) Pengajar lebih berfungsi sebagai fasilitator, 8) Berorientasi pada kebutuhan individu, 9) Umpan balik langsung, 10) Menggunakan modul, 11) Belajar di lapangan (praktek), 12) Kriteria penilaian menggunakan acuan patokan.<sup>414</sup>

4. Penerapan pembelajaran berbasis kompetensi pada Kurikulum Merdeka berlandaskan pada efisien dan efektivitas. Pemfokusan tersebut disesuaikan dengan materi yang esensial, relevan, dan mendalam sehingga peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi dalam mencapai kompetensi dasar. Kompetensi yang dirancang dalam kurikulum tersebut terfokus pada peningkatan terhadap literasi dan numerasi.<sup>415</sup>

---

<sup>413</sup> Mahfudz Reza Fahlevi, "Upaya Pengembangan Number Sense Siswa Melalui Kurikulum Merdeka ( 2022 )" 5 (2022): 11–27

<sup>414</sup> Pendekatan Pembelajaran and Berbasis Kompetensi, "Knowing , Loving" (1982): 1–9

<sup>415</sup> Yandi Chidliir, "Memahami Karakteristik Kurikulum Merdeka: Siap Menjadi Agen Perubahan Bangsa!," Redaksi Guru Inovatif, n.d., <https://guruinovatif.id/@redaksiguruinovatif/memahami-karakteristik-kurikulum-merdekasiapmenjadi-agen-perubahan-bangsa>.

5. Literasi dan numerasi menyimpan manfaat penting bagi kehidupan para pembelajar. Numerasi sendiri adalah keterampilan yang dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan, baik di rumah, untuk pekerjaan, termasuk dalam masyarakat. Begitu juga dengan literasi, adanya peningkatan literasi agar seseorang mampu mengelola serta memaknai pengetahuan dan informasi yang diterima.<sup>416</sup>
6. Pembelajaran terdiferensiasi sehingga peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai cita cita dan minat bakatnya sesuai dengan konteks dan muatan lokal. Fleksibilitas pembelajaran diperlukan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep dasar. Adapun tujuan fleksibilitas dalam kurikulum tersebut adalah untuk menjadikan kurikulum lebih relevan dan siap merespons dinamika lingkungan dan beragam perubahan serta untuk memberikan ruang untuk pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa.<sup>417</sup>
7. Pada kurikulum merdeka Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Diferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang mereka sukai, dan kebutuhan individu mereka sehingga mereka tidak frustrasi dan merasa gagal selama proses pembelajaran.<sup>418</sup>

---

<sup>416</sup> Beti Istanti Suwandayani Dyah Worowirastrri Ekowati, LITERASI NUMERASI UNTUK SEKOLAH DASAR (Malang: UMM PRESS, 2019).

<sup>417</sup> Fahlevi, "Upaya Pengembangan Number Sense Siswa Melalui Kurikulum Merdeka ( 2022 )."

<sup>418</sup> Desy Wahyuningsari et al., "Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Rangka Mewujudkan Merdeka Belajar," Jurnal Jendela Pendidikan 2, no. 04 (2022): 529–535

#### **D. Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah**

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah merupakan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum Merdeka diterapkan secara bertahap pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan menyesuaikan kesiapan satuan pendidikan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun budaya belajar di sekolah. Menurut Kemendikbudristek, implementasi Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyusun pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan karakteristik peserta didik.

Dalam implementasinya, sekolah diberikan kebebasan untuk memilih perangkat ajar, metode pembelajaran, serta bentuk asesmen yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka menekankan pada kegiatan yang aktif, kolaboratif, serta berbasis pengalaman nyata agar peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran.<sup>419</sup>

Salah satu bentuk implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah adalah penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan menyesuaikan proses belajar berdasarkan kemampuan, minat, dan kebutuhan peserta didik sehingga setiap siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Guru dapat

---

<sup>419</sup> Ria Yunitasari and Umi Hanifah, 'Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa COVID-19', *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 2.3 (2020), pp. 232–43.

membedakan materi, metode, maupun bentuk penilaian agar seluruh peserta didik dapat berkembang secara optimal.<sup>420</sup>

Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Peserta didik tidak hanya dituntut menghafal materi, tetapi juga memahami konsep, mengembangkan keterampilan, dan membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

### **E. Kelebihan dan Tantangan Penerapan Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Merdeka memiliki berbagai kelebihan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu kelebihannya adalah pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Fleksibilitas tersebut membuat proses pembelajaran lebih kontekstual, kreatif, dan tidak hanya terpaku pada penyelesaian materi semata.

Kelebihan lainnya yaitu Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik melalui Profil Pelajar Pancasila. Peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki sikap mandiri, kreatif, bernalar kritis, serta mampu bekerja sama dengan baik. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses belajar.<sup>421</sup>

Kurikulum Merdeka juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai potensi yang dimiliki.

---

<sup>420</sup> Desy Wahyuningsari, Yuniar Mujiwati, and Lailatul Hilmiyah, 'Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Rangka Mewujudkan Merdeka Belajar', *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2.04 (2022), pp. 529–35.

<sup>421</sup> 'Dimensi, Elemen, Dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila', in *Dan, Badan Standar Kurikulum Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Kebudayaan Indonesia*, 2022, pp. 35–37.

Pada jenjang pendidikan menengah, peserta didik dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan cita-cita dan kebutuhannya. Hal tersebut membuat pembelajaran lebih relevan dan membantu peserta didik dalam merencanakan masa depan pendidikan maupun kariernya.<sup>422</sup>

Selain memiliki berbagai kelebihan, penerapan Kurikulum Merdeka juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan guru dalam memahami konsep dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan teknologi, maupun pengembangan proyek berbasis Profil Pelajar Pancasila. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka di beberapa sekolah belum berjalan secara optimal.<sup>423</sup>

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Masih terdapat sekolah di daerah tertentu yang belum memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti akses internet, perangkat teknologi, maupun bahan ajar yang mendukung pembelajaran digital. Padahal, Kurikulum Merdeka menuntut adanya inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran.<sup>424</sup>

Selain itu, perubahan paradigma pembelajaran dari teacher centered menjadi student centered juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian guru masih terbiasa menggunakan metode ceramah sehingga memerlukan proses adaptasi untuk menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif. Peserta didik juga membutuhkan penyesuaian agar mampu belajar secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya.<sup>425</sup>

---

<sup>422</sup> Dewa Ayu and others, 'Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah', 7 (2023), pp. 29130–37. MUTIAR

<sup>423</sup> Mohammad Rafatta Umar, Charren Galuh Indraswari, and Dwi Desky Setiawan, 'Analisis Model Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Indonesia', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2.1 (2025), pp. 66–76.

<sup>424</sup> Mutiara and Nofrion, 'Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Di SMAN 2 Gunung Talang Kabupaten Solok', *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 8 (2024).

<sup>425</sup> Amilatus Sholikah, Tiwi Widya Lestari, and Misbahul Khanif, 'Transformasi Pendidikan Melalui Kurikulum Merdeka Belajar Dengan Tantangan Dan Juga Peluang Yang Muncul', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (2024), pp. 31152–56.

Di samping itu, pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) terkadang masih mengalami kendala dalam pengelolaan waktu, pendanaan, dan koordinasi antar guru. Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam merancang projek yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat agar pelaksanaan projek dapat berjalan dengan efektif.<sup>426</sup>

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kurikulum Merdeka tetap menjadi langkah penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Dengan dukungan pelatihan guru, peningkatan sarana prasarana, serta kolaborasi seluruh pihak, implementasi Kurikulum Merdeka diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

---

<sup>426</sup> Rachmawati and others, 'Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Prototipe Di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar'.

